



SALINAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH (RPJM) DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 Pasal 2 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas Pemerintah di Daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJMN Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal terjadinya perubahan yang mendasar, rencana pembangunan Daerah dapat diubah;
  - c. bahwa dalam kerangka upaya pencapaian visi, misi, dan program Walikota perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, sehingga RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto 2013-2018.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Uluheh Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2033
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)  
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013-2018.

**Pasal 1**

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 17), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) RPJM Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah



	Serta Kerangka Pemahaman
d. BAB IV	Analisis Isi-Isi Strategis
e. BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
f. BAB VI	Strategi dan Arah Kebijakan
g. BAB VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
h. BAB VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebijakan Pemukiman
i. BAB IX	Pengetapan Indikator Kinerja Daerah
j. BAB X	Perubahan Transisi Dan Kandah Pelaksanaan

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 17 April 2017  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

td

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 17 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

td

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT :  
(1/23/2017)

Salin sesuai dengan aslinya  
KEPALA SASAK HUKUM DAN HAM

  
HARISMAN, SH  
NIP. 19601210 198302 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013 - 2018

**1. UMUM**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang hirarki perencanaan, proses perencanaan, mekanisme perencanaan, isi rencana, waktu pelaksanaan serta stakeholder perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan yakni nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, undang-undang tersebut juga menggunakan tentang perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah atau sedang dijalankan untuk dapat mengetahui tingkat capaian pelaksanaan pembangunan berikut menyusun kebijakan dan program yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan rencana pada periode yang tersedia.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kota Sawahlunto yang sedang dilaksanakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahap III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Periode 2005-2025. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 tersebut terdapat Visi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintah yang Melayani" dengan 7 misi. Ketujuh misi tersebut sebagai berikut: Misi (1) Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dan Menciptakan Peluang Usaha Melalui Ketrampilan Pariwisata dan Produk Lokal, Misi (2) Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah, Misi (3) Memperuk Kehidupan Sosial yang Agamis dan Berkeadilan Mulia serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Berkeadilan, Misi (4) Menumbuhkan Masyarakat yang Berintelektualitas, Sehat dan Sejahtera yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya, Misi (5) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, Melayani, Kreatif, Inovatif dan Efisien, Misi (6) Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah dan Misi (7) Memperluas Jaringan Sosial, Ekonomi secara Nasional dan Internasional.

Pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 tersebut telah memasuki tahun ketiga. Untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dari hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi RPJMD dan RPJMN, RKPD dan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi pertengahan jalan terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.

Hasil dari pelaksanaan evaluasi pertengahan jalan pelaksanaan RPJMD Sawahlunto, terdapat beberapa kebijakan yang harus disesuaikan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan nasional dan daerah sehingga kebijakan daerah yang telah direncanakan harus disesuaikan kembali dengan perubahan kebijakan

dimaksud Perubahan kebijakan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 memuat Nawa Cita yang meliputi antara lain perubahan kebijakan nasional di bidang pendidikan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang pekerjaan umum, penerapan standar pelayanan minimal, serta adanya perubahan struktur organisasi. Perubahan kebijakan tersebut membawa dampak terhadap indikator capaian pembangunan, yang selanjutnya untuk sisa tahun rencana perlu dilakukan kesesuaian kembali antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dengan tetap memperimbangkan kemampuan keuangan daerah serta visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas serta dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 50 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 287, Pasal 289, dan Pasal 289 maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto perlu dilakukan perubahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LAYAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya dalam pemerintahan pemerintahan masyarakat. Pada pasal 263 ayat (1) disebutkan bahwa RPJMD merupakan petunjuk arah visi, misi dan program kepala daerah yang memiliki tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan kebijakan daerah, serta program Perangkat Daerah dan Rincian Perangkat Daerah yang diarahkan dengan berorientasi pendayagunaan sumber daya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2008 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018. RPJPD Kota Sawahlunto telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto. Saat ini RPJMD Kota Sawahlunto merupakan tahap ke 3 dari periode RPJPD Kota Sawahlunto dalam rangka mewujudkan visi Kota Sawahlunto 2008-2025 yaitu Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 yang menggantikan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tanggal 26 Mei Tahun 2013. Hal ini juga sebagai pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJPD dan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan Perda.

Dalam periode pelaksanaannya, RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 telah memasuki tahun ketiga yaitu tahun 2016. Dalam perkembangannya banyak perubahan dan dinamika lingkungan, baik lingkungan eksternal (provinsi, nasional, bahkan internasional) maupun lingkungan internal Kota Sawahlunto. Berikut perubahan lingkungan eksternal antara lain:

- Telah ditempuhnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Telah ditempuhnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menjabarkan strategi, arah dan kebijakan pembangunan nasional dengan Triadiknya dan 9 (sembilan) agenda pembangunan nasional "New Cile" dari presiden dan wakil presiden terpilih, Ir. H. Joko Widodo dan Dr. H. Muhammad Jusuf Kalla.
- Adanya pengisian kepemimpinan Provinsi Sumatera Barat dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc dan Dr. H. Naurai Ali sehingga perlu penyesuaian terhadap agenda pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya dinamika kondisi internal Kota Sawahlunto yang perlu diantisipasi antara lain:

- Perluasan pemenuhan permasalahan dan isu-isu strategis Kota Sawahlunto;
- Perluasan penyusunan program berdasarkan kondisi umum Kota Sawahlunto dan pemenuhan pada Rencana Kementerian/Lembaga yang berlaku.



- Penyesuaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja program berdasarkan SPN Kementerian/Lembaga;
- Penetapan target capaian indikator kinerja program untuk periode tahunan 2016, 2017 dan 2018 sesuai realisasi capaian indikator kinerja program 2013-2015;
- Upaya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto dan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto.

Perubahan RKPD dioperasikan akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, karena akan menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan RKPD dan Penyusunan Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan juga dioperasikan akan meningkatkan kualitas dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sampai pada siklus periode pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan dari penyusunan Perubahan RKPD ini adalah Peraturan dari Landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 diawali berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo. Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Kabupaten dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembagian Uruturutan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Jajkja Fungsional Nasional Tahun 2005 - 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578).
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaksanaan atau Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Privilegia Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembastutan Produk Hukum Daerah.

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021;
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2022;
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lampiran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16. Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 (Lampiran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Sistem Peringkat Daerah (Lampiran) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).

### 1.3 KEBERLAKUAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

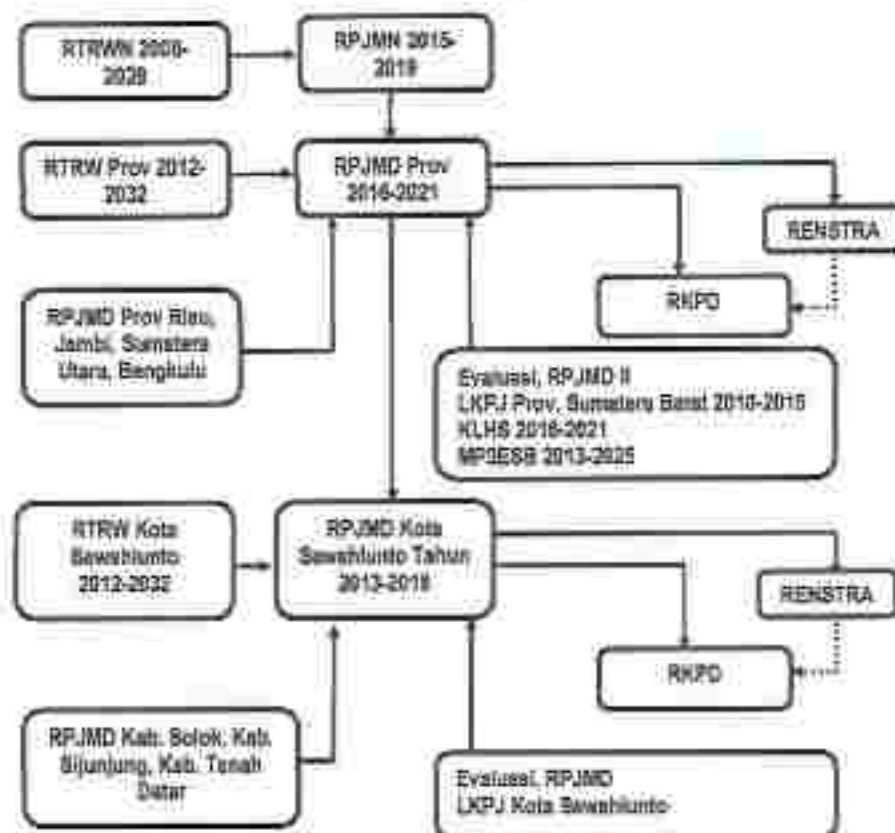
Kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kota di lingkungan Pemerintahan Kota Sawahlunto, khususnya dalam menjelaskan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain, secara skematis terlihat sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Misi-garis kedua Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025 yang merupakan tahap ketiga dalam pelaksanaannya dengan fokus pembangunan diarahkan pada: (1) terwujudnya sumber daya manusia berkualitas (2) terwujudnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur (3) terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (4) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan dalam dan (5) terwujudnya pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
3. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJM Nasional 2013-2019 untuk menyempatkan RPJMD Kab/Kota sebagai setingkatnya yang disampaikan oleh pasal 54 ayat (2) Permendagri Nomor 34 Tahun 2010;
4. RPJMD Kota Sawahlunto 2013-2018 akan diintegrasikan arah pembangunan ke dalam Rencana yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Sawahlunto tahun 2013-2018 (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012).

1. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) selama waktu lima tahunan. Renstra OPD merupakan pengelompokan rencana RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kegiatan serta alokasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun oleh OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pemerintah dan Pengembangan Daerah.
2. Rencana operasional RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD.

Gambar 1.1  
Hubungan RPJMD dengan  
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya





## 1.4 SISTEMATIKA PERUBAHAN

Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematis perubahan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan
	1.3 Hubungan Antar Dokumen
	1.4 Sistematika Penyusunan
	1.5 Maksud dan Tujuan
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
	2.3 Aspek Pelayanan Umum
	2.4 Aspek Daya Saing Daerah
BAB III	DAFTAR DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PERDANAAN
	3.1 Rincian Keuangan Masa Lalu
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
	3.3 Kebijakan Pembiayaan
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
	4.1 Pembandingan Pembangunan
	4.2 Isu Strategis
	4.3 Keterkaitan dengan Dokumen Lainnya
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
	5.1 Visi
	5.2 Misi
	5.3 Tujuan dan Sasaran
BAB VI	STRATEGI DAN AKSI KEBANGUNAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
	7.2 Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan
	7.3 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan
	7.4 Kebijakan Pembangunan Lintas OPD
BAB VIII	DAFTAR RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KESUTUTUAN PENDANAAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN RENCANA PELAKSANAAN

## 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.5.1 MAKSUD

Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mampu memberikan ruminan strategi, arah kebijakan, program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu serta responsif terhadap perubahan yang bergerak secara dinamis, sehingga kebijakan dan program yang dilaksanakan

dapat mendukung pencapaian terwujudnya visi, misi dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota.

### 1.5.2 TUJUAN

Tujuan utamanya Penelitian RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2015-2018 adalah untuk:

1. Menjelaskan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota ke dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah final, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
2. Menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD.
3. Menjadikan RPJMD sebagai dokumen rujukan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto dalam memantapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan APBD Kota, Provinsi dan APBN serta sumber daya lainnya.
4. RPJMD sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar stakeholder untuk menentukan strategi dan prioritas pembangunan daerah.
5. Sebagai instrumen untuk mempersefektif dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
6. Membangun kemitraan melalui bentuk kerjasama dan sinergisan pembangunan, baik antar Pemerintah Kota Sawahlunto, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota berbatasan maupun stakeholder lainnya (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat).

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1. KARAKTERISTIK WILAYAH

Secara astronomis Kota Sawahlunto terletak antara  $0^{\circ}53' 40'' - 0^{\circ} 58' 55''$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ} 41' 50'' - 100^{\circ} 49' 00''$  Bujur Timur dengan luas 27.345 Ha atau 274,45 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Sawahlunto berada pada ketinggian 250-785 m dari permukaan laut.

Secara administratif Kota Sawahlunto terdiri dari 4 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 Desa. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bimbang dengan luas 32,95 km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan terbesar adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99,39 km<sup>2</sup> untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
Kecamatan Bimbang	32,95
Kecamatan Lintang Ragar	51,55
Kecamatan Bimbang	28,55
Kecamatan Talawi	99,39
Jumlah	212,48

Sumber: RPS Tahun 2013

Secara Geografis Kota Sawahlunto berbatasan dengan beberapa Kabupaten, yaitu:

- Sebelah Utara : dengan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : dengan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Barat : dengan Kabupaten Solok.

#### 2.1.2. POTENSI PENGGUNAAN LAHAN

##### 1. Topografi dan Morfologi

Secara topografi wilayah Kota Sawahlunto termasuk di perbukitan dengan ketinggian antara 250-650 meter dari permukaan laut, berbentang dari utara ke selatan. Bagian timur dan selatan memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan lebih dari 40%, yang kemiringan lainnya mencapai 28,52% dari luas wilayah kota, sedangkan bagian utara bergelombang dan relatif datar. Persebaran persebaran hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah Kecamatan Bimbang, yang wilayahnya relatif datar dengan total luas 18% dari luas wilayah. Sebaran topografi kemiringan lahan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Kelirangan Lahan di Kota Sawahlunto Tahun 2018

Kondisi Lahan	Luas Lahan Dengan Kelirangan (Ha)					Jumlah (Ha)
	0 - 2%	2 - 10%	10 - 25%	25 - 40%	> 40%	
Talawa	951	1.428	1.680	1.185	1.551	6.795
Banuhari	240	1.414	1.432	1.460	1.190	6.736
Tk. Besar	240	558	664	1.428	2.110	5.998
Kotabaru	20	399	978	240	291	1.928
Jumlah	1.451	3.899	4.754	4.913	5.142	20.159

Sumber: BPN Kota Sawahlunto

## 2. Geologi dan Jenis Tanah

Kota Sawahlunto terletak di atas Formasi Spechtorn, lapisan yang terbentuk pada zaman yang diberi istilah kala (epoch) Eosen sekitar 40 - 60 juta tahun yang lalu, saat berada di cekungan pra-terasi Ombilin yang berbentuk belah ketupat panjang dengan ujung beluk, lebar 22,50 km dan Panjang 47,00 km. Dalam cekungan ini diperkirakan 1,00 km, diisi oleh lapisan yang muda yang disebut dengan Formasi Breksi, Formasi Sangkarewang, Formasi Sawahlunto, Formasi Sawah Tembung dan Formasi Ombilin. Formasi Ombilin merupakan lapisan paling muda setelah lastopon zaman miocen atau berumur sekitar 2 juta tahun.

## 3. Iklim dan Meteorologi

Suhu udara rata-rata rata-rata di Sumatera Barat (rata-rata antara 23° - 28°C) sedangkan perbedaan suhu temperatur siang dan malam antara 2°-7°C, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Kota Sawahlunto berkisar antara 22°-23°C.

Peta Curah Hujan Indonesia memberikan gambaran bahwa Kota Sawahlunto berada di dalam isotnya (garis curah hujan antara 1.500 - 2.000 mm per tahun dengan rata-rata curah hujan per tahunnya sebesar 1.716,37 mm dengan rata-rata hari hujan 130 hari. Seperjang tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan pada bulan November sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai Oktober.

## 4. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) INDRAMATI yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai atau batang aliran yaitu:

### a. Batang Ombilin

Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari timur ke selatan dari Desa Talawa Mudik ke Desa Bantih Kecamatan Talawa. Sungai ini terbentuk dari Sungai Sangkareh dan bermuara di Batang Kientan Wau, dengan debit sungai di daerah Bantih Bantih lebih dari 10 m³/detik.

### b. Sungai Makutan

Sungai ini mengalir dari barat yang terbita di Desa Sibersabung Kecamatan X Kota Kabupaten Uno ke timur melewati Desa Kolak Mudik dan Desa Kolak Nan Tui di Kecamatan Batang yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.

### c. Batang Lantih

Sungai ini terbita di Desa Lantih Kecamatan Baruga dan mengalir dari arah barat menuju timur dan membelah belah dan bermuara di Batang Ombilin.



- **Sungai Simpahan**

Sungai ini terdapat di Hilirong Uluu, Hilirong di Kecamatan Lebuh Segar kemudian bertemu dengan Hilirong Lunta di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Hilirong Sembil.

- **Sungai Lasi**

Sungai ini terdapat di Kecamatan IX Koto, Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Hilirong, dan masuk di perbatasan Kota Sawahlunto - Sijunjung. Sungai ini bermuara bertemu juga dengan Hilirong Cimilin di Sungai Kuantan atau Indragiri.

## **5. Air Tanah**

Kebanyakan air tanah terbatas pada kedalaman dibawah 100 m sementara celah-celah antara lava hasil penerusan Formasi Sawah Tambung dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Sehingga potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber air baku.

## **6. Mata Air**

Mata air ini muncul pada lereng terjal, dimana debit kurang dari 2 l/detik terdapat di Hilirong, yang mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya kecil dan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PTAM. Mata air lain dijumpai ke arah tenggara Sawahlunto di Bukit Sintang, Desa Hilirong, sumbu ini sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih 5 l/detik dan mengalir sepanjang waktu terdapat di Desa Bulu, Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada waktu air muka laut pasang dan lapisan tuf yang ditambung pada lereng permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih Kota Sawahlunto.

### **3.1.3. WILAYAH KAWAN RESCARA**

Berbeda pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, biologi, struktur geologi, mataair, kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa wilayah alam yang sering terjadi bencana tanah longsor dan petak-petak (pasir).

Morfologi dan kemiringan lereng dapat menentukan potensi tingkat bahaya bencana gempa bumi dan longsor. Pertumbuhan tumbuhan yang dilakukan oleh PT Bukit Asam dan perusahaan lainnya di daerah Sawahlunto dan sekitarnya, berperan cukup besar dalam pembentukan bentang alam atau morfologi saat ini sehingga sewaktu-waktu bentang alam tersebut kembali setiap saat terutama dalam kemiringan lerengnya.

#### **a. Struktur Geologi (Petak-petak)**

Di Sawahlunto terdapat dua buah sesar besar yaitu sesar besar Sawahlunto dan sesar besar Batu Tajam berarah barat laut - tenggara, mengindikasikan arah sesar besar Sumatera, jalur kedua sesar tersebut berada di daerah pedalaman sebelah barat daya jalan raya Sawahlunto-Bantur.

Sementara regional struktur geologi yang berkembang di cekungan Cimilin berarah barat laut-tenggara dan timur laut - barat daya, tidak ada berupa sesar/pemahan maupun perlipatan. Cekungan Cimilin ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sesar normal Tumpang Angulu/ sesar Pemusutan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun sedangkan Sawahlunto sedangkan bagian



tuas) yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif stabil.

Sesar turun Omblin terlibat pada kontrol ahli kimia Sungai Cikanin yaitu basin last-terrace, sedangkan sesar turun lainnya yaitu sesar Padang Malintang, sesar Batidurut, sesar Sagar, sesar Teluk dan sesar Sibeng berarah timur-laut-barat daya.

Berdasarkan analisis struktur miring yaitu dengan penggunaan lengkung dipangkas menunjukkan adanya bidang sesar jenis normal dan arah lekat/retakan yang dapat memberikan petunjuk arah aliran dan jenis potakret. Berdasarkan identifikasi secara visual (*drag fold*) sekitar pelatikan dengan skala kecil terlihat pada pemukiman dihilir-tengah jalan raya provinsi, jalan raya kota dan jalan desa, serta dalam area basin seperti petakretan.

Seberapa sesar gradi (*thrust fault*) diantaranya adalah sesar Sawahlunto merupakan sesar utama (*core pertana*) yang berarah barat laut - tenggara dan sesar Sagar berarah utara selatan telah mempengaruhi pola aliran sungai Batang Lunta, sedangkan sesar Padang Malintang dan sesar Batidurut telah mempengaruhi pola aliran sungai Batang Omblin dan anak-anak sungainya yang menghantuk pola aliran sungai menengah (*thalwa*).

#### A. Cendawan Tanah atau Longgaman (*Mass Slump*)

Longgaman bahan terbentuk yang disebabkan oleh nilai modulus elastisitas dalam pemampasan kerang untuk pembangunan petakretan perambatan minimal sebagian di Kecamatan Lambah Sagar dan Kecamatan Karungu.

Berdasarkan data, informasi, dan kemapakan di lapangan daerah Kota Sawahlunto dan sekitarnya memiliki geologi yang dominan umumnya berupa formasi alam yang disebabkan oleh proses berifat alami, seperti gerakan tanah, erosi akibat perataan dan erosi lahan lerjak, kondisi geologi yang terjadi bahaya longgaman tersebut dapat dikendalikan sebagai berikut.

Longgaman tanah tipe reruntuhan terjadi yang mengancam jalan Banjar - Tabawi dan tepatnya dihilir Wadling Plant Banjar Baran 4 pada km.7, terjadi pola lapisan bertumpukan (*Formasi Sawahlunto*) disebabkan karena ketidakstabilan lereng lereng lereng lereng oleh erosi lereng lereng lereng.

#### A. Gempa Bumi

Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi yaitu gempa bumi, sedangkan longgaman dan bidang lereng lereng akan cenderung menjadi faktor bencana. Selain pengembangan wilayah. Kegempaan di Daerah Cekungan Omblin berdasarkan catatan episanter (pusat gempa dengan radius 100 km dari Kota Sawahlunto dari tahun 1973 sampai tahun 1999 telah terjadi sebanyak 420 kali kejadian gempa bumi. Dari catatan gempa bumi tersebut menunjukkan bahwa daerah Sawahlunto dan sekitarnya banyak terjadi gempa bumi dangkal yang rata-rata mempunyai kedalaman 33 km, dengan intervalitas antara 4,2 sampai 5,5.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegempaan, telah banyak kali dipengaruhi oleh karakteristik tanah dan lereng lereng, di samping karakteristik permukaan (*geomorfologi*) yang dihasilkan oleh erosi, gerakan longgaman (*mass slide*) untuk memperkirakan terjadinya gempa bumi di wilayah Sawahlunto secara umum didasarkan Atas Pola Seismik gempa-gempa yang berifat merusak di Indonesia menunjukkan proses wilayah Omblin atau Sawahlunto berada pada zona 3 dan 4 dengan besaran intensitas berisar antara 0,13 - 0,13 g. Dimana alam geologi merupakan peristiwa alam dimana proses terjadinya merupakan bagian dari dinamika bumi (*the earth*) karena secara langsung yaitu berupa pergerakan

peralatan/lainse maupun gembelum, sedangkan yang tidak langsung berupa produk tanah, lingkungan.

## 2.1.4. DEMOGRAFI

Dengan luas wilayah Kota Sawahlunto sekitar 275,45 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk kota Sawahlunto tahun 2018 adalah sebanyak 229,10 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sungai dengan 312,43 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian diikuti dengan Kecamatan Lambel Besar sebesar 232,59 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Sungai sebesar 204,40 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Teluk merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 190,26 jiwa/km<sup>2</sup>. Berikut perbandingan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2011 sampai tahun 2018:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2011-2018

No	Kecamatan	Status	Tahun				
			2011	2013	2014	2016	2018
1	Teluk	Jumlah penduduk	17.948	18.143	18.109	18.881	19.870
		- laki-laki	9.017	9.117	9.267	9.403	9.554
		- Perempuan	8.931	9.026	8.841	9.478	10.316
		Luas wilayah	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38
		Kepadatan	192,25	193,24	193,81	202,34	212,79
2	Sungai	Jumlah penduduk	17.114	17.323	17.061	17.418	18.220
		- laki-laki	8.537	8.747	8.713	8.893	9.071
		- Perempuan	8.577	8.576	8.348	8.525	9.149
		Luas wilayah	84,23	84,23	84,23	84,23	84,23
		Kepadatan	203,32	205,64	202,57	206,84	216,31
3	Lambel Besar	Jumlah penduduk	13.139	13.111	13.298	12.314	12.290
		- laki-laki	6.874	6.849	6.911	6.836	6.818
		- Perempuan	6.264	6.262	6.387	5.478	5.472
		Luas wilayah	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58
		Kepadatan	251,80	250,24	252,91	236,29	233,74
4	Sungai	Jumlah penduduk	10.298	10.331	10.208	10.703	10.947
		- laki-laki	5.139	5.213	5.112	5.461	5.496
		- Perempuan	5.159	5.118	5.095	5.242	5.451
		Luas wilayah	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33
		Kepadatan	204,73	205,27	202,82	212,62	217,52
5	Sungai	Jumlah penduduk	17.367	18.068	18.572	19.608	20.128

No	Kecamatan	Mudat	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
3	2	3	4	5	6	7	8
	Sesukhuntu	- Laki-laki	29.936	28.734	29.305	29.580	29.871
		- Perempuan	29.000	28.513	28.780	28.838	28.833
		- Laki-laki	273.43	273,55	273,47	273,47	273,48
		- Perempuan	211,52	211,35	211,45	211,39	211,10

Sumber : BPS Kota Sesukhuntu tahun 2013

Berdasarkan data diatas kemendertungan setiap kecamatan mengalami peningkatan kepadatan penduduk setiap tahunnya dengan kepadatan yang relatif masih sangat rendah. Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah kota yang memiliki luasan relatif besar, maka angka kepadatan akan meningkat karena hanya 39,3% wilayah yang memiliki kepadatan dibawah 25%. Kota Sesukhuntu pada tahun 2013 memiliki penduduk laki-laki 29.871 orang dan wanita 28.833 orang dengan sex ratio (SR) 48,51%, berarti jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada laki-laki.

## 2.2. ASPEK KEREJANTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1. FOKUS KEREJANTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

#### 1. Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum yang tertangani

Kasus pelanggaran hukum yang terjadi berpengaruh pada angka kriminalitas suatu daerah. Tingginya jumlah kasus pelanggaran hukum maka akan tinggi pula angka kriminalitas di daerah tersebut. Tingginya angka kriminalitas ini berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah, karena jaminan keamanan daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keinginan dan minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Perkembangan kasus pelanggaran hukum di Kota Sesukhuntu dari tahun 2011 -2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum dari Tahun 2011-2015

No	Jumlah kasus pelanggaran Hukum	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Jumlah perkara dilaporkan	1881	1888	1888	1888	1870
2.	Jumlah perkara selesai	74	34	74	67	8
3.	Jumlah perkara tidak selesai	1337	1552	1856	1853	1879

Sumber: Pengadilan Sesukhuntu tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2015 jumlah perkara yang dilaporkan mengalami turun naik setiap tahunnya, peningkatan terjadi pada tahun 2013 yang sebanyak 1.888 kasus yang dilaporkan, hal dikarenakan pada tahun 2013 merupakan masa transisi jabatan kepala daerah dan berlangsungnya proses pemilihan kepala daerah di Kota Sesukhuntu. Kasus perkara ini berpengaruh terhadap



masyarakat sehingga jumlah pekerja yang digunakan seperti pabrik, perikanan, dan lain-lain terus meningkat terutama pelanggan baru bisnis.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terjadi peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di daerah tersebut. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada satu tahun menggambarkan bahwa pada tahun tersebut pembangunan ekonomi tumbuh dan berkembang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, menurunnya laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perlambatan pembangunan ekonomi pada tahun tersebut dibanding tahun sebelumnya. Dalam rangkaian penghitungan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan PDRB.

Tabel 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 (Persentase)

URUTAN	Tahun	Kota Sawahlunto	Provinsi Sumatera Barat
Pertumbuhan Ekonomi	2011	5,45	5,34
	2012	5,63	6,21
	2013	6,11	6,02
	2014	6,01	5,85
	2015	6,00	5,41

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto

Tabel 5 diatas terakhir perekonomian Kota Sawahlunto menunjukkan pertumbuhan yang cukup mengemirakan, karena Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto berada diatas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2011 perekonomian Kota Sawahlunto tumbuh sebesar 5,45 persen, terus mengalami peningkatan menjadi 6,63 persen pada tahun 2012, dan sebesar 6,11 persen pada tahun 2013. Meski pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami perlambatan menjadi 6,01 dan 6,00 persen. Ini dikarenakan perekonomian global mengalami perlambatan.

## 3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengukur tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup daerah, paling tidak sebagai acuan mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik bruto dan jasa. Nilai tambah yang dihasilkan

dijelaskan oleh pemerintah Kota Sawahlunto sebagai akibat adanya kesulitan produksi menurut harga berlaku, menunjukkan trend yang positif.

**Tabel 2.6 PDRB Perkapita ADHS Kota Sawahlunto dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2018 (Juta Rupiah)**

URUTAN	TAHUN	KOTA SAWAHLUNTO	PROVINSI SUMATERA BARAT
PDRB Perkapita	2011	32,71	24,54
	2012	35,94	26,20
	2013	39,2	28,29
	2014	43,66	32,13
	2015	45,27	34,41

Sumber Data : BPS/SSDA Kota Sawahlunto

Berdasarkan pertumbuhannya maka dasar harga berlaku tahun dasar 2010) PDRB per kapita penduduk Kota Sawahlunto dalam setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dari sebesar Rp. 32.910.000,- pada tahun 2011 menjadi Rp.42.660.000,- pada tahun 2014. Dengan pertambahan laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2015 akan mencapai 6,20 persen dari total PDRB diperluas akan mencapai Rp. 3.885.730,76 (dalam jutaan), maka PDRB perkapita penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2015 akan mencapai sebesar Rp.45.270.000/tahun.

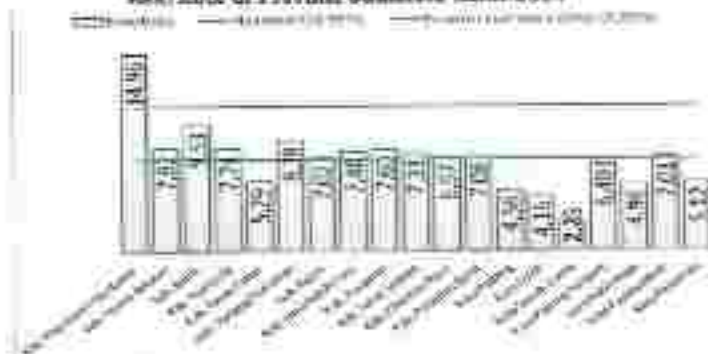
PDRB Perkapita Kota Sawahlunto Tahun 2015 adalah sebesar Rp.45.270.000,-. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 34.413.000,- pada tahun 2015. Angka ini menjadi indikator bahwa pemerintah Kota Sawahlunto secara rata-rata relatif lebih baik tingkat kehidupannya dibandingkan dengan rata-rata masyarakat Sumatera Barat.

#### **4. Angka Kemiskinan**

##### **Persentase Penduduk Miskin**

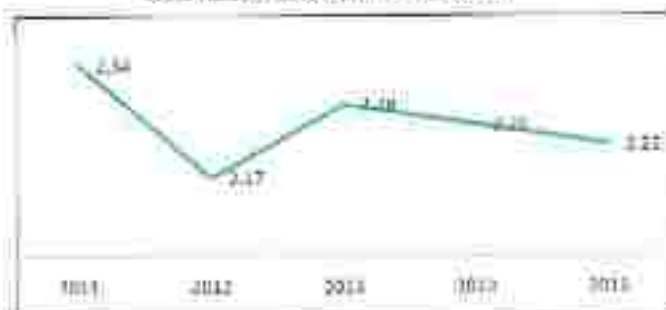
Semakin rendahnya persentase penduduk miskin menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2015 sebesar 22,11%, maka tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto sangat rendah dengan sebesar 2%-3%.

**Grafik 2.1 Porsi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%)  
Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2014**



Sementara itu untuk persentase persentase penduduk miskin di Kota Sawahlunto dalam kurun 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 2.2 Tingkat Kemiskinan  
Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**



Aspek kebijakan penganggulangan kemiskinan adalah penggunaan mis data tunggal hasil pemutakhiran basis data tunggal (PSDT) 2013 yang proses pemutakhiran yang dilakukan sesuai pemerintah terdapat dari kawasan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pemutakhiran basis data tunggal kemiskinan dapat fokus untuk bergerak bersama-sama dalam menganggarkan kemiskinan dengan data yang diperoleh di tingkat kota.

Metode awal angka kemiskinan di Kota Sawahlunto, angka ini terlihat sudah diabaikan karena tidak mungkin maka wilayah kota menurunkan angka kemiskinan dibawah 2 %, hal ini terkait dengan penduduk miskin yang tidak produktif seperti miskin lama, orang tua dan sebagainya.

Disamping itu juga akan digunakan pendekatan Pengarusutamaan Pembangunan Kemiskinan (PPK) dalam proses perencanaan program/kegiatan. Beberapa program/kegiatan yang berpotensi menjadi solusi rumah Tangga Miskin akan diidentifikasi dan secara kuantitatif

ditentukan terapan alfabet) dari materi program/kegiatan tersebut yang memiliki esensi individu atau Murni Tanpa Susunan Pecahan Murni (RTS-PM) Pembelajaran Komunitas.

#### 5. Indeks Pembangunan Manusia

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dari perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur bagaimana penduduk dapat mengubah hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Untuk menilai baik keseimbangan atau keterbelakangan manusia maka sebenarnya penambahan penduduk secara kuantitas harus diikuti oleh pembangunan dari sisi kualitas SDM itu sendiri. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Sumber tenaga kerja, Metodologi IPM tidak mengalami perubahan, alihnya adalah:

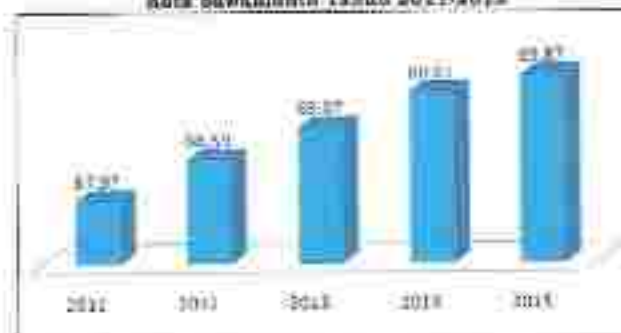
1. Indikator indikator telah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Pertama, angka indeks huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Selain itu, karena angka indeks huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan masyarakat dengan baik. Kedua, PDI per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
2. Penggunaan rumus rata-rata aritmatika dalam penghitungan IPM mengakibatkan bahwa capaian yang rendah di mana dimasa dapat diulangi oleh capaian tinggi dan dimasa lain. Metode ogresen diubah dari rata-rata aritmatika menjadi rata-rata geometrik.

Kemudian IPM metode baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik eliminasi. Dengan memasukkan dua-dua lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih akurat dalam pendidikan dan kesehatan yang tepat. PNB menggunakan PDI karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menghitung IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat diulangi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Perkembangan Angka IPM bisa dibandingkan dengan Menggunakan IPM Metode Baru dapat dilihat sebagai berikut:



**Grafik 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**



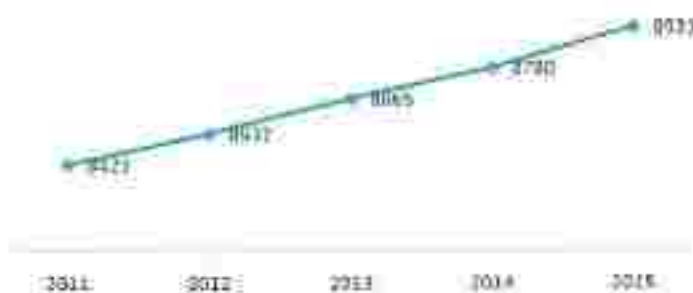
Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Dari grafik diatas, dari tahun 2011 - 2015, sebuah variabel pokok penduduk IPM di Sawahlunto mengalami kemajuan yang menggunkannya semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Sawahlunto. Angka IPM Sawahlunto terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 angka IPM Sawahlunto adalah 67.97 meningkat menjadi 68.59 pada Tahun 2012, selanjutnya pada Tahun 2013 naik menjadi 68.87 pada Tahun 2013 dan 69.51 di Tahun 2014. Pada tahun 2015 IPM Kota Sawahlunto mengalami kenaikan cukup kecil dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya 69.87. IPM Sawahlunto termasuk kategori sedang karena berada dalam rentang 60 - 70.

#### 4. Indeks Daya Beli

Indeks daya beli diukur dari jumlah pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan, dan selama periode 2010-2014 selalu mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari grafik berikut:

**Grafik 2.4 Daya Beli Masyarakat Kota Sawahlunto  
Tahun 2011-2015**



Sumber : BPS 2015

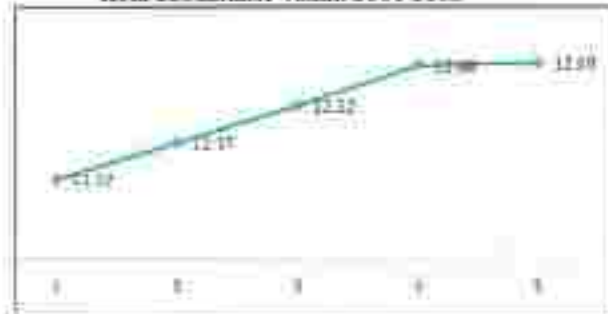
Meskipun terjadi peningkatan indeks daya beli setiap tahun namun jika dibandingkan dengan peningkatan PDRB perkapita maka indeks daya beli ini masih sangat kecil.

## 2.2.3 POHUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

### 1. Angka Harapan Lama Sekolah

Perhitungan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Sawahlunto dari tahun 2011 sampai 2018 seperti terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.5 Angka Harapan Lama Sekolah  
Kota Sawahlunto Tahun 2011-2018



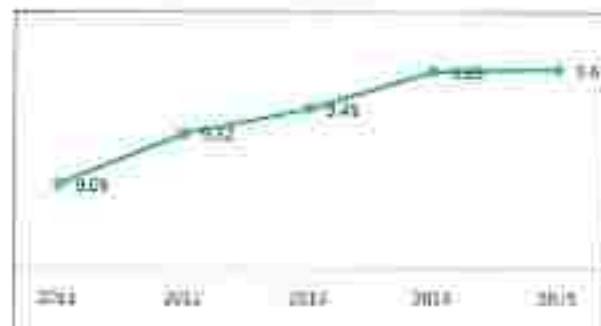
Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

(Dilihat dari grafik angka harapan lama sekolah dari tahun 2011-2018 mengalami peningkatan, tahun 2018 menjadi 12.69, walaupun rata-rata keseluruhannya relatif masih kecil).

### 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Usia 15 tahun keatas dalam menerima pendidikan formal yang mengindikasikan waktu tinggalnya penduduk yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto tahun 2011 telah mencapai 5.60.

Grafik 2.6 Rata-rata Lama Sekolah  
Kota Sawahlunto Tahun 2011-2018



Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2019

### 3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan berapapun waktunya, terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan kompetensi bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Jika Angka Partisipasi Kasar (APK) pada suatu jenjang pendidikan tertentu melebihi 100% berarti bahwa jumlah seluruh siswa yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu melebihi jumlah penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, demikian juga sebaliknya jika APK kurang dari 100%.

Jumlah siswa yang tidak sama dengan jumlah penduduk berada sesuai dengan jenjang pendidikan ini dapat disebabkan oleh adanya siswa yang berasal kurang dari yang seharusnya atau yang berusia melebihi yang seharusnya serta pengaruh penduduk yang bersekolah di luar daerah dan siswa yang berasal dari luar daerah, serta adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.

Tabel 3.7 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Tahun	SD/MI/ Paket A [%]	SMK/MTs/ Paket B [%]	SMA/SMK/MA/ Paket C [%]
1.	2011	98,52	100,42	75,26
2.	2012	109,56	98,11	66,33
3.	2013	107,09	91,48	68,77
4.	2014	119,98	89,13	79,76
5.	2015	110,79	86,46	95,25

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Disisi lain tabel di atas pada tahun 2015 APK jenjang pendidikan SD sederajat sudah melampaui 100%, yang berarti jumlah siswa SD sederajat melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun; sedangkan APK SMK sederajat sebesar 86,46% dan SMA sederajat yang hanya 95,25% menunjukkan bahwa jumlah siswa SMK sederajat dan jumlah siswa SMA sederajat lebih kecil dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

### 4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Dari tahun 2011 sampai 2015 Angka Partisipasi Murni dari tiap jenjang pendidikan mengalami naik turun tiap tahunnya. Pada tahun 2012 s/d 2015 terjadi kenaikan pada semua jenjang pendidikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

No	Tahun	SD/MI/ Paket A (%)	SMP/MTs/ Paket B (%)	SMA/SMK/MA/ Paket C (%)
1.	2011	89,02	68,53	54,43
2.	2012	97,22	59,77	55,06
3.	2013	92,52	68,16	75,07
4.	2014	100	65,65	76,43
5.	2015	98,39	76,43	82,47

Sumber: DPA Kota Sawahlunto

### 5. Jumlah Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum berusia 5941 tahun.

**Grafik 2.7 Jumlah Angka Kematian Bayi Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**



Sumber: DPA Kota Sawahlunto

Dilihat dari grafik diatas jumlah kematian bayi di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Asfiksia (terlambat mendapatkan pertolongan) serta kelahiran yang telah lewat bulan/terminasi, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang disebabkan asupan gizi ibu kurang pada waktu hamil/ibu hamil merokok. Ibu yang tidak memeriksakan kehamilannya pada petugas kesehatan dan Penyakit ketuban jantung, kelainan kongenital dan asupan susu.

**Grafik 2.8 Jumlah Kasus Kematian Bayi Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**



Sumber : Data (Makan Bayi) Kota



#### A. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortality menurut umur. Angka ini menunjukkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir.

Grafik 2.9 Angka Harapan Hidup  
Kota Sawahlunto pada Tahun 2011-2015



Sumber : BPS 2015

Angka usia harapan hidup masyarakat Kota Sawahlunto sejak tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan.

#### 2.3.3 FOKUS ADAT, SENI, BUDAYA DAN OLAH RAGA

Pembangunan seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan lingkungan yaitu: (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat diukur berdasarkan indikator sebagai berikut:

##### 1. Kebudayaan

Seni dan budaya memang mempunyai peranan penting dalam pembangunan di Kota Sawahlunto, karena ini telah di kenal sebagai salah satu Kota Seni Budaya dan Desa ini berkembang masyarakat yang heterogen dan bahkan multikultural. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain ketersediaan wilayah dan komposisi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kota Sawahlunto. Kesenian akan pertanya peran seni dan budaya memang dalam pembangunan manusia dihalangi masyarakat. Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambora dan Budaya.

Pembangunan di bidang seni dan budaya sudah mengalami kemajuan dengan ditandainya peningkatan terhadap pemahaman kearifan lokal

budaya, peningkatan toleransi dan peningkatan kualitas penyelesaian masalah tanpa adanya kekerasan serta mulai berkembangnya toleransi budaya.

Pembangunan kebudayaan di Kota Pekanbaru ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mengintegrasikan jejari diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negara budaya global. Tantangan pembangunan di bidang kepemudaan adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Sedangkan untuk budaya sejatinya ditandai dengan adanya beberapa nagar budaya yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2.9 Nagar Budaya di Kawasan Kota Lama

NO	NAMA BANGUNAN	ALAMAT	KLANTIRAN
1	Restoran Rambu Pagar PT. Jati	Kel. Satingan	A
2	Musik Bungkai Bungkai	Kel. Satingan	B
3	Musik Bungkai Bungkai	Kel. Satingan	C
4	Kantor Pabrik Sawahmudi	Kel. Satingan	D
5	Kantor Pabrik	Kel. Satingan	E
6	Rumah Orang Pabrik	Kel. Pagar	F
7	Rumah Orang Bungkai	Kel. Pagar	G
8	Rumah Orang	Kel. Pagar	H
9	Rumah Orang	Kel. Pagar	I
10	Rumah Orang	Kel. Pagar	J
11	Rumah Orang	Kel. Pagar	K
12	Rumah Orang	Kel. Pagar	L
13	Rumah Orang	Kel. Pagar	M
14	Rumah Orang	Kel. Pagar	N
15	Rumah Orang	Kel. Pagar	O
16	Rumah Orang	Kel. Pagar	P
17	Rumah Orang	Kel. Pagar	Q
18	Rumah Orang	Kel. Pagar	R
19	Rumah Orang	Kel. Pagar	S
20	Rumah Orang	Kel. Pagar	T
21	Rumah Orang	Kel. Pagar	U
22	Rumah Orang	Kel. Pagar	V
23	Rumah Orang	Kel. Pagar	W
24	Rumah Orang	Kel. Pagar	X
25	Rumah Orang	Kel. Pagar	Y
26	Rumah Orang	Kel. Pagar	Z
27	Rumah Orang	Kel. Pagar	AA
28	Rumah Orang	Kel. Pagar	AB
29	Rumah Orang	Kel. Pagar	AC
30	Rumah Orang	Kel. Pagar	AD
31	Rumah Orang	Kel. Pagar	AE
32	Rumah Orang	Kel. Pagar	AF
33	Rumah Orang	Kel. Pagar	AG
34	Rumah Orang	Kel. Pagar	AH
35	Rumah Orang	Kel. Pagar	AI
36	Rumah Orang	Kel. Pagar	AJ

NO	NAMA BERGUDANG	ALAMAT	KLASIFIKASI
37	Rumort Sutan Pili/ Gedung 100 Jember	KR. Luthung Panjang	B
38	Meranti Rural Trade	Kel. Ductan I	B
39	Rumahan Daga	Desa Siliwang	C
40	P.T. Sutan	Desa Siliwang	C
41	Manajemen Jember Kulak	Desa Siliwang	B
42	Pelabuhan Tiga Bontol	Desa Siliwang	C
43	Rumahan Tahanan Siliwang	Siliwangi Tapan	C
44	Tugu Peringatan Siliwang	Siliwangi Tapan	C
45	Rumahan Hutan Siliwang	Desa Siliwang	C
46	Rumahan Ayer Kulak	Desa Siliwang	B
47	Rumahan Ks Siliwang	Siliwangi Tapan	B
48	Rumahan Siliwang Tapan	Desa Siliwang	B
49	Rumahan Hutan	Kel. Air Kaya	B
50	Rumahan Ks Kota Sawahlunto	Kel. Pagar	B
51	Rumahan Majors Delanta	Kel. Luthung Panjang	B
52	Rumahan Majors Hutan	Desa Siliwang	B
53	Rumahan Majors Hutan	Desa Siliwang	B
54	Rumahan Hutan W-28	Kel. Siliwang	C
55	Rumahan Hutan W-29	Kel. Siliwang	C
56	Rumahan Hutan W-28	Kel. Siliwang	C
57	Rumahan Hutan W-29	Kel. Siliwang	C
58	Rumahan Hutan A	Kel. Siliwang	B
59	Rumahan Hutan Bontol	Kel. Siliwang	B
60	Rumahan Hutan	Kel. Siliwang	B
61	Rumahan Hutan	Kel. Siliwang	B
62	Rumahan Hutan	Kel. Siliwang	B
63	Rumahan Hutan Ks Kalahan/Kalahan	Desa Siliwang	A
64	Rumahan/ Rumahan Siliwang	Kel. Siliwang	B
65	Rumahan Ks Siliwang	Siliwangi Tapan	C
66	Rumahan Siliwang Siliwang	Siliwangi Tapan	B
67	Rumahan Ks Siliwang	Desa Siliwang	B
68	Rumahan Siliwang Siliwang	Kel. Luthung Panjang	B

Perkembangan seni dan budaya Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.10 Perkembangan Seni dan Budaya di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2018

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah grup kesenian	25	25	25	25	25
2.	Jumlah Gedung kesenian	10	10	10	10	10

Sumber : Profil Kota Sawahlunto 2018

Pemerintah kota sawahlunto telah melakukan berbagai upaya untuk pengembangan nilai budaya dan pengelolaan kegiatan budaya melalui :

a. Pejajaran berjenis I

1. Musabir Syarif Sawahlunto
2. Organ Tunggal
3. Salawat Diding
4. Cempur Sari Tambora Ari
5. Timorco Band
6. Paguyuban Wi Sapa Jagad
7. Samudra Diding Gajah Mawang dan KAP
8. Musabir Kuali Sawahlunto
9. Salawat Diding dan Grup Kuali
10. Grup Mandel Mawang Selja dan Kabir
11. Gajah Malindas, mutara mawang, kua kuali
12. cempur sari jumbo maw, selawat gajah mawang, komunitas kuali
13. Keroncong OK Lajang
14. Sanggar permaisuri hitam, keroncong OK Lajang
15. Dini NITALL, Salawat diding berjangkalla
16. Salawat diding kuali sunami, Rabab karing berwa silungkang
17. ITM, Komunitas KUALI
18. Sanggar permaisuri hitam
19. Keroncong Lajangma
20. Ronggah permaisuri hitam
21. Rabab karing taruna silungkang, jumbo band
22. Langitakusma
23. Komunitas KUALI
24. KIM
25. Grup Kompartisi Padang Panjang
26. Kuda Kepang Harapan Jaya
27. Sanggar Permaisuri Hitam
28. Mandel SDN 10 Taratak Harau
29. Salawat Timor Harapan, Komunitas Kuali
30. KIM
31. Kuda Kepang Harapan Jaya, Gembus Al Salawat
32. Kuda Kepang Malindaswada, Timorco band, Sanggar Gajah Malindas
33. Rabab Karang Taruna Silungkang
34. Kuda Kepang Saja Jagad, Kuda Mawang Bico Sura
35. Mandel dan Salawat
36. Teater Kuali
37. Iai Padang Panjang
38. Salawat Diding dan Organ
39. Band Kuali
40. Band Piliw, Rabab Silungkang, Salawat Diding Mutara Mawang
41. Gembus Puskas Sawahlunto
42. Paguyuban Bajak
43. Band Timorco Junior
44. Fasilal Waring
45. Grup Busandra Jaya
46. Salawat Diding Intan Rahat, Ringgo Musik
47. Gembus Puskas Sawahlunto
48. Ringgo Musik
49. Kuda Kepang Sapa Jagad, Salawat Diding Gajah Maw, Gajah Saurina  
Karlama, Karlama/K. Khawati, Timor Harapan Taratak Harau
50. Kelompok Permaisuri Padang Panjang Kreatif
51. Band Kuali Kota Sawahlunto
52. Teater Kuali Kota Sawahlunto
53. Band Kuali Kota Sawahlunto dan Mak Lajal



3. Pagelaran di luar daerah berupa pertandingan lomba :

NO	ACARA	PESTASI	TEMPAT
1	Jatikan Karer Tugies Pringai	Kota Serang Perahu	RS. Rara, Tegal, Peking, Pangeran
2	Salon Budaya Klatenewi (SPLAT)	G & S Entertainment	Hotel Agas Salim, Padang
3	Musikalisasi Father Wren	Katun Uda Uda Kota BKK	Architecture Cakraman, Sumbur
4	Pameran Budaya - Remas Banting	AMUK 2015	Auditorium Cakraman, Banting
5	Festival Science Dukung	Selwer Uduang Gajah Mada	Taman Budaya, Aruna, Sumbur
6	Forum Budaya Yogyakarta	Suter Uda Uda Kota Sawahlunto	Yogyakarta
7	Pesta Budaya Tabuk Pangasinan	Kelurahan Hutan, Kuch	Kota Pangasinan
8	Festival Musik Seni Tradisi	Tunas Cakraman (M Banting)	Taman Budaya, Pangeran Banting
9	Pengantar seni / ke Performance	Sejajar Cakraman, Banting	Pringai, Janda
10	World V ARTS	Desain Klaten Cakraman	Duga, Klaten, Peking, Padang
11	Imajinal	Sungai Cakraman, Banting	Jakarta Convention, Cakraman
12	Festival Klaten	Kota Serang Perahu	Pangeran, Janda, Cakraman, Banting

Grup kesenian juga masih sama antara lain 35 grup kesenian dan 10 gedung kesenian.

## 2. Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan aktivitas hidup manusia dan masyarakat Kota Serang. Itu, kesediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Perkembangan minat dalam bidang olahraga di Kota Sawahlunto cukup tinggi, hal ini di buktikan dengan pesona Kota Sawahlunto di event-event daerah, provinsi dan nasional. Fokus pembinaan olahraga dilakukan pada olahraga yang sering dipertandingkan, baik pada kelompok masyarakat maupun pelajar. Olahraga di masyarakat diwujudkan dalam bentuk klub-klub olahraga. Kedua sarana dan prasarana terus ditingkatkan. Dalam pembinaan, selain dengan memanfaatkan gedung olahraga yang ada, masyarakat juga melakukan aktivitas olahraga di luar gedung seperti jalan sehat, bersepeda, renang bersama dan lain-lain sebagainya. Tantangan pembangunan di bidang olahraga adalah perlunya pemfungsian keolahragaan yang komprehensif dan berkesinambungan agar seluruh potensi olahraga dapat dikembangkan secara baik, pengisian peran dan tanggung jawab masyarakat beserta pemerintah pembangunan.

Perkembangan klub dan gedung olahraga dari Tahun 2010 s/d 2014 dilihat pada tabel 2.11

Tabel 2.11 Perkembangan Klub dan Gedung Olahraga di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Jumlah Klub Olahraga per Kecamatan	61	67	67	57	70

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Jumlah Gedung Olahraga per 75 klub baseball	11	11	11	11	11

Sumber : Data Profil Kota Sawahlunto 2015

Dibuat dari tabel diatas ternyata jumlah klub olahraga pada tahun 2011 bertambah dibandingkan tahun sebelumnya dari 67 klub menjadi 70 klub, sedangkan untuk gedung olahraga yang ada di Kota Sawahlunto masih sama dari tahun 2011-2015 yaitu 11 gedung olahraga. Perubahan jumlah klub olahraga ini karena hanya klub yang benar-benar memiliki pengurusan yang aktif yang dilaporkan, sedangkan yang tidak aktif tidak lagi dilaporkan.

#### 3.2.4 FOKUS PENGAMALAN AJARAN AGAMA

Penduduk Kota Sawahlunto memiliki keberagaman millenial dengan beberapa agama yang diakui, dan pembangunan di sektor agama didukung untuk menciptakan kondisi terbaik dalam pengamalan nilai-nilai agama dilindungi serta adanya dukungan sosial yaitu keluarga dan nilai-nilai silsilah dari pemerintahan lingkungan. Komposit penduduk menurut agama yang diartinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Menurut Agama  
di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Agama	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Islam	55.817	57.775	58.644	59.228	61.849
2.	Kristen	152	153	118	121	127
3.	Protestan	152	157	214	190	137
4.	Hindu	-	-	-	-	-
5.	Buddha	-	-	-	-	-
6.	Sekular	-	-	-	-	-
	TOTAL	57.808	58.066	58.972	59.508	62.113

Sumber : Data Profil Kota Sawahlunto Tahun 2015

Penduduk agama Islam dari tahun 2011 sebanyak 55.817 orang, setelah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 menjadi 61.849 orang. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan secara alami penduduk yang mayoritas Islam. Pengaruh agama Katolik dan Protestan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2015 menjadi 127 dan 137 di tahun 2015.

##### 1. Jumlah Pengaruh Agama dan Mubaligh

Salah aspek pendidikan agama, peranan mubaligh dan pengaruh agama sangat berpengaruh terhadap pengamalan ajaran agama bagi masyarakat, di mana perkembangan jumlah mubaligh dan pengaruh agama dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.13  
Jumlah Mubaligh dan Pengaruh Agama  
di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Agama	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Mubaligh	141	141	132	162	152
2.	Jumlah Pengaruh Agama	101	101	107	108	104

Sumber : Data Profil Kota Sawahlunto 2015

Jumlah mubaligh secara mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tahun 2015 menjadi 162 mubaligh. Jumlah pengaruh agama

mengalami perubahan sering tahunnya dari tahun tahun 2012 tetap sebanyak 103 orang, namun pada tahun 2013 meningkat menjadi 107 orang dari tahun menjadi 104 orang di tahun 2015.

## 2. Jumlah Tempat Ibadah

Agama mayoritas penduduk Kota Sawahlunto adalah Agama Islam, agama lain yang diakui sebagai penduduk Kota Sawahlunto adalah Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Persebaran agama kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan pengalaman ajaran agama oleh penguasanya, serta nilai-nilai yang dipegang dari kehidupan secara luas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.14  
Jumlah Tempat Ibadah Di Kota Sawahlunto  
Tahun 2011 – 2015

No	Tempat Ibadah	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Masjid	40	45	45	48	48
2.	Kristen / Langgar	305	305	210	242	242
3.	Latihan	2	2	2	2	2

Sumber: Data Profil Kota Sawahlunto 2015

Office (dari jumlah tempat ibadah di Kota Sawahlunto, untuk agama yang mayoritas yaitu Islam, masjid meningkat 2 dari tahun 2011 menjadi 48 di tahun 2013 demikian juga musalla/langgar yang sempat sebanyak di tahun 2014 sebanyak 242 dan tidak berubah/wajar di tahun 2015, demikian juga tidak mengalami perubahan.

## 3. Tempat Pendidikan Agama

Agama Islam mempunyai tempat pendidikan agama Islam untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri, di Kota Sawahlunto ada beberapa tempat pendidikan agama sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15 Jumlah Tempat Pendidikan Agama Islam  
di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Tempat Pendidikan Agama	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	TPQ	158	172	177	177	177
2.	TPSQ	9	9	9	9	9
3.	MUA	15	15	15	15	15
4.	Pondok Tamu Al- Qur'an	4	4	4	4	4
5.	Pondok Pesantren	2	2	2	2	2

Sumber: Data Profil Kota Sawahlunto Tahun 2015

Taman Pendidikan Quran (TPQ) dari tahun 2011 yang jumlahnya hanya 158 meningkat menjadi 177 sampai tahun 2015, hanya saja MUA di Kota Sawahlunto mengalami pengurangan menjadi 13 MUA.

## 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

### 2.3.1 PELAYANAN URUSAN WAJIB

#### 1. Urusan Wajib Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki korektur dan budi pekerti.

#### a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah ini menggambarkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan (di perguruan dan pendidikan formal lainnya) penduduk usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS anak usia 7-12 tahun adalah persentase anak usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah ditinjau SD dan MI serta yang telah bersekolah di SLTP dan MTs dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun diadikikan 100 persen. Persentase dan letakkan nilai APS sangat dipengaruhi oleh besarnya jumlah murid usia sekolah. Pada tabel berikut dapat dilihat, Peningkatan APS Kota Rawaldumio berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2011-2015:

**Tabel 2.16 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Rawaldumio Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Kelompok Usia		
		7 - 12 tahun	12 - 15 tahun	16 - 18 tahun
1	2011	99,98	84,52	77,11
2	2012	99,82	85,04	78,54
3	2013	99,80	84,07	88,00
4	2014	100,00	94,98	87,40
5	2015	100	90	88,88

Sumber: BPS Tahun 2015

Dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Rawaldumio dari tahun 2011 - 2015, secara umum telah mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2015 meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada umur 7 - 12 tahun sudah mencapai 100% artinya penduduk usia 7-12 tahun semuanya sudah berada di sekolah, dan pada usia 12-15 tahun sudah mencapai 90% di tahun 2015, sedangkan usia 16-18 tahun baru mencapai 88,88% artinya ada 11,11% penduduk usia 16-18 tahun tidak berada di jenjang pendidikan formal.

#### b. Rasio Keterbatasan Sekolah/Penduduk usia sekolah

Rasio Keterbatasan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini menggambarkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

**Tabel 2.17 Rasio Keterbatasan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Rawaldumio Tahun 2011-2015**

No	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Sekolah	55	63	68	68	68
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12	7197	7140	7047	7040	7128
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12	1:130,85	1:113,18	1:103,65	1:103,38	1:103,81
2	SLTP/MTs					
2.1	Jumlah Sekolah	13	24	14	14	14



NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
2.1	Jumlah Peserta Didik Kelas 12-13	3103	3160	3420	3780	3809
2.2	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Peserta Didik Kelas 12-13	1:247,29	1:237,36	1:145	1:204,57	1:246,27
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Sekolah	6	6	6	10	6
3.2	Jumlah Peserta Didik Kelas 10-12	2936	2790	2491	3480	3403
3.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Peserta Didik Kelas 10-12	1:277,3	1:306,5	1:247,28	1:248,50	1:560,74

Sumber : Profil Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa tahun 2015 masih kekurangan sekolah pada tingkat SD, SMP dan SMA mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan pertumbuhan penduduk kelompok usia yang disertai dengan peningkatan jumlah sekolah.

#### c. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan keterediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai suatu pencapaian.

Tabel 2.18 Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	TK					
1.1	Jumlah Guru	209	199	142	101	180
1.2	Jumlah Murid	1201	1293	1299	1688	1837
1.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:5,71	1:6,51	1:9,15	1:16,68	1:10,21
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Guru	637	731	681	672	611
2.2	Jumlah Murid	7604	7831	7601	7886	7676
2.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:12,2	1:10,72	1:11,16	1:11,73	1:12,56
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Guru	374	285	276	241	220
3.2	Jumlah Murid	2317	2045	2024	2790	2460
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:6,2	1:7,17	1:7,33	1:11,58	1:11,18
4	SMA/SMK/MA					
4.1	Jumlah Guru	263	242	287	264	201
4.2	Jumlah Murid	2511	1388	2014	2489	2403
4.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:9,55	1:5,73	1:7,01	1:9,43	1:11,95

Sumber : Profil Kota Sawahlunto Tahun 2015

Selama tahun tahun 2011 – 2015 masih kekurangan guru di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan untuk setiap jenjang pendidikan. Pada

tahun 2013 kondisi ketersediaan guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan TK adalah untuk 1 guru melayani 8,06 murid TK, untuk jenjang SD/MI 1 guru melayani 11,01 murid SD/MI, untuk SMP 1 guru melayani 7,09 murid SMP/MTs, untuk SMU 1 guru melayani 8,64 murid SMU).

#### d. Rasio Murid Dan Kelas

Rasio Murid dan kelas sangat penting untuk menentukan ketersediaan kelas terhadap murid yang ada. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan rasio murid terhadap kelas di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.19 Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto Tahun 2011-2018

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	<b>TK</b>					
1.1	Jumlah Murid	1241	1281	1220	1580	1500
1.2	Jumlah Kelas	38	67	73	72	204
1.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	17,38 : 1	18,37 : 1	17,33 : 1	21,74 : 1	114,77
2.	<b>SD/MI</b>					
2.1	Jumlah Murid	7666	7861	7664	7880	7730
2.2	Jumlah Kelas	417	429	382	363	376
2.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	18,38 : 1	18,38 : 1	21,14 : 1	20,36 : 1	118,71
3.	<b>SMP/MTs</b>					
3.1	Jumlah Murid	2017	2040	3534	3790	3463
3.2	Jumlah Kelas	196	90	113	116	421
3.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	22,89 : 1	22,72 : 1	25,87 : 1	24,47 : 1	1:20,19
4.	<b>SMU/SMP/MA</b>					
4.1	Jumlah Murid	2511	2636	2614	2035	2662
4.2	Jumlah Kelas	89	168	98	111	203
4.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	28,11 : 1	24,76 : 1	27,81 : 1	22,94 : 1	129,20

Sumber : Diklat Kota Sawahlunto Tahun 2019

Dilihat dari tabel diatas dari tahun 2011 sampai 2015 Kota Sawahlunto mengalami peningkatan jumlah murid disamping jenjang pendidikannya tahun 2015, pada jenjang pendidikan TK 1 kelas mempunyai 14,77 murid, SD 1 kelas dengan 18,71 murid, SMP 1 kelas dengan 22,10 murid, SMU 1 kelas dengan 23,20.

#### e. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak memperhatikan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digambarkan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan bidang pendidikan.

Tabel 2.20 Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2011-2018

No	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	<b>SD/MI</b>					
1.1	Jumlah Putus Sekolah	18	8	8	0	0
1.2	Jumlah Siswa	7.218	7.668	7.653	7.601	7.686

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.2	Angka Putus Sekolah PA	0,240	0,104	0,011	0	0
<b>2 SMP/MTs</b>						
2.1	Jumlah Putus Sekolah	37	40	47	4	33
2.2	Jumlah Siswa	2.017	2.260	2.017	2.854	3.790
2.3	Angka Putus Sekolah PA	0,018	0,018	0,023	0,014	0,009
<b>3 SMA/MA/SMK</b>						
3.1	Jumlah Putus Sekolah	0	14	15	16	40
3.2	Jumlah Siswa	2.480	2.301	2.320	2.614	2.988
3.3	Angka Putus Sekolah PA	0	0,006	0,007	0,006	0,013

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang

Angka putus sd/mt angka putus sekolah mengalami penurunan dari tahun 2011-2015 dan tingkat sma/ma juga mengalami penurunan untuk tahun 2015. Ini dapat disebabkan sudah beberapa usapannya akan pentingnya pendidikan, seperti sma/ma/ smk angka putus sekolah nya dari tahun sebelumnya, ini bisa disebabkan karena beberapa yang memilih bekerja menjadi sekolah dan mereka masuk dengan pendidikan yang sudah ada dan tingginya biaya pendidikan sehingga siswa mampu untuk melanjutkan pendidikan.

#### Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun menunjukkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemandirian dalam menyelesaikan seluruh belajar. Angka kelulusan siswa berbagai jenjang pendidikan di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11 Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Semarang Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1. SD</b>						
	Putus Ujian	564	1012	1076	1073	1008
	Lulus Ujian	267	1012	1076	1078	1088
	Persewaan PA	100	100	100	100	100
<b>2. MI</b>						
	Putus Ujian	40	40	51	50	41
	Lulus Ujian	49	49	51	58	57
	Persewaan PA	100	100	100	100	100
<b>3. SMP</b>						
	Putus Ujian	334	308	253	290	280
	Lulus Ujian	166	373	243	240	279
	Persewaan PA	95,8	94,07	95,93	96,77	94,80
<b>4. MTs</b>						
	Putus Ujian	113	115	91	81	121
	Lulus Ujian	104	111	91	81	113
	Persewaan PA	91,20	95,26	100	100	99,99
<b>5. SMA</b>						
	Putus Ujian	340	279	278	270	272
	Lulus Ujian	339	279	270	270	271
	Persewaan PA	96,33	100	100	100	99,80
<b>6. MA</b>						
	Putus Ujian	45	47	35	38	90
	Lulus Ujian	44	43	35	35	200

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
	Perawatan Fis	103	91,43	100	100	100
7.	<b>SMK</b>					
	Unit Listrik	300	300	400	400	30
	Ledak Listrik	50	30	400	400	60
	Perawatan Fis	100	60	100	99,77	100

Sumber: Profil Kota Sawahlunto Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2011 sampai 2015 tingkat SM/MT di Kota Sawahlunto seluruhnya siswa sudah mencapai 100%. Tingkat SLTP kelulusan siswa tahun 2015 naik dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 99,90% untuk tingkat SMP sedangkan untuk tingkat MTs mengalami penurunan sebesar 93,00. Tingkat SLTA kelulusan siswa untuk SMA mengalami penurunan menjadi 94,90% sedangkan untuk MA 3 tahun terakhir terus mencapai kelulusan sebesar 100% dan untuk SMK mengalami kenaikan kelulusan dari tahun sebelumnya mencapai 100%. Secara umum kelulusan siswa di setiap jenjang pendidikan di Kota Sawahlunto setiap tahun sudah mencapai 100%, hanya saja tingkat SMP perlu menjadi perhatian karena angkanya tidak pernah mencapai 100% dalam kurun waktu 2011-2015, tetapi untuk tahun 2015 sudah sempat naik karena telah mencapai 99,72%.

## 2. Urusan Wajib Kesehatan

### a. Rumah Sakit

Rumah Sakit Sawahlunto merupakan rumah sakit tipe C yang mempunyai tenaga dokter spesialis yang tugas utamanya 9 orang, yaitu: kedokteran, penyakit dalam, bedah umum, jiwa, patologi klinik, anak, kulit dan kelamin serta anestesi, sedangkan tenaga meliputi dokter spesialis umum/isi spesialis telinga hidung dan tenggorokan, Dokter umum 8 orang serta dokter gigi 7 orang diperlukan oleh tenaga paramedis 124 orang, tenaga perawat 84 orang dan tenaga administrasi 50 orang.

### b. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk bersama masyarakat, dalam rangka pemertumbuhan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.22 Jumlah Posyandu dan Balita  
Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Posyandu	97	98	99	100	100
2.	Jumlah Balita	6.360	6.969	6.969	6.147	6.239
3.	Rasio Posyandu/ jumlah balita	1 : 65,49	1 : 71,41	1 : 70,06	1 : 62,06	1 : 62,19

Sumber : Profil Kota Sawahlunto Tahun 2015

Jumlah posyandu pada tahun 2011 - 2015 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah balita. Dilihat dari rasio posyandu dan balita mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan 2012 yaitu 1 : 65,49, ini berarti bahwa setiap posyandu pada tahun 2011 dan 2012 rata-rata melayani 61 sampai 62 balita. Pada tahun 2013 rasio posyandu



terhadap rumah 1 : 60,91, ini berarti bahwa rata-rata setiap pelayanan yang ada pada tahun 2015 dapat melayani sebanyak 60 sampai 61 bedah.

**c. Rasio Puskesmas, Praktik Dokter dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan Penduduk**

Puskesmas, Praktik Dokter dan Pustu merupakan salah satu penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, semakin banyak jumlah konsesidennya, maka semakin meningkat masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.28 Rasio Puskesmas, Praktik Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto Tahun 2011-2018**

No	Praktik	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Puskesmas	5	6	6	6	6
2.	Jumlah Praktik Dokter	13	16	28	30	29
3.	Jumlah Pustu	35	38	42	38	38
	Jumlah Total Puskesmas, Praktik Dokter dan Pustu	44	60	66	58	69
4.	Jumlah penduduk	57.567	59.064	66.571	68.608	65.235
	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1 : 8.595	1 : 9.878	1 : 9.502	1 : 9.015	1 : 10.534
	Rasio Praktik Dokter persatuan penduduk	1 : 4.428	1 : 3.692	1 : 2.378	1 : 2.286	1 : 2.249
	Rasio Pustu persatuan penduduk	1 : 1.645	1 : 1.554	1 : 1.585	1 : 1.805	1 : 1.716
	Rasio Puskesmas, Praktik Dokter dan Pustu persatuan penduduk	1 : 1.308	1 : 1.299	1 : 1.038	1 : 1.008	1 : 1.041
5.	Jumlah Kecamatan	3	3	3	3	3
6.	Jumlah Desa/Kelurahan	27	27	30	30	30

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto, 2018

Rasio Puskesmas, Praktik Dokter dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Sawahlunto pada tahun 2015 mencapai 1 : 1.000,40, ini artinya bahwa 1 puskesmas/praktik dokter/pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 1.001 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kesehatan mencapai 3 : 2, ini artinya bahwa dalam dua kecamatan terdapat 3 unit puskesmas.

Jumlah penduduk yang harus dilayani Puskesmas/Praktik Dokter/Pustu tahun 2015 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, karena sebelumnya jumlah praktik dokter pada tahun 2014 setiap satu Puskesmas/Praktik Dokter/Pustu harus melayani 844 penduduk, pada tahun 2015 harus melayani 813 penduduk, tahun 2016 harus melayani 836 penduduk dan untuk tahun 2018 harus melayani 1.308 penduduk. Berkurangnya praktik dokter tidak terlepas dari semakin meningkatnya kualitas dan fasilitas pelayanan yang ada pada Puskesmas/Pustu serta RSU dan bertambahnya jumlah penduduk yang membuat jumlah puskesmas/kesehatan.



## 2. Kondisi Jalan Pekerjaan Umum dan Pematang Ruang

Aspek pelayanan umum terkait dengan bidang Pekerjaan Umum terdiri dari Survei Pematangan Kota dan Infrastruktur Kehumatan, Kespemukiran dan Sumber Daya Air seperti uraian berikut :

### a. Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang baik, memiliki ketercapaian yang sangat luas dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sebaliknya kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal masyarakat dalam membangun kota perkotaannya, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa keterbatasan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai panjang jaringan jalan Kota Sawahlunto berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2011-2015:

**Tabel 2.34 Kondisi dan Panjang Jalan Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

NO	URAIAN	TAMBAH				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kondisi Baik ( Km )	288,40	291,27	306,13	307,82	324,18
2	Kondisi Sedang ( Km )	88,19	88,62	94,88	88,89	84,96
3	Kondisi Rusak Sedang ( Km )	34,66	32,44	33,53	38,05	32,38
4	Kondisi Rusak Berat ( Km )	27,79	26,75	26,73	19,03	13,00
5	Jalan total semua kondisi ( Km )	439,04	440,10	461,27	443,79	454,52
6	Proporsi Kondisi Baik (%)	65,82	66,15	66,33	69,19	71,33
7	Proporsi Kondisi Rusak Sedang (%)	20,53	20,17	21,17	20,03	18,70
8	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	7,87	7,88	7,80	6,82	6,97
9	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	6,31	6,08	6,08	6,58	5,51

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2016

Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jenis kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kota Sawahlunto pada tahun 2012 mencapai 66,15% pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 71,33%, demikian halnya dengan proporsi kondisi jalan rusak berat mengalami penurunan yaitu dari 6,08% pada tahun 2012 menjadi 5,51% pada tahun 2015.

### b. Jembatan

Jembatan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam memperlancar sistem transportasi. Di Kota Sawahlunto terdapat 41 buah jembatan sepanjang tahun 2015 yang tersebar di empat kecamatan dengan total panjang 740 M. Berikut jumlah dan sebaran jembatan tahun 2014 – 2015 sebagai berikut:



No.	Nama Sungai	Lokasi Wilayah Sungai	Kapasitas (liter)	Pengal Manfaat
1	2	3	4	5
11.	Sungai Kemene	Desa Mambang, Kecamatan Tumpang	10.1.000	irigasi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015

Untuk meningkatkan daya rusak air pada sungai tersebut terutama yang memiliki di kawasan permukiman dan lahan pertanian sawah, perlu dibangun bangunan penahan untuk berupa batu betonjong. Selain pemasangan batu atau bangkai panjang yang berfungsi sebagai tirap untuk menahan gerakan air dan menahan tebing agar tidak longsor. Pada tahun 2017 akan dilakukan normalisasi saluran sungai sepanjang 3,5 KM yaitu pada sungai-sungai Batang Lohar, Anak Sungai Rumbia, Kiri Jemberan Sekel II, Sungai Karuh-Ambocang, Kiri-kiri Wincang-Katmhar-Lohok Kibang-Cama Isp, Batang Bompahan, Batang Pasar Telawa, dan Belahang Kantor Camat Talam. Jembatan Batu Sungai Kolok, Sungai Sumpang Telenguang, Delat BMA/DI, Teguh Nambur, Pasir Usang Sibangkang dan Air Dingin.

#### 4. Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur sumber daya air yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi padi adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, penggunaan, pembagian, pemertan dan penggunaannya. Perkembangan jaringan irigasi selama 2011-2015 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.27 Jaringan Irigasi  
Kota Bengkulu Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Daerah Irigasi (DI)	87	87	87	87	87
2	Luas Potensi (ha)	1.772	1.772	1.772	1.704	1.696
3	Luas Dikeruk (ha)	1.772	1.772	1.772	1.704	1.696
a.	1/2 Dikeruk	134	130,88	800	990	150
b.	2/3 Dikeruk	230	377,56	140	47	27
c.	Kur 1/2	40	27	27	27	27
d.	Tidak Dikeruk	960	990	941	940	940
4	Panjang Saluran (km)	88,05	10,30	75,30	74,20	35,30

Sumber : BPD Tahun 2015

Jumlah Daerah Irigasi (DI) dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tidak ada peningkatan yaitu sebanyak 87 DI, dengan luas potensi seluas 1.772 ha Tahun 2011 berkurang menjadi 1.696 ha Tahun 2015. Hal ini disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan seperti Linto Mart, Linto Timur, Kibang Tengah, Toko Gunung, Bulak Indah, Kiri Nee Tia, Telawi Muli, Telawi Mili, Bulak Gudang dan Kumbayau. Daerah irigasi yang telah menggunakan sistem pengaliran 1/2 seluas pada tahun 2011 seluas 134 ha meningkat pada tahun 2015 menjadi 150 ha, sistem pengaliran sederhana pada tahun 2011 seluas 230 ha menurun pada tahun 2015 menjadi 27 ha, sistem pengaliran Non - PU pada tahun 2011 bertambah menjadi seluas 27 ha, sistem pengaliran tidak terukur pada tahun 2011 seluas 960 ha menurun pada tahun 2015 menjadi seluas 940 ha dengan total panjang saluran irigasi sepanjang 35,3 km. Peningkatan kualitas bangunan irigasi tersebut disebabkan dengan bertambahnya bantuan subsidi anggaran DAK irigasi setiap tahun.





Untuk meningkatkan produksi hasil pertanian terutama padi perlu dirombaklah sistem yang potensial dalam upaya peningkatan kualitas produksi air hasil pertanian pada Daerah Irigasi tidak hanya sekedar mampu mengairi lahan pertanian secara langsung. Sistem yang dikembangkan diwujudkan antara lain berupa pembangunan bangunan penampung air (embung) seluruh lereng dan Talang. Sedangkan pada Daerah Irigasi yang potensial perlu diberikan pemeliharaan Benam Pemakai Air dan pemeliharaan pembangunan saluran pertanian sampai ke daerah hulu dan peninggitan saluran utama lainnya. Berikut jumlah embung yang dibangun sampai tahun 2012.

**Tabel 3.28 Jumlah Pembangunan Embung  
Kota Sawahlunto sampai Tahun 2012**

No	Nama Embung	Kapasitas (m <sup>3</sup> )	Lokasi	Proyek
1.	Embung Buntaroh	1.200	Daerah Utara Kuala	As Wihara dan Irigasi
2.	Embung Sungai Dua	1.500	Perbukit Buntaroh	Irigan
3.	Embung Lurah Laga	1.000	Sungai Dua	Irigan
4.	Embung Lading Lurah	500	Talang Damar	Irigan
5.	Embung Kumpang	700	Talang Damar	Irigan
6.	Embung Kanda Pindang	700	Talang Damar	Irigan
7.	Embung Pangal	500	Sungai Kula	Irigan
8.	Embung Tera Kandangan	500	Sungai Kula	Irigan
9.	Embung Duta	500	Seah	Irigan
10.	Embung Kiri Alam	500	Talang Kiri	Irigan
11.	Embung Sekel Jera	500	Kuala Gedang	Irigan
12.	Embung Mitan Buntar	500	Talang Kiri	Irigan
13.	Embung Lurah Kandangan	500	Talang Kiri	Irigan
14.	Embung Pakatan	1.000	Talang Kiri	Irigan
15.	Embung Wangi Luru	500	Talang Kiri	Irigan
16.	Embung Kapan Kiri	500	Talang Kiri	Irigan
17.	Embung Mandir	1.200	Batu Tumpang	Irigan

Sumber: Dinas PUP & Sirtanah, 2012

Untuk meningkatkan jasa sewa irigasi dalam mencapai target produksi pangan pada tahun 2017 akan dibangun saluran irigasi baru sepanjang 3.030 M pada 15 titik lokasi daerah irigasi, disamping akan merobah sepanjang 535 M saluran irigasi yang rusak akibat bencana alam dan lainnya.

#### **A. Dams**

Dams yang dikenal di Kota Sawahlunto terbentuk akibat aktivitas tambang terbuka berupa ekskavasi dan kemudian secara alamiah terakumulasi air resapan dan limpahan air hujan. Potensi dams ini kemudian dimanfaatkan sebagai objek wisata air. Sementara terbentuk dan telah ada lagi kegiatan penanaman di kawasan tersebut, pengelolaan saluran bejana galat tambang tersebut menjadi objek wisata. Baru pada tahun 2005 lahan kawasan Kandi atau 363 Ha tersebut diserahkan oleh PT SA LPO kepada pemerintah Daerah yang selanjutnya dikelola sebagai objek wisata. Berikut ini data luas dams dan pemanfaatannya:

Tabel 2.29 Luas Danau dan Pemenuhannya

No	Nama Danau	Luas (Ha)	Pemenuhan
1.	Kendit	8,15	Objek Wisata, Perikanan
2.	Tandayeh	2,50	Wisata Air
3.	Tanah Hitam	3,00	Wisata Air
4.	Danau Biru	6,0	Wisata Air

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Sawahlunto, 2008

Sampai saat ini, pengelolaan danau tersebut terpecah menjadi kewenangan beberapa Dinas/Partisipasi, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan dan Kehutanan. Untuk pengelolaan yang lebih terarah masing-masing kawasan tersebut perlu dibentuk pemerintahan Master Plan Kawasan danau terutama Danau Kendit dan Danau Tandayeh.

#### f. Sanitasi

Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi dasar berhasil dicapai dengan adanya bantuan program yang telah digulirkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut tabel persentase proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Dasar di Kota Sawahlunto tahun 2011-2015 :

Tabel 2.30 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Dasar Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga	14.309	14.643	15.173	15.266	15.406
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Dasar	9.801	10.258	11.889	11.871	11.903
3	Persentase (%)	67,87	70,05	72,10	72,10	73,30

Sumber : Bureaus Kota Sawahlunto

Persentase proporsi Rumah Tangga dengan akses sanitasi Dasar terus mengalami peningkatan yaitu 67,87 % (2011), dan 73,30 % (2015). Dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar (sanitasi keluarga) berdampak terhadap meningkatnya jumlah Desa / Kelurahan yang telah dinyatakan sebagai Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free/GRS (Stop buang Air Besar Sembarangan) yang semula 19 Desa/Kelurahan 2012, menjadi 22 desa/kelurahan 2015.

#### g. Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Sebagai Kota kecil di Sumatera Barat, Pemerintah Kota Sawahlunto berkewajiban menyediakan Tempat Pemakaman Umum bagi masyarakatnya. Hal ini, diwujudkan dengan adanya wisata tanah liat di desa/desa yang menyediakan Ponds Pemakaman Umum bagi masyarakat, utamanya meninggalan sewaktu pemerintah daerah dalam menyediakan Tempat Pemakaman Umum tersebut. Begitu juga dengan menyediakan lahan bekas tambang untuk pemakaman umum masyarakat perkotaan dan diberikan izin untuk masyarakat ketupatan Berhikm menyediakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Sawahlunto kondisi Tahun 2015 :

Tabel 2.31 Ketersediaan TPU Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan TPU (dalam/mi)	7/2,8	7/2,8	7/2,8	7/2,8	7/2,8
2	Daya Tampung	1.100	1.100	2.750	2.750	2.750

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
	Kebutuhan TPU					
3	Ketersediaan TPU (kuburn/m <sup>3</sup> )	2.738	2.780	2.740	2.700	2.760
4	Kebutuhan TPU (kuburn/m <sup>3</sup> )	5.124	6.057	5.338	5.360	5.380
5	Ketersediaan TPU yang harus ditambah (kuburn/m <sup>3</sup> )	2.386	3.277	2.598	2.660	2.620

Sumber: Data Profil Daerah Kabupaten

Jumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Sawahlunto sebanyak 7 lokasi dengan total luas 2,5 ha. Ketersediaan TPU untuk Kota Sawahlunto di Tahun 2012 adalah sebanyak 2.780 kuburn/ha, sementara yang tersedia baru 2.750 kuburn/ha. Untuk memenuhi kebutuhan TPU harus tersedia sebanyak 5.330 kuburn/ha. Disamping itu masing-masing lokasi dalam pelayanan pemakaman juga juga memiliki tempat pemakaman sendiri (kebutuhan keluarga) yang mayoritas bersebelahan dan tersebar di permukiman penduduk. Begitu juga dengan adanya TMP di Kubang Batak, Talawi dan Sanggaring serta TPU khusus warga Tionghoa di Pondok Kaper.

### 3. Kebakaran

Berbagai kebakaran di Kota Sawahlunto termasuk yang sering terjadi. Keberadaan rumah penduduk yang tidak begitu rapat juga mempermudah terjadinya penyebaran kebakaran pemukiman kebakaran. Hal ini berdampak positif dengan pelayanan prima terkait pemadamkan kebakaran kepada masyarakat. Berikut data pemadaman kebakaran di Kota Sawahlunto dua tahun terakhir :

Tabel 2.33 Pemangguhungan Berbagai Kebakaran Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Mobil Pemadam kebakaran jenis	2	4	4	4	4
	Kebakaran Mobil Pemadam (unit)	6	8	6	8	8
2	Jumlah Titik Pemadam	0	0	0	0	0
	Ketersediaan Titik Pemadam (unit)	100	100	100	100	100
3	Jumlah Gase Pemadam	36	17	33	47	28
4	Persediaan kerugian jiwa	438.568	413.853	550.900	1.825.800	798.800

Sumber: Profil Kota Sawahlunto Tahun 2012

Klasifikasi kebakaran rumah sebagian besar disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik, oleh karena itu instalasi listrik rumah tangga setiap 5 (lima) tahun harus diganti. Jumlah sarana pemadam kebakaran masih kurang 2 unit pemadam kebakaran dimana pada tahun 2012 tersedia 4 unit mobil pemadam kebakaran (3 unit mobil besar dan 1 unit mobil kecil) dimana mobil kecil untuk melayani kawasan gang-jumukmur yang sempit. Selain itu sangat dibutuhkan hidran umum (bak reservoir kapasitas 50 M<sup>3</sup>) sebagai cadangan air yang sewaktu-waktu siap dipompa jika terjadi bencana kebakaran di Kota Sawahlunto, dan tugas tugas barisan lainnya ke luar daerah.

### 1. Rasio Panjang Jalan per Luas Wilayah

Rasio panjang jalan dengan luas wilayah diperoleh dengan membagi panjang jalan (km) dengan luas wilayah daerah terluas km<sup>2</sup>. Nilai rasio ini memiliki arti panjang jalan yang terdapat di suatu daerah dalam 1 km<sup>2</sup> luas wilayah. Rasio ini juga dapat dijadikan sebagai informasi tingkat aksesibilitas suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio panjang jalan dengan luas wilayah, maka aksesibilitasnya semakin baik, sehingga ketersediaan jalan di daerah tersebut juga semakin baik dilihat dari ketersediaan jaringan jalannya. Berikut data panjang jalan di Kota Sawahlunto dengan dibandingkan luas wilayah antara Tahun 2011-2015 sebagai berikut.

Tabel 3.33 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah  
Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jalan Utama (km)	30,23	30,69	30,66	30,90	31,32
2	Jalan Perantara (km)	-	4,63	4,60	4,60	50,88
3	Jalan Strategis Perantara (km)	-	-	-	3,40	-
4	Jalan Lokal (km)	440,29	440,23	440,29	440,39	450,72
5	Total Panjang Jalan (km)	470,52	475,55	475,55	475,69	482,92
6	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	273,45	273,45	273,45	273,48	273,48
	Rasio	1,74	1,74	1,74	1,74	1,82

Sumber : Banteng Data Dinas Appia Tahun 2015

Di tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 rasio panjang jalan terhadap luas wilayah adalah 1 km<sup>2</sup> tersedia jalan sepanjang 1,74 km, dimana tidak terjadi penambahan ruas jalan hingga ada pengalihan sebagian ruas utama jalan menjadi jalan provinsi. Untuk tahun 2014 ada penambahan ruas jalan strategis provinsi sehingga rasio panjang jalan terhadap luas wilayah meningkat 1,77, dimana setiap 1 km<sup>2</sup> tersedia jalan sepanjang 1,77 km. Pada tahun 2015 dilakukan penambahan ruas jalan provinsi dan jalan lokal sehingga rasio panjang jalan terhadap luas wilayah meningkat menjadi 1,82 dimana setiap 1 km<sup>2</sup> tersedia jalan sepanjang 1,82 km.

### Penataan Ruang

RTRW Kota Sawahlunto menghasilkan suatu wujud kesepedanan, keterkaitan dan kesinambungan antar sektor yang ada di dalam ruang pada aspek arsitektur (GTO). Kota tersebut ini dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam penataan wilayah kota maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, dimana RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032 (revisi) akan dijadikan pedoman untuk pedoman untuk pemanfaatan (dan pengendalian) pemanfaatan ruang.

Kondisi Kota Sawahlunto terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

#### a. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Peraturan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang tidak akan tumbuhan dan tanaman guna mendukung kesehatan ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Ketersediaan luas RTH kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota (total) dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 sepuluh persen



ruang terbuka hijau privat, sehingga soal kebutuhan RTH adalah 8.203 ha meliputi RTH privat 2.704 ha, dan RTH publik sebesar 5.499 ha. Perkembangan RTH kota Sawahlunto sejak 2011-2015 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.34 Rasio RTH per satuan luas di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.571	2.945	3.502	3.949	4.256
2	Luas Wilayah Kota	27.348	27.543	27.343	27.343	27.348
3	Persentase RTH	9,40	10,77	12,80	14,44	15,52

Sumber: Bappeda Kota Sawahlunto

Ketersediaan RTH di Kota Sawahlunto dari tahun 2011 yaitu 2.571 ha atau sebesar 9,40% terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi sebesar 4.256 ha atau sebesar 15,52% dari luas kota, sehingga Kota Sawahlunto masih membutuhkan tambahan RTH minimal sebesar 14,18% dari luas wilayah kota yang harus dipenuhi dari berbagai program dan sumber pendanaan untuk memenuhinya sehingga target dapat tercapai sesuai arahan Undang-Undang.

#### b. Rasio Bangunan yang Memiliki IMB

Setiap orang/badan usaha di Kota Sawahlunto yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperbaiki, menambah, merenovasi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan pembangunan rumah di Kota sehingga kawasan perumahan memiliki keteraturan bangunan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Perkembangan rumah dan bangunan yang memiliki IMB dari tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.35 Rasio Bangunan ber IMB Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Bangunan	12.090	13.177	13.777	14.214	14.570
2	Jumlah Bangunan ber-IMB	5.314	5.804	6.041	6.088	6.150
3	Rasio	0,44	0,45	0,44	0,43	0,42

Sumber: BPR Kota Sawahlunto

Pada tahun 2011 jumlah bangunan yang memiliki IMB sebanyak 5.314 unit dari 12.090 unit bangunan yang ada dengan rasio bangunan ber IMB mencapai 0,44 sedangkan pada tahun 2015 jumlah bangunan yang telah memiliki IMB sebanyak 6.150 unit dari 14.570 unit rumah/bangunan dengan rasio 0,42. Hal ini memperhatikan bahwa jumlah bangunan di Kota Sawahlunto yang memiliki IMB relatif masih rendah, sehingga perhatian lingkungan perumahan kawasan perumahan belum tertata sebagaimana mestinya.

### 4. Urutan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan

#### a. Perumahan Luas Perumahan Yang Tertata

Perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perumahan maupun perkebunan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan rumah dan tempat bekerja yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu permasalahan perumahan yang dihadapi Pemerintah Kota Sawahlunto terkait dengan pemukiman permukiman adalah penanganannya kawasan kumuh yang pada tahun 2011 terdapat 6 rumah Desa/Kel kumuh dengan total luas 16,10 Ha. Berdasarkan indikator tingkat keberkumuhan yaitu kepadatan bangunan, luas bangunan, dan keterediaan prasarana sarana dan utilitas, maka pada tahun 2015 terdapat 13 (tiga) Desa/Kel kumuh dengan total luas kawasan kumuh adalah 43,58 Ha. Dalam rangka RPJMD Kementerian PU-PPRA, pada tahun 2019 harus mencapai Universal Access 100% air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak. Berikut data persentase permukiman layak dan luas kawasan kumuh 2011-2015.

**Tabel 2.36 Persentase Luas Perumahan yang Layak Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

No	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas area perumahan layak (Ha)	1.134	1.134	1.241	1.553	1.720
2	Total luas area perumahan (Ha)	2.063	2.086	2.156	2.240	2.280
3	Persentase Luas Perumahan yang Layak (%)	55,00	54,31	57,56	69,33	75,44
4	Jumlah Desa/Kel. Rumah Tidak Layak	6	6	6	6	13
5	Luas kawasan kumuh (Ha)	16,10	28,50	16,10	19,37	43,58

Sumber : BPS, Laporan RPJMD PU-PPRA tahun 2015

### B. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Salah upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan ketermudaan perumahan layak dan sehat menjadi kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan rumah layak huni, sehat dan terjangkau.

**Tabel 2.37 Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah rumah tidak layak huni (unit)	1.004	1.879	1.702	1.534	1.438
2	Jumlah rumah tangga (RT)	13.080	14.090	15.653	16.433	16.040
3	Persentase rumah tidak layak huni	7,67	13,34	10,90	9,34	8,97

Sumber : BPS, Laporan RPJMD PU-PPRA tahun 2015

Pada tahun 2011 jumlah rumah tidak layak huni mencapai 1.004 unit dan berkurang menjadi 1.438 unit rumah pada tahun 2015. Penurunan rumah tidak layak huni ini ditangan dari berbagai program dalam bentuk rehabilitasi dan bantuan biaya rehab rumah tidak layak huni dari Kementerian PU-PPRA, Kemendagri dan Pemerintah Daerah sendiri, saat ini rumah tidak layak huni 1.438 unit rumah tidak layak huni yang umumnya rumah keluarga miskin di pedesaan yang harus diatasi sampai dengan tahun 2018.

### C. Urutan Wajib Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan bangsa yang harus dijun dan dilestarikan, sehingga sebagai salah satu aset bangsa yang memiliki nilai

nilai sejarah yang. Sebagai kota yang telah lama sejak zaman Belanda, Sawahluntra memiliki banyak benda cagar budaya yang perlu dilindungi dengan baik dan dijaga sebagai salah satu keunggulan kota yang dimiliki.

Berikut ini dapat dilihat tabel secara persentase seni dan budaya dan benda cagar budaya yang dilestarikan sebagai berikut :

**Tabel 3.38 Perkembangan Sarana Seni dan Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2011-2018**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah sarana Persekolahan (Kantor Dik.)	9	9	9	9	9
2.	Jumlah Persekolahan (SD, SMP, SMA)	3	3	2	2	2
3.	Jumlah Benda, Seni dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	23	23	23	68	58
4.	Jumlah Total Benda, Seni dan Kawasan Cagar Budaya Dilestarikan	74	74	74	74	74
5.	Persentase senia (seni Cagar Budaya, Seni dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%))	11,88%	11,88%	11,88%	11,89%	11,89%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Perpustakaan

Sampai tahun 2018 sebanyak 11,89 % benda situs dan kawasan cagar budaya telah dilindungi dan dilestarikan dengan sangat baik, karena itu dalam rangka pelestarian budaya salah satu langkah yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah restitusi kawasan cagar budaya. Dalam konteks pelestarian budaya, Pemerintah kota juga telah mendirikan Benda Cagar Budaya (BCB) seperti bangunan tua dengan arsitektur Eropa, peninggalan Belanda yang dirahibilitasi dengan mempertahankan kondisi bentangnya dan diarsir sebagai objek wisata.

#### **E. Upaya Wajar Tenaga Kerja**

Dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satu indikator yang sering digunakan adalah jumlah penduduk yang bekerja, karena angka tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan yang layak serta stabilitas ekonomi. Untuk itu diperlukan pemeliharaan ketenagakerjaan dengan tujuan sebagai berikut :

- Memperdayakan dan membekali tenaga kerja secara optimal dan maksimal.
- Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penciptaan tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Persentase penduduk Kota Sawahluntra usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha secara rinci mulai tahun 2010 sampai tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.30**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kota Sawahlunto**  
**yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014**

NO	LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian	15,37	12,50	10,55	11,08	11,67
2	Perdagangan & Perakatan	5,40	13,30	11,85	1,71	11,10
3	Manufaktur/Industri	10,11	4,40	6,82	4,56	3,02
4	Miner, Gas & Air Panas	2,41	1,30	2,92	1,28	1,29
5	Bangunan	6,33	6,70	2,50	5,00	4,01
6	Pengangkutan, Hotel & Restoran	15,84	21,10	22,00	23,89	21,28
7	Pengangkutan & Komunikasi	6,34	5,20	4,28	1,70	4,74
8	Kesehatan, Pendidikan & Jasa Perusahaan	1,83	2,10	2,21	4,73	2,75
9	Dinas, Jasa Keuangan, dan Jasa lainnya	24,03	25,40	23,00	21,37	21,33
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

Kemunduran Kota Sawahlunto dilihat dari aspek ketenagakerjaan menunjukkan bahwa memang tahun 2010 - 2014 terjadi kenaikan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang signifikan di Kota Sawahlunto yang bekerja pada lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran dengan lapangan usaha jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan. Namun rata-rata kenaikan pada lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 sekitar 1,61 persen, walaupun di tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk lapangan kerja dari sektor jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mulai mengalami peningkatan di Tahun 2010 sampai tahun 2014 rata-rata setiap tahunnya naik sebesar 0,37 persen, walaupun di tahun 2011 dan 2013 mengalami penurunan. Ini dikarenakan jumlah dari penduduk Kota Sawahlunto bekerja sebagai pegawai negeri maupun swasta. Sektor jasa-jasa ini terdiri dari sub sektor pemerintahan umum/pertahanan dan sub sektor jasa swasta. Untuk sub sektor pemerintahan umum/pertahanan ini mencakup untuk departemen dan non departemen, kementerian dan badan-badan yang berhubungan dengan administrasi pemerintah dan pertahanan sedangkan sub sektor jasa swasta terdiri dari sosial kemasyarakatan, jasa keuangan dan asuransi dan jasa perumahan dan rumah tangga. Untuk tenaga kerja pada lapangan usaha bangunan mengalami penurunan dari di kota tahun terakhir ini, ini disebabkan banyaknya pekerja bangunan yang didatangkan dari luar Kota Sawahlunto karena kemampuan dan keterampilan yang dimiliki tenaga luar lebih baik dari daerah sendiri, untuk itu perlunya pelatihan-pelatihan untuk penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja sehingga mempunyai kemampuan dan keterampilan yang bersaing dengan tenaga kerja luar daerah. Kegiatan pelatihan ini difasilitasi dari program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang ada di Dinas Perindustrian dalam menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan siap dihidangkan.

Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki masa kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Gambaran secara lengkap mengenai penduduk usia 15 Tahun keatas menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2011-2015 sebagai berikut :



Tabel 2.40 Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2011-2015

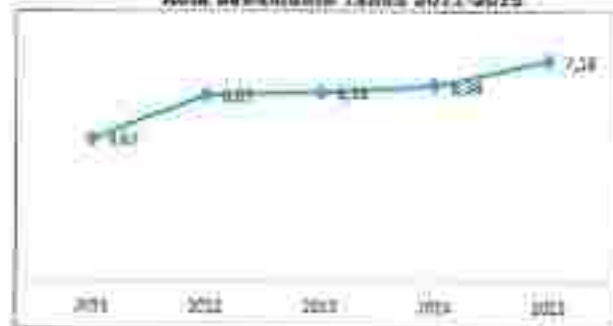
NO	URAIAN	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	<b>ANGKATAN KERJA</b>					
a	Bekerja	61,02	68,39	65,34	61,31	61,81
b	Tidak Bekerja* Pengangguran	3,12	4,42	4,16	4,19	7,10
c	Angkatan kerja b-III	67,37	72,91	67,5	66,91	65,91
d	Rasio angkatan kerja	19,45	21,34	21,54	19,67	
	<b>SIKAS ANGKATAN KERJA</b>					
	Saldo angkatan kerja	22,02	27,22	12,8	24,66	20,09
2	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	67,37	72,77	67,6	66,66	65,91
3	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	4,33	6,01	4,16	6,38	7,18

Sumber : BPS/Kantor Dalam Angka 2014

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang berarti penduduk ini terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. TPAK Kota Sawahlunto dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,30 persen, meskipun di tahun 2014 mengalami peningkatan 15,20 persen dari tahun sebelumnya. Rasio ini khusus untuk penduduk yang bekerja dan mencari kerja terhadap usia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara pencari kerja dengan angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak menyerap pada pasar kerja. Pertumbuhan TPT Kota Sawahlunto dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan 2 persen artinya terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha 2 persen. Tahun 2013 TPT Kota Sawahlunto 7,18 persen artinya dari 100 jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja terdapat 6 orang adalah pengangguran seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.10 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015



Sumber : BPS/Kantor Dalam Angka 2014

Memerannya TPT ini merupakan terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan program peningkatan kesempatan kerja yang ada di Dinas Pertambangan. Berjalannya program ini dapat meningkatkan kualitas dari tenaga kerja. Jumlah sehingga bisa diberikan keterampilan yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil tersebut. Ini terbukti dengan realisasi capaian indikator kinerja program untuk urusan kesetaraan kerja ini dari tahun awal RPJMD sampai tahun 2014 diatas 70 persen.

#### 7. Urusan Wajib Pembudayaan Perempuan dan Perilaku Anak

Gairahan untuk membiasakan diri terkait dengan urusan pembudayaan perempuan dan perilaku anak sejak dini dapat dilihat dari 40 indikator kinerja sebagai berikut:

##### Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan ancaman atau penderitaan bagi secara fisik, seksual, psikologi dan penyalahgunaan didalam kehidupan bermasyarakat. Data tentang Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41 Jumlah KDRT di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2018

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah KDRT	8	2	37	9	28
2.	Jumlah Rumah Tangga	14.021	14.344	14.308	14.578	14.878
3.	Rasio KDRT	2 : 0,0%	1 : 0,0%	1 : 0,1%	1 : 0,0%	1 : 0,0%

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2013

Jumlah kejadian KDRT di Kota Sawahlunto pada tahun 2015 sebanyak 28 kasus KDRT dari jumlah rumah tangga yang ada. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 9 KDRT, namun meningkat tidak dibandingkan tahun 2012 dengan 2 kasus.

#### 8. Urusan Wajib Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terwujudnya pangan bagi rumah tangga yang mencakup dari terdapatnya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal.

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan dengan : (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan; (b) meningkatkan motivasi masyarakat; (c) memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; (d) meningkatkan kemandirian ketahanan pangan.

Ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian dan keberlanjutan pemerintah harus diupayakan dari waktu ke waktu, sebagai prasyarat bagi

keberlanjutan ekonomi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang terus berubah secara dinamis. Dinamika dan kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan serta peluang dan peluang yang terus berkembang yang perlu diantisipasi dan ditangani melalui kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Terdapat dua indikator dalam mengukur aspek ketahanan pangan fokus utama yaitu ketersediaan pangan sebagaimana yang terdapat pada lampiran 1 Permenagri 54/2010 yaitu:

1. Regulasi tentang kebijakan ketahanan pangan di daerah dalam bentuk Perda, Perkada, dan
2. Ketersediaan pangan utama yang diukur dari persentase rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun. Regulasi tentang kebijakan ketahanan pangan daerah dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 10 tahun 2014 tentang Keamanan Pangan. Berdasarkan itu untuk ketersediaan pangan utama dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 2.42 Perkembangan Indikator Uraian Wajib Pangan Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

Padi	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi (tmt/tahun)	11,267	10,192	17,524	10,110	15,571
Konsumsi Dasar (kg)	97,42	98,51	98,51	97,39	91,58
Persediaan (tmt)	7,177,288	10,188,84	11,063,27	9,483,78	11,486,63
Luar Area Pangan (tmt/tahun)	2,891	3,426	3,337	3,104	3,492
Swasufficiency (tmt/tahun)	5,011	6,736	7,699	6,275	7,997

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2016 dan data tidak.

Jika dibandingkan rata-rata konsumsi beras nasional lima tahun terakhir yang dihitung oleh BPS sebesar 95 kg/kapita/tahun dan Prov. Sumbat sebesar 92 kg / kapita / tahun, maka ketersediaan beras di kota Sawahlunto melebihi konsumsi per kapita per tahun. Akan tetapi yang harus diperhatikan dalam ketersediaan beras ini adalah persentase padi baik dalam bentuk GKP maupun GKG keluar kota Sawahlunto untuk diproses dan kemudian dijual lagi ke Sawahlunto dalam bentuk beras. Sehingga yang memiliki nilai tambah dari komoditas ini adalah masyarakat di luar kota Sawahlunto.

**Tabel 2.43 Ketersediaan Daging Sapi**

Daging Sapi	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi (kg)	423,829	466,372	488,372	490,891	441,858
Konsumsi (kg)	19,44	27,23	29,2	15,66	18,11
Ketersediaan daging sapi (kg/kapita/tahun)	7,24	8,07	7,98	7,58	7,25

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2016

Rata-rata konsumsi daging nasional per kapita per tahun dalam lima tahun terakhir sebesar 0,04 Kg / tahun. Sementara itu konsumsi daging

provinsi Sumbawa sebesar 6.5 Kg / Kapita / Tahun, jika rata-rata ketersediaan daging per kapita pertahun di Sumbawa sebesar 7 Kg, maka jumlah ini melebihi dari rata-rata kebutuhan per tahun.

Tabel 2.44 Ketersediaan Ayam Ras Pedaging

Ayam Ras Pedaging	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi (kg)	120,712	2289,162	2,241,894	2,222,820	2,222,820
Ketersediaan Ayam Ras Pedaging (Kg/kapita/tahun)	17.34	31.31	30.34	30.73	30.67

Sumber: BPS Sumbawa Dalam Angka 2015

Rata-rata konsumsi daging ayam nasional dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 4 Kg / Kapita / Tahun. Sedangkan untuk Sumbawa sebesar 6.5 Kg / Kapita / Tahun. Sehingga jika dibandingkan dengan produksi lokal, maka kebutuhan daging ayam kota Sumbawa jauh melebihi dari produksi.

Tabel 2.45 Ketersediaan Telur Ayam Ras

Telur Ayam Ras	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi (kg)	51,385	40,832	34,082	30,388	33,086
Konsumsi (kg)	3.23	4.28	3.81	2.8	2.14
Ketersediaan Telur Ayam Ras (Kg/kapita/tahun)	6.90	4.47	3.08	4.20	6.90

Sumber: BPS Sumbawa Dalam Angka, 2015

Rata-rata ketersediaan telur ayam ras dari produksi lokal di Sumbawa sebesar 6 Kg/kapita/tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi nasional sebesar 4.5 Kg/kapita/tahun dan konsumsi provinsi Sumbawa sebesar 11.6 kg/kapita/tahun, maka ketersediaan telur ayam ras di kota Sumbawa masih jauh dari tingkat kebutuhan masyarakat. Sehingga masih banyak telur ayam ras yang diperoleh dari Kab./kota tetangga seperti Tanah Bumbu dan Lima Puluh Kota. Hal ini adalah peluang bagi peternak ayam ras petelur untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Tabel 2.46 Ketersediaan Ikan Darat

Ikan Darat	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi Ikan (Tn)	112.3	147.96	191.38	134.23	154.83
Ketersediaan Ikan (Kg/kapita/tahun)	1.55	2.56	2.54	2.54	2.40

Rata-rata konsumsi ikan nasional dan provinsi Sumbawa berkisar antara 13-15 Kg / kapita / tahun (termasuk ikan laut dan udang segar). Ketersediaan ikan di kota Sumbawa pada tahun 2-3 Kg / kapita / tahun menunjukkan bahwa kebutuhan ikan di Kota Sumbawa masih mayoritas diperoleh dari luar daerah. Sehingga peluang untuk pengembangan perikanan darat masih terbuka lebar.



## 9. Limbah Gaji Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

### a. Persentase Penanganan Sampah

Sampah adalah waste atau limbah dikenal dengan sebutan limbah padat peristiaan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat perkotaan dan dianggap sebagai barang buangan tidak berguna. Penanganan sampah yang tidak tepat maka akan tidak hanya dapat menimbulkan gangguan kesehatan, tapi juga dapat menimbulkan malapetaka, baik terhadap lingkungan lokal, regional, maupun global, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sampah yang menumpuk akibatnya sumbernya dapat mengundang vektor penyakit, di perjalanan pada saat pengangkutan dapat menimbulkan pencemaran dan banjir, sedangkan di tempat pembuangan akhir dapat menimbulkan ledakan, kebakaran, cek runtuhan, dan pencemaran air.

Salah satu masalah penanganan yang cukup rumit dalam pengelolaannya adalah pengendalian dan pengelolaan kualitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberhasilan TPSA akan dapat mengurangi timbulnya sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalkan bahaya yang mungkin timbul akibat pembuangan sampah tersebut. Perkembangan penanganan sampah yang tertarget dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47 Persentase Penanganan Sampah Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Treks	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata volume sampah saat terangkut di TPA (m <sup>3</sup> /hari)	11,37	15,43	34	28	22
2	Rata-rata volume sampah yang diasilkan (m <sup>3</sup> /hari)	99,00	100,16	21	44	40
3	Persentase penanganan sampah di TPA (%)	15,00	14,98	62,57	63,64	80

Sumber : BKK, 2015

Pada tahun 2011 sampai tahun 2013 rata-rata volume penanganan sampah di TPA sebesar 22 M<sup>3</sup>/hari, pada tahun 2013 meningkat sebesar 32 M<sup>3</sup>/hari dan volume sampah yang dihasilkan meningkat dari 40 M<sup>3</sup> di tahun 2013 menjadi 40 M<sup>3</sup> di tahun 2015. Persentase penanganan sampah di TPA masih berfluktuasi yaitu pada tahun 2015 masih 80% yang dikelola di TPA Kayu Gedang. Masih rendahnya penanganan sampah di TPA Kayu Gedang dikarenakan oleh masih kurangnya truk sampah dan masih ada daerah yang belum dapat dijangkau oleh truk sampah.

### b. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

Sebelum sampah diangkut/diuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Rasio Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.48 Rasio Jumlah TPSS  
di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah TPSS (unit)	346	381	371	332	333
2	Jumlah Daya Tangkap TPSS (m <sup>3</sup> )	106,2	107,7	127,7	48,76	48,70
3	Jumlah Penduduk (mea)	97.221	98.168	98.091	98.608	100.180
4	Rasio Daya Tangkap TPSS dan Jumlah penduduk (m <sup>3</sup> /1000) (mea)	1,0	1,0	1,2	0,47	0,49

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto

Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto tahun 2011 sebanyak 346 unit dengan daya tangkap 106,2 m<sup>3</sup>. di tahun 2015 menurun menjadi 333, artinya untuk setiap 1000 jiwa penduduk TPSS 0,17 unit. Hal ini sudah melebihi kapasitas produksi sampah setiap 1000 jiwa adalah 1,698 m<sup>3</sup> per hari, namun perlu diperhatikan seberapa lokasi TPSS tersebut.

#### **c. Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah**

Pengangkutan sampah yang dihasilkan rumah tangga dan lainnya dari RTD menuju TPA menggunakan truk pengangkut sampah setiap hari. Berikut disajikan data rasio truk pengangkut sampah terhadap jumlah penduduk di Kota Sawahlunto:

**Tabel 2.49 Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah  
Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Truk Pengangkut Sampah (unit)	2	7	7	7	7
2	Jumlah Daya Tangkap Truk (m <sup>3</sup> )	24	38	38	38	38
3	Jumlah Penduduk (mea)	97.221	98.168	98.091	98.608	100.180
4	Rasio Daya Tangkap Truk dan Jumlah penduduk	0,00025	0,00042	0,00047	0,00047	0,00047

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto

Jumlah truk pengangkut sampah yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2010 sebanyak 2 unit berkurang pada tahun 2014 menjadi 7 unit, dengan kapasitas 38 m<sup>3</sup>, sehingga rasio daya tangkap truk terhadap 1000 penduduk tahun 2014 adalah 0,00047 yang berarti kemampuan untuk mengangkut sampah dengan truk hanya sebanyak 470 kg untuk setiap 1000 penduduk. kemampuan daya tangkap ini dirasa sangat kurang karena setiap 1000 penduduk menghasilkan sampah 1,698 kg per hari, dan dibutuhkan tambahan truk sampah sebanyak 4 unit lagi.

#### **10. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Perekartan Sipil**

Guvernan urusan hukum dalam urusan dengan urusan kependudukan dan catatan sipil salah satunya Gapei dilihat dari indikator urus sebagai berikut :

#### a. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk positif jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar wilayah lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam wilayah.

**Tabel 2.50 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)					Laju Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Silungkang	10.338	10.437	10.547	10.795	10.947	1,49
2.	Lewatuk Sapan	12.150	12.111	12.200	12.318	12.350	0,07
3.	Burong	17.174	17.327	17.581	17.815	18.089	1,54
4.	Tanar	17.043	18.143	18.445	18.581	19.000	1,26
Total		56.695	57.917	58.873	59.509	60.386	1,08

Sumber : Kecamatan Kota Singkil Tahun 2015

Dari tabel diatas pertumbuhan penduduk selalu bervariasi dari tahun 2011 sampai 2013 dimana pada tahun 2015 Kecamatan Silungkang merupakan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 1,49%. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan yang berada di jalan lintas nasional yang sebagai penunjang dalam pengembangan media perhubungan dan jasa.

#### b. Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil

Insider ini digunakan untuk menggambarakan tingkat administratif kependudukan yang dasar dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, Akta Kelahiran dan Akta Nikah. Berikut disajikan data mengenai kepemilikan dokumen administratif kependudukan sebagai berikut:

**Tabel 2.51 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, AKTA LAHIR, AKTA NIKAH Kota Singkil Tahun 2011-2015**

No	Kepemilikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	KTP					
	Sudah Mendaftar (orang)	42.200	43.110	43.307	43.554	43.175
2.	Jumlah Bayi Lahir ber Akta Kelahiran					
	Sudah Mendaftar (orang)	910	935	1.091	1.449	2.010
	Tidak Mendaftar (orang)	-	-	-	-	-
3.	Nikah Nikah					
	Sudah Mendaftar (orang)	13.273	-	15.158	-	-
	Tidak Mendaftar (orang)	410	-	484	-	-

Sumber : Profil Kota Singkil Tahun 2015

Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP tercatat sebanyak 43.175 jiwa atau sekitar 95,83% dari keseluruhan penduduk usia wajib KTP sebanyak 45.052 jiwa.

### 11. Urutan Wajib Penyelidikan Penduduk dan Keluarga Berencana

#### a. Rata-rata Jumlah Anak per keluarga

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan angka fertilitas adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang diinginkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak laki-laki.

**Tabel 2.52 Rata-rata Jumlah Anak per Rumah Tangga di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga	14.244	14.513	14.206	14.879	14.819
2	Jumlah Pemohon Rata-rata jumlah anak per rumah Tangga	91.267	92.000	92.972	95.608	101.105
		4,04	4,04	6,64	1,58	1,87

Sumber : BPS/Kantor BKKBN Kota Sawahlunto Tahun 2015

Nilai dari data di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga di Kota Sawahlunto mengalami fluktuatif. Tahun 2011 rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga 1,04 orang. Tahun 2015 rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,04 orang. Jika dibandingkan dengan target 2 orang anak setiap rumah tangga dalam program Keluarga Berencana tingkat nasional, maka dapat dikatakan, program Keluarga Berencana di Kota Sawahlunto sudah berjalan.

#### **b. Rasio Akseptor KB**

Program KB diwujudkan untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk disamping itu juga mengurangi resiko tingkat kematian anak serta tingkat kesakitan ibu.

**Tabel 2.53 Rasio Akseptor KB di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PUS	9.879	9.573	9.641	9.733	10.290
2	Jumlah Pemria KB (Jumlah Akseptor KB)	9.841	7.019	7.133	7.331	8.587
3	Jumlah Tidak ter KB	4.850	3.617	4.618	4.488	1.747
4	Rasio Akseptor KB	71,45	73,31	73,88	74,29	83,20

Sumber : BPS/KB

Rasio akseptor KB tahun 2015 sebesar 74,00 %, berarti sudah cukup tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya KB.

#### **12. Urutan Wajib Perhubungan**

Pemerintah Kota Sawahlunto selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan untuk kesenangan dan kenyamanan beraktivitas di kota sebagai penghubung wilayah untuk mendorong, mendukung dan menggerakkan pembangunan ke semua pusat-pusat kegiatan dalam wilayah sehingga memudahkan masyarakat perindustri melakukan perjalanan. Terselenggaranya jalan yang menjamin pengguna jalan berkelambatan dengan aman, yang menjamin kenyamanan berjalan dengan nyaman dan perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Standar Pelayanan Minimal tentang Perhubungan, tersebut terwujud dengan ketersediaan moda transportasi dan sarana lalu lintas seperti data berikut ini.



#### c. Moda Transportasi

Tabel 2.54 Jumlah dan Jenis Moda Transportasi Tahun 2011-2015

NO	JENIS ANGKUTAN	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Truk	Dok	236	281	186	306	296
2	Bus/Trans Bus	Unit	25	19	23	22	30
3	Bus Up	Unit	302	305	440	500	553
4	Angkot	Unit	40	45	60	40	47
5	Seleda	Unit	116	120	141	154	141
6	Jeep	Unit	122	123	155	141	145
7	Kend. Api	Unit	2	2	2	2	2
8	Trakel Bus	Unit	35	38	33	2	30
9	Angkutan Lain	Unit	10.900	11.031	12.000	13.222	14.031
10	Bus Pariwisata	Unit	2	2	2	2	2

Sumber: Statistik Kota Samarinda

Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa dalam 4 tahun terakhir jumlah sepeda motor dari tahun 2011 sebanyak 10.900 unit mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 berjumlah menjadi 14.031 unit. Sedangkan angkutan bus terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 47 unit dari 40 unit di tahun 2011.

#### d. Sarana Lalu Lintas

Dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, telah dibangun berbagai sarana lalu lintas antara lain rambu lalu lintas, marka jalan, warning light dan pembatas lajur. Namun penyediaan sarana pendukung ini masih perlu peningkatan, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, pada kawasan yang ramai aktivitasnya dan pada kawasan yang rawan kecelakaan lalu lintas. Ketersediaan sarana pendukung lalu lintas ini sangat diperlukan dengan semakin tingginya arus lalu lintas harian di kawasan di ruas-ruas jalan Kota.

Berikut ini perkembangan sarana lalu lintas jalan sejak tahun 2011 sampai 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.55 Sarana Lalu Lintas Jalan Kota Samarinda Tahun 2011-2015

NO	SARANA LALU LINTAS	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rambu Tegak	Dok	20	75	79	60	88
2	Warning Light	Unit	5	0	5	8	8
3	Traffic Light	Unit	-	-	-	-	1
4	Marka Jalan	Unit	342	412	444	482	488
5	Guardrail	Unit	125	167	188	148	148
6	Belmancu	Unit	120	106	110	100	100
7	Tempelan	Unit	100	100	100	100	100
8	Marka Jalan	M <sup>2</sup>	1000	1000	24.000	28.000	101.011

NO	SARANA LAHU LINTAS	Unit	2011	2012	2013	2014	2015
9	Pesawat terbang	Unit	-	-	-	-	-
10	Pupuk Pemupuk Tanah	Unit	3	4	18	24	26
11	Pupuk Infusasi Tanah	Unit	3	4	4	4	4

Sumber: Kantor Pertambangan Kota Sawahlunto

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana lalu lintas di Kota Sawahlunto dalam upaya menunjang vital Kota Wisata Tambora yang berbudaya telah terus ditingkatkan. Rencananya lalu lintas dari 324 unit di tahun 2008 meningkat menjadi 413 unit pada tahun 2012, growth juga mengalami peningkatan dari 163 unit di tahun 2008 menjadi 167 unit di tahun 2013, pupuk pemupuk tanah dan infusasi lalu lintas tahun 2009 sebanyak 4 buah dan tahun 2012 bertambah menjadi 6 buah, sedangkan jumlah delimeter juga berkurang dari 272 unit menjadi 150 unit di tahun 2013. Ketersediaan sarana lalu lintas ini dirasakan masih kurang sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh jalan. Selain sarana transportasi darat, di Kota Sawahlunto juga terdapat 3 (tiga) buah stasiun Kereta Api. Panjang lintasan kereta api yang menghubungkan Pusat Kota Sawahlunto, Muaro Kalaban dan Sungsang ini mencapai 18 (delapan belas) Km. kedepannya, Pemerintah Kota Sawahlunto mendukung semua kebijakan PT. KA dalam mengembangkan sarana transportasi ini. Saat ini, secara signifikan masalah ini tidak berpengaruh lagi sebagai alat transportasi umum, akan tetapi pihak Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan PT. KA Colong Sawahlunto telah menyopani Kereta Api yang ada digunakan sebagai Kota Wisata dengan stasiun utamanya di Pusat Kota dijadikan sebagai Museum Kereta Api.

## 12. Uraian Wajah Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah meremodul cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berhibur dan lain sebagainya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator sebagai tabel berikut:

Tabel 2.56 Layanan Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kantor Pos (unit)	4	4	4	4	4
2	Jumlah Sambungan Waran (BT)	3.008	3.304	3.004	3.004	3.004
3	Jumlah Waran unit	27	43	35	33	29

Sumber: 1. Bappeda Kota Sawahlunto

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kantor Pos di Kota Sawahlunto masih tetap sebanyak 4 unit sementara itu jumlah Waran pada tahun 2011 sebanyak 27 unit mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 29 unit.



#### 14. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di Kota Sawahlunto, salah satunya dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah yang disinergikan dengan kebijakan program pemerintah pusat. Koperasi yang aktif di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.67 Persentase Koperasi Aktif  
Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koperasi aktif (unit)	74	80	83	88	90
2	Jumlah koperasi unit	74	79	79	79	80
	Persentase koperasi aktif	100	87,53	80,12	83,33	80

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2017

Dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 perkembangan koperasi yang aktif di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan rata-rata 1,52 persen, walaupun pada tahun 2011 persentase koperasi aktif 100 persen. Perkembangan koperasi tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas koperasi dan memfasilitasi/kembangkan koperasi sehingga meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi. Kualitas koperasi ini dapat dilihat dari kemampuan manajerial para pengurus dalam mengelola koperasi untuk (a) asosiasi, yaitu pembinaan dan peningkatan SDM untuk pengurus koperasi. Untuk lebih jelasnya perkembangan koperasi dan permodalannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.68 Perkembangan Koperasi dan Permodalan  
Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Koperasi	74	79	79	79	80
Jumlah Anggota Usaha	9.052	9.247	9.216	9.319	9.129
Modal Usaha	90.014.274.542	114.186.908.895	157.555.892.020	147.964.368	171.762.438
Modal Bank	21.247.628.811	24.714.911.306	29.128.864.565	30.320.097.494	32.146.906.310
Modal Lain	68.766.645.731	89.471.997.589	128.426.927.455	117.644.270.742	139.615.532.028
Aset	58.270.525.774	77.777.889.287	82.780.804.335	58.612.812.244	75.326.498.177
Liab	3.007.527.667	3.550.968.309	7.774.912.285	2.754.381.415	1.163.674.402

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2017

Berikut dari tabel diatas perkembangan koperasi Kota Sawahlunto dari Tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah, anggota, volume usaha, modal, aset dan LRA koperasi. Tahun 2015 dari 80 jumlah koperasi yang aktif 56 koperasi dengan modal sebesar Rp.140.505.330. Meskipun jumlah dan perkembangan koperasi sudah memadai namun belum cukup berperan signifikan dalam pergerakan perekonomian Kota Sawahlunto, untuk itu kebijakan Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan dunia usaha dinilai perlu diupayakan untuk mengoptimalkan potensi koperasi dan UKM yang telah ada. Selain koperasi ketahanan Usaha Kecil dan Menengah serta Bank Pembiayaan Rakyat dan lembaga Keuangan Mikro sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta dalam menyediakan modal bagi pelaku usaha lokal. Berikut ini perkembangan UKM, KPR dan LKM selama 2011-2015:

**Tabel 2.59 Jumlah UKM Nee BPR/LKM UKM dan Jumlah BPR/LKM Tahun 2011-2015**

NO	UKM NEE BPR/LKM UKM	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah UKM NEE BPR/LKM UKM Aktif	437	412	417	410	351
2	Jumlah BPR /LKM aktif	29	34	34	29	31

Sumber : DinasKotamadya Diklat Agustus 2017

Tahun 2015 jumlah BPR/LKM aktif sebanyak 34 unit, tidak mengalami peningkatan, turun sedikit tipe (skala terakhir ini, sedangkan untuk jumlah UKM n-ee BPR/LKM UKM Tahun 2015 adalah 351 unit turun dari tahun sebelumnya sebanyak 106 unit. Peningkatan jumlah UKM tahun 2015 dari tahun sebelumnya di Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa semakin banyak terdapatnya layanan pendukung untuk mengembangkan perekonomian daerah.

### 13. Urusan Wajib Penanaman Modal

Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Terwujudnya daya saing penanaman modal untuk menunjang kualitas pertumbuhan nasional merupakan visi dari penanaman modal nasional. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal.

Kota Sawahlunto memiliki sumber daya manusia yang memadai melalui APRIK atau APHN, sedangkan investasi swasta masih sangat kecil dengan nilai tidak terlalu besar. Masih kurangnya kerjasama antara pemerintah modal dan swasta khususnya minat investor untuk berinvestasi, sehingga perlunya menyajikan data terkini (up to date) pada potensi sumber daya, terdapatnya kemitraan Usaha Milik Kecil Menengah (UMKM) dengan investor/perusahaan besar, terdapatnya EDM potensial yang mempunyai kemampuan marketing investasi. Untuk lebih jelasnya perkembangan investasi di Kota Sawahlunto dari tahun 2008 sampai dengan 2014 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.60 Indikator Ekonomi, Investasi dan Tenaga Kerja di Kota Sawahlunto 2011-2015**

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perolehan Investasi : Investasi Nasional (PMA dan PMDN/Investasi)	14	14	18	19	133
2.	Nilai total perolehan PMA skala Nasional (Rp)	-	-	-	-	3.500
3.	Nilai total perolehan PMDN skala Nasional (Rp Miliar)	25,70	25,00	28,09	19,59	201,8
4.	Jumlah Perusahaan (PMA dan PMDN) aktif	14	102	119	126	20
5.	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN (orang)	2.595	2.368	2.564	4.180	3.738

Sumber : Sawahlunto Diklat Agustus 2017

Dari tabel di atas perkembangan investasi PMA dan PMDN dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan dilihat dari indikator jumlah proyek dan nilai total investasi PMDN skala Nasional walaupun peningkatan ini tidak begitu signifikan. Kurangnya minat dari pada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Sawahlunto disebabkan oleh kurangnya promosi yang dilakukan mengenai potensi-potensi yang ada Kota Sawahlunto selain pariwisata. Salah satu usaha pemerintah adalah perlu



tahun 2013 direvisikanlah bentuk pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal untuk lebih memudahkan kegiatan penanaman modal dan investasi. Operasi pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi terutama dengan telah dilaksanakannya program peningkatan potensi dan kerjasama investasi serta program pelayanan prima sumber daya manusia dan jasa-jasa daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan penanaman modal. Sesuai dengan peraturan Walikota nomor 6 tahun 2013 tanggal 17 Maret 2014 tentang penodelegasian wewenang pelayanan dan non pelayanan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal maka tidak ada lagi SKPD teknis yang mengeluarkan peraturan.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan investasi di daerahnya sangatlah penting. Dengan melaksanakan pelayanan yang prima, peningkatan transparansi dan tata pelayanan yang cepat untuk mendukung pembangunan ekonomi regional, berbasis potensi lokal, meningkatkan sarana prasarana yang memadai adalah faktor yang dapat meningkatkan investasi di daerah.

#### 16. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Berkaitan dengan urusan kepemudaan dapat dilihat dari organisasi pemuda dan olahraga. Semakin banyak organisasi pemuda menunjukkan keterveduhan kelirras penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam membudayakan pemuda. Organisasi kepemudaan berperan dalam penumbuhan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang bidang olahraga dan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.61 Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga  
Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Organisasi Pemuda	14	14	15	17	17
2	Jumlah Organisasi Olahraga	24	24	24	24	23

Sumber : Banskabutan Salakan dngka Tahun 2016

Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Sawahlunto dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 organisasi pemuda berjumlah 14 organisasi dan tahun 2015 menjadi 17 Organisasi Pemuda di Kota Sawahlunto. Begitu juga dengan jumlah Organisasi Olahraga di Kota Sawahlunto juga mengalami peningkatan.

#### 17. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari tahun 2011 hingga saat ini berjumlah 37 buah, dengan rincian masing-masing Desa/Kelurahan memiliki satu buah LPM yang merupakan mitra kepala desa /kelurahan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat terdapat.

Disamping itu peranan PKK dalam pembinaan masyarakat dimajukan dalam bentuk kelompok rumah yang berada dan menyebar di setiap masyarakat. Pembinaan yang dilakukan meliputi bidang pemberdayaan ekonomi keluarga serta kehidupan sosial rumah tangga. Jumlah unit PKK yang ada di Kota Sawahlunto sebanyak 42 unit, yakni 37 PKK Desa/Kelurahan, 4 PKK Kecamatan dan 1 PKK Kota Sawahlunto. Setiap PKK yang ada di Kota Sawahlunto memiliki kelompok rumah yang total berjumlah 329 buah kelompok rumah. Perintahannya kelompok rumah PKK selama 10 tahun waktu 2011-2015 sebagai berikut :

**Tabel 2.62 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2011-2015**

NO	KELompok Binaan PKK	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kelompok Binaan PKK	222	222	202	202	202
2	Jumlah PKK	42	42	42	42	42
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	139	136	100	100	100

Sumber: BDA 2015

Jumlah unit PKK yang ada di Kota Sawahlunto sebanyak 42 unit, yaitu 37 PKK Desa/Kelurahan, 4 PKK Kecamatan dan 1 PKK Kota Kecamatan Lempaga Selaya Mangrovekat (LSM) menjadi sangat penting sebagai perwujudan dan wujud masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan daerah dan pada tahun 2015 LSM di Kota Sawahlunto memiliki 1 buah LSM.

## 2.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

### 1. Urusan Pilihan Pertanian

Sebagai sebuah kota, sektor pertanian di Sawahlunto tidak terlalu tinggi kontribusinya terhadap total output perekonomian yang dihasilkan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada grafik berikut:

**GRAFIK 2.11 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**



Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Meskipun kontribusi sektor pertanian hanya berkisar 0 %, akan tetapi jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini mencapai 17,3% dari total angkatan kerja di Kota Sawahlunto (BDA, 2015). Sehingga tidak dapat disangkal jika sektor ini masih menjadi prioritas intervensi. Sementara itu produktivitas komoditas pertanian pilihan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Gambar 2.12



Sumber: Data BPS

Dari data luas lahan terdistribusi, peningkatan luas areal tanam padi berdasarkan luas dengan produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan luas areal panen berdampak pada peningkatan produktivitas. Tahun 2013 merupakan tahun dimana peningkatan luas areal tanam padi merupakan nilai tertinggi dan mencapai puncak di tahun berikutnya. Sementara itu, untuk melihat perkembangan dengan proses dan kondisi lahan digunakan indikator produktivitas tanaman padi sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Gambar 2.13



Sumber: Data BPS dan BPS

Secara umum, produktivitas tanaman padi di Kota Sengkaling masih di bawah produktivitas nasional dan provinsi. Peningkatan produktivitas areal tanam di tahun 2014, tidak diikuti dengan peningkatan untuk produktivitas tanaman minimal sama dengan tahun sebelumnya.

#### Tanaman Perkebunan

Kondisi perkebunan areal lahan Sengkaling adalah sangat dan sedang. Berikut adalah informasi terkait dengan kondisi perkebunan tersebut.



Produksi karet kota Sawahlunto menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama dari tahun 2012 s.d 2015. Jika di tahun 2012 produksi karet hanya di kisaran 200 ton, maka pada tahun 2015 naik dalam kisaran yaitu 3 tahun telah meningkat sebanyak 3 kali lipat. Walaupun sempat penurunan luas area tanam di tahun 2014, akan tetapi ini justru diiringi dengan peningkatan produksi. Ini berarti bahwa tanaman-tanaman muda yang sebelumnya belum produktif sudah memasuki masa-masa produktif.

Jika dilihat dari sisi produktivitas masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Jika dibandingkan dengan produktivitas karet nasional, produktivitas karet kota Sawahlunto masih jauh tertinggal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan perkembangan karet di kota Sawahlunto baru dimulai sejak satu dasawarsa yang lalu. Sehingga dampaknya terhadap peningkatan produktivitas belum terlalu signifikan. Hal ini menjadi tantangan bagi kota Sawahlunto ditahun-tahun yang akan datang.

Kemudian kelas yang menjadi andalan di sub sektor perkebunan adalah Kelapa. Jumlah produksi dan luas area tanam dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 2.17



Sumber: Data BPS

Nilai rata-rata untuk luas lahan tanam kakao, telah terjadi penurunan produksi kakao Sawahlunto yang disebabkan oleh penurunan luas areal tanam. Penurunan produksi sebanyak 47% ini disebabkan oleh menurunnya jumlah luas areal tanam sebanyak 45%. Ini berarti bahwa setiap penurunan 1% luas areal tanam, juga berdampak pada penurunan kurang lebih 1% produksi kakao di Sawahlunto. Akan tetapi ada hal yang mengimbangi dari sisi produktivitas sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.18



Sumber: Data BPS dan BPS

Jika dibandingkan dengan produktivitas nasional, produktivitas kakao di kota Sawahlunto berada diatas rata-rata produktivitas nasional. Jika produktivitas nasional berada pada kisaran 0,38 - 0,41 ton / ha, produktivitas kakao di kota Sawahlunto berada pada kisaran 0,44-0,72 ton / ha. Selain komoditas perkebunan, komoditas lain yang juga banyak dikembangkan usahanya oleh masyarakat Sawahlunto adalah dari sub sektor peternakan seperti sapi, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.

## 2. Urutan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kota Sawahlunto dikenal dengan kota tambang batu bara. Pertambangan batu bara ini berperan penting dalam pembangunan Kota Sawahlunto walaupun tahun terakhir produksi dari batubara menurut Mestipanya mengalami hambatan pada tahun yang sudah sangat berpengaruh terhadap produksi batubara yang cenderung menurun.

meskipun secara nominal nilai PDRB sektor ini terus meningkat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

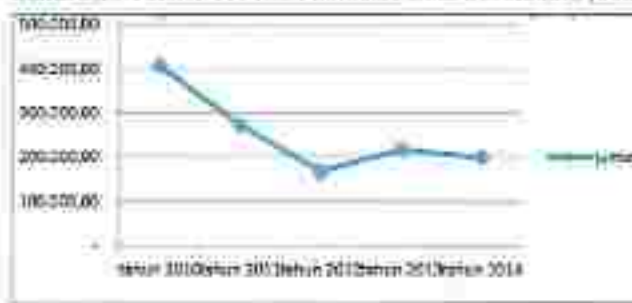
**Tabel 2.58 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015*
Asas Dasar Sampai Miliar (RpM)	222.957,46	207.766,70	232.901,44	248.703,30	239.744,46
Total PDRB (RpM)	2.295.298,06	2.101.671,35	2.327.792,20	2.496.212,27	2.448.740,26
Kontribusi Pn	9,73	9,87	9,73	9,95	9,79

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Didihat dari perkembangan PDRB atas dasar berikutan dari Tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan total PDRB, namun secara kontribusi terhadap PDRB dari tahun 2010 sampai 2015 mengalami penurunan, namun akan tetap memberikan pertumbuhan yang positif bagi perekonomian kota Sawahlunto. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya produksi batu bara yang ada di Kota Sawahlunto sehingga berpengaruh terhadap riyaal yang dimiliki Pemerintah Daerah. Usaha Pemerintah Daerah dengan adanya program peminaan dan pengawasan usaha pertambangan menurut bagt jembatany bagt melakukan usaha-usaha di Kota Sawahlunto. Mulai Tahun 2016, ini pownangan terhadap pertambangan di daerah dipindahkan ke propinsi, sehingga program kegiatan yang mendukung bidang pertambangan ditundukkan ke propinsi. Untuk lebih jelasnya jumlah produksi batubara di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Grafik 2.10 Jumlah Produksi Batubara Kota Sawahlunto (Ton)**



## 2. Urusan Pilihan Pariwisata

Pariwisata adalah perjalanan untuk melakukan rekreasi atau bersenang-senang dan untuk tujuan lain. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (World Tourism Organization), wisatawan didefinisikan sebagai orang yang melakukan perjalanan dan bermalam di suatu tempat atau tempat-tempat tertentu di luar tempat tinggalnya dalam waktu kurang dari satu tahun untuk tujuan bersenang-senang (wisata), bisnis dan tujuan lainnya.

Pada tahun 1994 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengklasifikasikan bentuk pariwisata secara umum menjadi:

1. Pariwisata domestik, artinya orang-orang dalam negeri yang melakukan perjalanan di dalam negeri.
2. Pariwisata inbound, artinya orang-orang luar negeri yang melakukan perjalanan di dalam negeri.
3. Pariwisata outbound, artinya orang-orang dalam negeri yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Berbagai dampak perjalanan wisata, bentuk pariwisata mengalami evaluasi sehingga digolongkan berdasarkan pasar yang lebih kecil (niche market) seperti:

1. Agritourism
2. Culinary Tourism
3. Cultural Tourism
4. Ecotourism
5. Educational Tourism
6. Extreme Tourism
7. Gastronomy
8. Heritage Tourism
9. Leisure Tourism
10. Meeting, Incentives, Conventions and Exhibition or Events (MICE) Tourism
11. Medical Tourism
12. Religious Tourism
13. Wildlife Tourism

Sewaktu menghadapi konsep "One Stop Tourism" dalam perencanaan strategi pengembangan wisatanya, Konsep ini dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memberikan banyak alternatif wisata kepada wisatawan di satu tempat—dalam hal ini Kota.

Berdasarkan objeknya, jenis pariwisata di Sawahlunto digolongkan menjadi:

**Tabel 2.04 Jenis Pariwisata Kota Sawahlunto**

Jenis	Objek
Agritourism	Kebun Buah
Educational Tourism	HPDA Candi
Leisure Tourism	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wisata Goa</li> <li>2. Raud Park</li> <li>3. Taman Botani Kecil</li> <li>4. Gunung Komara</li> <li>5. Puncak Poria</li> <li>6. Desa Wisata Rantau</li> <li>7. Kampung Tenis Silungkang</li> <li>8. Jembatan Wana</li> <li>9. Taman Rupa Rupa</li> <li>10. Perumahan Rupa</li> </ol>
Heritage Tourism	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Kota Lama</li> <li>2. Masjid Agung (Masjid Mambur)</li> <li>3. Museum Gunung Batara</li> <li>4. Museum Kereta Api</li> <li>5. Jalan PGB-LPO</li> <li>6. Lintang Tambak Mula Rupa &amp; Gedung Jati Baru</li> <li>7. Gereja Katolik</li> <li>8. Museum Suci Mambur</li> </ol>
MICE Tourism	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sawahlunto International Music Festival (Sawahlunto)</li> <li>2. Museum Sigaula</li> <li>3. Tugu 66 Rantau</li> <li>4. Peta Rupa Rupa Kota</li> </ol>

Jenis	Objek
	1. Ekorana Park House
	2. Padijaya
	3. Eya Tea Trail Adventure
	4. Pagar Nohon
	5. Family Outbering
	6. Ekor Festival Musik
Religius Tourism	1. Masjid Agung <sup>12</sup>
	2. Gereja Katolik <sup>13</sup>
	3. Masjid Jami Nohok <sup>14</sup>

<sup>12</sup>Objek objek ini mengantung sejarah budaya dan religius

### A1. Agritourism

Objek wisata yang termasuk kategori agritourism di Sawahlunto adalah kebun buah, terutama di kawasan wisata Kandi berjarak sekitar 30 menit dari pusat kota Kandi. Pada saat ini jenis tanaman yang ditanam adalah Naga, Pepaya, Sirih dan Lenggang. Dengan menggunakan pengiran dari taman perisa Kandi kebun buah ini diharapkan sudah dapat segera dibuka untuk umum.

### A2. Educational Tourism

IPTEK Centre berada satu komplek dengan Museum Oudang Ranovera terletak di daerah Air Dingin yang berjarak sekitar 30 menit dari kawasan lapangan wisata. Pendidikan IPTEK centre ditujukan untuk meningkatkan minat siswa dari tingkat SLTP s/d SLTA dengan cara melalui alat alat peraga yang menarik. Pengunjung manula dapat langsung melihat bagaimana sebuah teori dipraktikan dengan menggunakan alat peraga yang ada. Pengajar juga membantu mahasiswa dengan sebagai sekolah untuk memudahkan dalam pengetahuan dalam praktik.

### A3. Leisure Tourism

A3.1. Berlokasi di Munia Kiduloh tepat di tepi jalan lintas Sumatera berjarak sekitar 5 KM dari pusat kota Sawahlunto, Waterboom merupakan pusat rekreasi keluarga berupa kolam renang dengan berbagai fasilitas. Kolam renang yang tidak dalam ditujuan bagi anak-anak. Pada saat ini telah dibangun kawasan pada air atas kolam lama yang ditujukan bagi anak-anak. Struktur pendukung kawasan ini adalah Mushola, tenda-tenda pertanian kayu yang tidak beratap, cafe-cafe yang berada didalam lahan WC dan kamar bilas serta ruang ganti pakaian dalam jumlah yang cukup. Struktur pendukung lain yang tak kalah menarik adalah hotspot area Waterboom dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Wahana Wisata Sawahlunto.

A3.2. Kandi Park atau taman wisata Kandi merupakan pusat kawasan wisata yang berjarak sekitar 12 KM dari pusat kota Sawahlunto ke arah kidulahnya terdapat Taman Satwa Kandi. Wisata Wahana Air di Gunung Tandikat, Panto Ball, Flying Fox dan permainan Indian untuk hiburan. Taman Satwa memiliki koleksi hewan seperti orang utan, buaya, samand, aneka jenis burung, ikan, gajah, urut, kuda, beruang, kangguru, kura-kura, belalai dan lain-lain. Pengunjung dapat menikmati naik tonggongan seperti gajah, urut dan kuda. Taman wisata Kandi dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Wahana Wisata Sawahlunto.

A3.3. Pada saat ini telah dibuka untuk umum objek penangkaran buaya yang masih berlabel chakter Kandi Park. Tahun 2012 ini juga telah dibuka untuk umum tempat kupu-kupu yang berlabel dihelah Taman Satwa Kandi. Taman Kupu-Kupu ini merupakan yang ketiga di Indonesia.



A.3.4. Puncak pelan dari puncak pemara adalah puncak-puncak tertinggi dalam hiasan dan utama pusat kota Sawahlunto. Diberi nama puncak Polak karena berdasarkan cerita turun temurun, orang yang pertama kali sampai di puncak ini adalah seorang berkebangsaan Polakalia. Pada saat saat puncak Polak diberi sambutan bertepatan SAWAHLUNTO yang dapat dilihat dari jarak yang cukup jauh. Puncak Polak merupakan puncak yang sangat cocok digunakan untuk hiking dan camping. Pada saat ini puncak ini telah ditumbuhi hutan untuk memelihara keindahan alamnya serta untuk menjaga keseimbangan alam.

A.3.5. Semesta itu puncak pemara merupakan puncak yang dimunculkan menjadi terminal atau objek wisata. Pada saat puncak ini dapat dilihat pemandangan kota Sawahlunto yang akan sangat indah sekali terutama bila dilihat di malam hari. Seluruh area puncak dan sekitarnya diarsir oleh pohon cemara dan cendek untuk melindungi hutan. Jalan mobil telah tersedia sampai ke puncak, akan tetapi belum ada jalur pejalan kaki yang lebih nyaman untuk puncak ini.

A.3.6. Desa Runtuh merupakan desa tua, yang dibangun di Sawahlunto. Berjarak sekitar 11 km dari pusat kota Sawahlunto, disini pengunjung dapat menikmati keindahan kehidupan masyarakat terutama kegiatan-kegiatan seperti menanam sayuran maupun sebagai hiburan, menikmati hutan dan menikmati pemandangan alam.

A.3.7. Kampung tua di kecamatan Siringbang merupakan suatu tempat dimana pengunjung dapat melihat proses pembuatan sagu yang tradisional atau biasa disebut alat teduh bukar mesin (ATBM). Pengunjung juga dapat langsung berbelanja atau memesan sagu kepara pengrajin di sana. Kampung tua berjarak sekitar 6 km dari pusat kota Sawahlunto menuju arah Sukoh. Kecamatan Siringbang berada pada jalur lintas tengah Sumatera.

#### A.4. Heritage Tourism

Kawasan lama lama terdiri dari gedung-gedung peninggalan dari zaman Belanda yang masih digunakan sampai saat ini, baik sebagai tempat tinggal, tempat ibadah, gedung pertemuan, kantor, dan rumah sakit dan museum. Kawasan ini meliputi Masjid, Agung, gedung pengadilan, rumah Pak Sa Kait, gedung koperasi, Pasar Remaja, Hotel Ombak, Museum Kertis Aul, sekolahan lama lama dan Gereja Katolik, GPK, Rumah PTBA, perumahan guru disamping Lapangan Bola, gedung tua tua, rumah tumbang mbah Soco dan Museum Gedung Kertis.

A.4.1. Lintang Tameng Mbah Soco merupakan lintang tameng pertama di patahan Soer. Masih dipuji pada tahun 1998, di sini sering terjadi dan para pekerja tameng dengan mendar bernama Mbah Soco. Diberi tameng tahun 2007 dan dijadikan objek wisata dengan nama "Lintang Tameng Mbah Soco".

Disekitar area lintang ini, terdapat sebuah bangunan yang dibangun pada tahun 1947 dengan nama gedung pertemuan biruk. Sekarang dijadikan gedung info dan untuk menyajikan informasi mengenai obyek wisata tameng.

A.4.2. Gedung Sakti atau Club Aul ini dibangun pada tahun 1910. Gedung ini merupakan tempat bermain bowling dan billiard oleh para pejabat Belanda di Sawahlunto. Setelah diizinkan rentalisasi, pada 1 Desember 2006 gedung ini dihanguskan sebagai gedung pusat beladhyawan (GPK) Sawahlunto.

AA.3 Rumah Pak Sin Kik dibangun pada tahun 1906 dan pernah dipergunakan sebagai Gedung Tesu, tempat pertemuan masyarakat Melayu dan sebagai pabrik es. Setelah direhabilitasi tahun 2005-2006, bangunan kelas intelektual cina ini menjadi salah satu kawasan wisata masa lampau.

AA.4 Gedung Koperei Onbilio dibangun tahun 1938n dengan nama Koperei "Ons Helwig". Koperei ini dibuat untuk membantu melandaikan kepulauan-orang-orang Belanda dan Indo-Belanda yang ada di Sawahlunto. Bangunan ini masih menjadi Gedung Koperei Onbilio Kota Sawahlunto.

AA.5 Pajak pegadaian kemudian disebut gedung dengan arsitektur Finnan dan untuk Gedung ini dibangun tahun 1917. Gedung ini juga pernah digunakan sebagai Gedung Koperasi atau tempat pertunjukan, saat ini gedung ini dirongsekan menjadi sebagai Kantor Pegadaian.

AA.6 Bangunan dengan arsitektur Belanda ini dibangun pada tahun 1916. Gedung yang berada di kawasan Lapangan Segitiga Kota Sawahlunto ini berdiri dengan megah sebagai sebuah landmark kota. Gedung ini berfungsi sebagai sebuah kantor perusahaan tambang Hutan Alam untuk Pertambangan Onbilio.

AA.7 Untuk pengalangan para ahli tambang yang datanglah Belanda, maka pada tahun 1918 dibangunlah Wisma berada di depan gedung Ratuhan. Dengan nuansa arsitektur Belanda yang masih kental, bangunan ini sekarang dijadikan hotel Onbilio Sawahlunto dan menjadi salah satu pilihan tempat menginap bagi wisatawan yang datang ke Sawahlunto.

AA.8 Untuk kecerdasan anak-anak Belanda yang tinggal di Sawahlunto pada zaman kolonial, maka dibangunlah sekolah Santa Lucia dipusat kota berlandaskan dengan rumah ibadah bagi umat Katolik, gereja Santa Barbara.

AA.9 Bangunan Mesjid Agung dahulu kala merupakan Bangunan PLTU yang megah yang dibangun pada tahun 1932. Sedangkan untuk sayap PLTU yang berkecanggihan lebih dari 75 meter dipusatkan rumah mesjid.

AA.10 Museum Gedung Ratuhan pada zaman kolonial Belanda dijadikan Rumah Umum yang dibangun pada tahun 1916, merupakan cerminan sejarah masa lalu yang direpresentasikan melalui beberapa galeri yang ada diantaranya galeri etnografi, galeri seni tempo dulu, istek umum dan galeri koleksi yang luas sebagai bentuk kerjasama Kota Sawahlunto dengan Regeri Mulaas (twin city).

AA.11 Stasiun Kereta Api yang dibangun pada tahun 1912, terkenal di atas panggung Kota Sawahlunto dan masih digunakan sebagai stasiun kereta Wisata hingga saat ini. Pada tanggal 17 Desember 2006, stasiun ini dinobatkan sebagai Museum Kereta Api.

## 4.2. MICE Tourism

Gedung MICE merupakan singkatan dari Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition. Terkadang C juga diartikan Convention dan E untuk Event. MICE tourism dapat diartikan sebagai salah satu jenis pariwisata yang memiliki banyak unsur dalam satu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk tujuan tertentu seperti family gathering, konferensi, seminar dan lain-lain. Sub industri untuk jenis pariwisata ini sering disebut dengan meeting atau event industry.

Event akhir di Sawahlunto adalah pada saat merupakan ulang tahun kota setiap tanggal 1 Desember. Rangkaian acara pada ulang tahun tersebut terdiri dari Sawahlunto International music Festival (SIMFEST), pameran

lainnya, pagelaran seni dan budaya seperti kuda kepang, tabuik, hamingkar, pasar malam, serta tarian tradisional dan panggung Kuda. Kota roadrace juga rutin dilaksanakan (keberaga kali dalam setahun). Even internasional yang tak kalah pentingnya adalah lomba balap sepeda touz de singaperak.

#### A6. Religious Tourism

Makam Syekh Kuluk bersebelahan di desa Siempat kecamatan Teluk. Uluak Kuluk dikenal sebagai tempat lahir Minangkabau yang punya kaitan dengan Syekh Buchawuddin di Pattani. Makam ini ramai di kunjungi masyarakat dari berbagai daerah terutama para peziroh dan pengikut ajarannya pada hari hari besar Islam dan pada waktu menjelang bulan Ramadhan.

Berikut dapat dilihat jumlah pengunjung tempat wisata di Kota Sawahlunto yang paling banyak dikunjungi wisatawan:

**Tabel 2.64 Tempat Wisata yang Sering Dikunjungi oleh Wisatawan di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2018**

Objek Wisata	2011	2012	2013	2014	2015
MUSE	48.377	143.870	115.083	100.306	641.887
Taman Sate Sardi	279.000	323.500	388.124	30.124	100.888
Wana Tugu	167.072	170.800	156.745	131.949	101.682
Makam Sajarah	30.000	-	20.000	20.000	25.000
Pura Kuda	25.000	-	30.000	-	50.000
Akharan Gunung Ratu	8.014	8.000	14.000	13.725	20.044
Gunung	17.000	-	10.000	20.000	15.000
Lubang Aliah Sate	3.891	6.500	10.379	10.764	12.000

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2016, BPS

#### 4. Urusan Pilihan Kelantan dan Perlakuan

Pada bagi perkembangan perlakuan di Kota Sawahlunto sangat terlihat akibat ketersediaan air bagi budidaya perlakuan sangat kecil. Pada sisi lain seiring berkembangnya jumlah penduduk kebutuhan akan ikan terus meningkat sehingga ketersediaan ikan produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Berikut dapat dilihat luas areal budidaya perlakuan dasar menurut jenis.

**Tabel 2.65 Luas Areal Budidaya Perlakuan Dasar menurut Jenis (Ha)**

Jenis	2011	2012	2013	2014	2015
Sungai	184,08	184,30	184,97	184,97	184,37
Kolam	58,00	58,00	58,21	58,30	58,30
Sawah	13	14	-	122	122
Keroby Hutan	-	-	-	-	-
Geramita	9	-	-	-	-
Total	261,08	262,30	243,18	337,18	334,18

#### 6. Urusan Pilihan Perdagangan

Perkembangan sektor perdagangan sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi pada sektor lain terutama sektor pertanian, industri, pertambangan

dan sumberdaya mineral serta perkebunan di bidang pertanian. Salah satu aspek yang penting dalam pembangunan adalah perlindungan dan pengamanan perdagangan/perdagangan komoditas sesuai dengan program yang telah dijalankan pemerintah serta masyarakat. Program ini untuk meningkatkan perlindungan komoditas sesuai ketentuan perdagangan yang berlaku sehingga komoditas tidak terdampak pada kenyamanan atau keamanan barang dan jasa.

Perkembangan kontribusi sektor Perdagangan, pedagang besar, eceran, rumah mobil dan sepeda motor dalam PDRI selama 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.66 Kontribusi Sektor Perdagangan, Besar dan Eceran, Reparat Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRI Tahun 2011-2015**

KONTRIBUSI	2011	2012	2013	2014	2015*
Nilai Utang Rupa Rakata (Rp)	285.206,08	313.827,79	344.822,49	381.490,41	403.327,48
Total PDRI (Rp)	1.846.023,50	2.102.872,20	2.327.727,81	2.576.917,87	2.825.726,78
Kontribusi (%)	15,01	14,92	14,81	14,80	14,27

Sumber: BPS/Kontribusi Sektor Sektor Tahun 2015

Dari tabel diatas pertambahan kontribusi atas dasar harga berlaku sektor perdagangan besar, eceran, rumah mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan, dari tahun tahun sebelumnya dengan peningkatan rata-rata setiap tahun Rp. 33.034,09 juta. Meningkatnya sektor ini sejalan perkembangan pedagang besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Sawahlunto yang merupakan sektor utama produksi kontribusi terbesar terhadap PDRI Kota Sawahlunto ini terbukti bahwa perdagangan di Kota Sawahlunto sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi, tempat tumbuh dari peningkatan produksi hasil perikanan tradisional yang ada di Kota Sawahlunto.

#### 4. Usaha Piliha Perindustrian

Sektor industri termasuk penyumbang penting bagi pertumbuhan PDRI daerah. Sektor industri di Kota Sawahlunto didominasi oleh industri kecil pada skala rumah tangga dengan berbagai produk yang dihasilkan. Pembangunan industri diharapkan untuk memajukan pembangunan industri secara internal dan mengutamakan industri usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. Perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRI selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.67 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRI Tahun 2011-2015**

KONTRIBUSI	2011	2012	2013	2014	2015*
Nilai Utang Rupa Rupa (Rp)	148.786,71	162.861,94	188.888,38	212.888,38	227.888,38
Total PDRI (Rp)	1.846.023,50	2.102.872,20	2.327.727,81	2.576.917,87	2.825.726,78
Kontribusi (%)	8,06	7,74	8,12	8,23	8,07

Sumber: BPS/Kontribusi Sektor Sektor Tahun 2015



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi area pasar harga berlaku dari sektor industri pengolahan tahun 2010 sampai 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar Rp. 13.694,62 juta. Peningkatan ini tidak lepas dari usaha pemerintah kota dalam mengembangkan industri Kota Sawahlunto. Dengan telah dilaksanakannya program yang ada di RJMD kota seperti program pengembangan industri kecil dan menengah, program pengembangan usaha sentra produksi dan program pengembangan industri agro. Selain kegiatan rutin seperti pembinaan dan pelatihan terhadap industri yang ada, Pemkot Sawahlunto tahun 2015 mengadakan kegiatan Sawahlunto International Bazaar Carnival(SIBZ) sehingga memberikan peluang bagi pengrajin untuk berjualan dengan sangat menguntungkan. Pemkot Kota Sawahlunto terus meningkatkan kegiatan promosi dan penumbuhan jaringan pemasaran hasil-hasil industrinya. ini terbukti dengan acgnet marketing telah dijadikan sebagai bagian dari model bisnis dan rumah usaha SHAFRA di New York pada bulan September tahun 2015. Selain sangat menguntungkan juga merupakan produk unggulan kota sawahlunto, masih ada industri-industri kecil, menengah dan rumah tangga yang perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.68 Jumlah Industri dan Omset di Kota Sawahlunto Tahun 2014 s/d 2015**

No	Jenis Industri	Industri Kecil/industri menengah dan perikanan		Industri Menengah		Industri Rumah Tangga	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	Unit Usaha (unit)	403	442	3	3	1421	1116
2	Tenaga Kerja (orang)	1873	1872	100	100	1348	1229
3	Nilai Produksi (Rp)	3.443.000.000	4.012.200.000	1.433.700.000	4.703.000.000	4.274.100.000	5.259.400.000
4	Omset (Rp)	10.296.600.000	20.360.100.000	7.390.000.000	14.110.000.000	1.443.200.000	1.639.400.000

Sumber : SMP Kota Sawahlunto 2015

Berdasarkan Pertumbuhan dan detil dari industri di Kota Sawahlunto dimulai dari tahun 2010 dan 2016. Dari tipe jenis industri yang ada, peningkatan untuk tahun 2015 ini meliputi pada industri kecil (industri makanan dan kerajinan) dan industri rumah tangga. Industri kecil (industri makanan dan kerajinan) dan industri rumah tangga mengalami peningkatan dalam jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai produksi dan omsetnya. Sedangkan untuk industri menengah tidak mengalami peningkatan di tahun 2015 untuk jumlah unit usahanya tetapi mengalami peningkatan pada jumlah tenaga kerja, nilai produksi dan omsetnya. Meningkatnya perkembangan dari industri yang ada di Kota Sawahlunto ini tidak lepas dari peranan pemerintah, melalui kegiatan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Perindustri dan Perdagangan, mulai dari kegiatan pameran produk, pengembangan industri menengah, pelatihan dan workshop untuk industri kecil dan rumah tangga.

#### 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap setia kepada pelayanan dengan provinsi lain. Daya saing

merupakan salah satu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi yang berkembang. Dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, Kondisi Kota Sawahlunto terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari : kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur dan nilai berinvestasi.

#### 2.4.1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

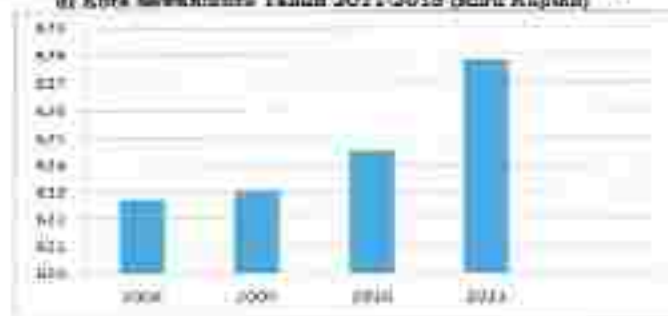
Kemampuan ekonomi daerah dalam artianya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk mendapatkan pengaruh bagi peningkatan daya saing daerah.

Kondisi Kota Sawahlunto terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari : pertumbuhan perkapita atau angka konsumsi rata-rata perkapita (pendapatan dan dan pengeluaran), dan produktivitas total daerah.

##### 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pada tahun 2010 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga perkapita di Kota Sawahlunto mencapai Rp. 677.790,-. Angka ini lebih besar 9% dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Angka pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga perkapita selalu meningkat dari tahun ke tahun. Semakin naik angka konsumsi rumah tangga, itu menunjukkan semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.10 Angka Konsumsi Rata-rata Rumah Tangga Perkapita di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

##### 2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendukung perkembangan suatu daerah. Hal ini tergantung melalui PDB atau dasar harga berlaku dari ke-17 sektor/ lapangan usaha tersebut, yang berkontribusi terbesar terhadap PDB Kota Sawahlunto adalah sektor/ lapangan usaha perdagangan Besar dan Kecil, Reparat Mekanik, dan Sepeda Motor dan yang kontribusinya paling kecil sektor Jasa Perusahaan.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah per sektor/ lapangan usaha (ADH Berlaku) di Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2011-2015

Tabel 2.59 Produktivitas Total Daerah per Sektor (Allikha)  
(1) Kota Semarang Tahun 2011-2015 (Putra Haryadi)

No.	Anteil Legung Stunde	2011		2012		2013		2014		2015	
		kg	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	%
1	Flussnetz Verfahren des Füllens	107.500,00	5,9%	107.500,00	9,2%	100.770,40	9,8%	100.000,00	9,6%	100.000,00	9,9%
2	Verfahren des Füllens	117.200,00	11,6%	102.800,00	10,3%	101.100,00	10,1%	101.100,00	9,7%	101.100,00	9,9%
3	Verfahren des Füllens	202.470,00	12,1%	200.000,00	12,1%	201.000,00	12,4%	200.000,00	10,9%	210.000,00	12,8%
4	Verfahren des Füllens	20.000,00	0,7%	20.000,00	1,0%	21.000,00	1,1%	20.000,00	1,0%	20.000,00	1,0%
5	Verfahren des Füllens	1.000,00	0,0%	1.000,00	0,0%	1.000,00	0,0%	1.000,00	0,0%	1.000,00	0,0%
6	Verfahren des Füllens	100.000,00	0,1%	100.000,00	0,1%	100.000,00	0,1%	100.000,00	0,1%	100.000,00	0,1%
7	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
8	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
9	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
10	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
11	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
12	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
13	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
14	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
15	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
16	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
17	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
18	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
19	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
20	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
21	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
22	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
23	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
24	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
25	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
26	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
27	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
28	Verfahren des Füllens	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0

Booklet: *Practical Food Assessment* (2014)

Pada tahun 2011, secara nasional kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparatasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor ekonomi yang paling nilai tambahnya dibandingkan dengan sektor lainnya, yang mencapai Rp. 287.260,31, (14,97%). Bila dibandingkan dengan tahun waktu 2011-2010 memiliki kontribusi rata-rata 1% dari PDRB setiap bawangkutan. Posisi berikutnya di tempati oleh sektor/ lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar Rp. 348.540,82,- meningkat dibanding tahun 2013 yang jumlahnya sebesar Rp. 31.653,92,- Sektor/layanan usaha lainnya

penghasilan menduduki urutan ketiga dalam kontribusinya terhadap Kota Sawahlunto, yakni dari Rp. 288.221,30,- pada tahun 2013 menjadi Rp. 313.075,23- pada tahun 2014.

## 2.4.2 TUDUH REINVESTASI

### 1. Angka Kriminalitas

Tuduh reinvestasi sangat diutamakan oleh faktor keseragaman dan kemiripan. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada mewujudkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Jenis kriminal/lindeh kejahatan dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.70 Banyaknya Kriminal Menurut Jenis Kriminal Tindak Kejahatan di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2014

Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015
Curan/pencurian Aneka jenis/barang	31	43	24	5-	20
Pengapriapan	3	2	33	6	15
Ekori	2	5	8	3	10
Pengapian	5	10	15	20	7
Pengapian	0	7	4	4	2
Curan	8	17	15	11	10
Pembunuhan	2	1	2	0	1
Antarapencurian dengan kekerasan	0	10	8	10	1
Curan/pencurian dengan kekerasan	0	0	1	0	1
Pertusutan/ekori	4	8	7	3	2
Pembunuhan	0	0	0	0	0
Total jumlah kriminal*	51	107	94	81	89
Jumlah penduduk**	27.887	28.088	28.872	29.008	30.188
Angka Kriminalitas (%/%) per 1000 jumlah penduduk	0,99	1,94	1,88	1,83	1,41

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2015

Sebagai ukuran tingkat keamanan dan ketertiban dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 relatif rendah bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto dari tahun 2011 sampai 2014 secara umum mengalami penurunan. Menurunnya jumlah kriminalitas ini ditandai dengan menurunnya jumlah kriminal yang terjadi di Kota Sawahlunto. Program yang telah dilaksanakan dalam menekan angka kriminalitas seperti program pembinaan Agama dan adat di bagian kerja adat, selain itu program unggulan nagari nagari dari Pemerintah Kota Sawahlunto yang mendapat masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran sehingga berpengaruh terhadap jumlah kriminal yang terjadi di Kota Sawahlunto. Penurunan jumlah kriminal tersebut merupakan indikator keberhasilan masyarakat untuk happy dan bersama-sama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Sawahlunto.



ditihat dari data yang ada peningkatan angka kriminalitas yang signifikan terjadi sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 terjadi pada jenis kriminal perampok, Anies (penganiayaan dengan senjata tajam) dan perampokan/raib. Dari ketiga jenis kriminal ini sangat perlu penanganan dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto yang bekerjasama dengan kepolisian dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tindakan kriminalitas yang terjadi di Kota Sawahlunto serta bahaya dan hukuman yang akan diterima apabila melakukan tindak kriminal tersebut.

## 2. Lains Proce Perishan

Proce Perishan dalam bermentasi dilaksanakan oleh Kantor Penyusunan Terepdu Satu Pinta dan Penanganan Model (KPTD). Penyusunan ini assa bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan public (swasta) yang akan masuk ke suatu wilayah/desa/berpeming kepada daya saing investor yang diuifid oleh wilayah/desa/berpeming yang bersangkutan. Penilaian daya saing investor berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kemitatan perikanan. Kemitatan perikanan suatu wilayah/desa sangat berpengaruh dalam pembuatan proce administratif untuk investasi. Lains penyusunan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan No 16 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014 tentang Standar Operasional Proceur Pelayanan Perishan pada Kantor Pelayanan Terepdu Satu Pinta dan Penanganan Model. Realisasi perishan dari tahun 2014 sampai 2015 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2-71 Realisasi Perishan  
Kota Sawahlunto Tahun 2014-2015

No	Jenis lah	2014	2015
1	lah Mendirikan Karaman (MK)	14	63
2	lah Penggalian PPS	100	30
3	lah Usaha dan Karaman (UK)	23	68
4	Tanda Daftar Perishan (TDP)	98	111
5	Tanda Daftar Usaha (TDU)	2	0
6	Sama dan Usaha Perdagangan (SDUP)	155	100
7	Tanda Daftar Gading (TDG)	0	1
8	lah Rumah Hilir Karaman	0	0
9	lah Mendirikan Rumah Rami	0	0
10	lah Agribisnis	1	0
11	lah Tana Gity	2	0
12	lah Cycle	11	1
13	lah Penggalian Tradisional	0	0
14	lah Pabrik Dahan	18	28
15	lah Apoteker	1	11
16	lah Pabrik Pemasak	3	ya
17	lah Pabrik Mikan	3	2
18	lah Pabrik Mekan Tana	3	11
19	lah Usaha Angkutan	0	4
20	lah Traktor	0	0
21	lah Pabrik Rami	0	2





tidak terfasilitasi dengan sarana irigasi, masih memiliki fasilitas fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain dan partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Berikut disajikan data mengenai jumlah desa swakarya, swakarya dan swakarya di Kota Sawahlunto tahun 2011 - 2015.

**Tabel 2.73 Persentase Desa Berstatus Swakarya terhadap Total Desa di Kota Sawahlunto**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Desa Swakarya	-	-	-	-	-
2	Jumlah Desa Swakarya	27	27	27	27	27
3	Jumlah Desa Swakarya	-	-	-	-	-
4	Jumlah Desa (1+2+3)	27	27	27	27	27
5	Persentase Desa Berstatus Swakarya Terhadap Jumlah Desa (2/4 x 100)	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Dari uraian dan tabel diatas terlihat bahwa dari kurun waktu 2008 - 2012 desa yang ada di Kota Sawahlunto tidak memiliki desa yang berstatus desa swakarya hanya saja desa swakarya yang dalam proses menuju desa swakarya.

## 2.4.3 FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

### 1. Luas Wilayah Produktif

Berdasarkan data terlihat terlihat bahwa sejak 2011 luas wilayah produktif di kota Sawahlunto tidak mengalami banyak perubahan sampai tahun 2015 pada kisaran 15.330 Ha.

**Tabel 2.74 Luas Wilayah Produktif Tahun 2011-2015**

Tahun	LUAS WILAYAH PRODUKTIF (Ha)
2011	15.330
2012	15.330
2013	15.330
2014	15.330
2015	15.330

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2016

### 2. Luas Wilayah Industri

Berdasarkan data diketahui ini terlihat bahwa sejak 2008 luas wilayah industri di kota Sawahlunto tidak mengalami banyak perubahan sampai tahun 2012 pada kisaran 70 Ha.

**Tabel 2.75 Luas Wilayah Industri Tahun 2011-2015**

Tahun	Luas Wilayah Industri (Ha)
2011	70
2012	70
2013	70
2014	70
2015	70

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2016



### 3. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam mengembangkan roda perekonomian suatu daerah. Berdasarkan usahanya lembaga bank yang ada di Kota Sawahlunto terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Perkembangan lembaga perbankan di Kota Sawahlunto dari tahun 2011 sampai tahun 2014 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.76 Perkembangan Perbankan dari Tahun 2011-2018**

No.	Tahun	Jumlah bank
1.	2011	5
2.	2013	5
3.	2015	5
4.	2014	5
5.	2018	2

Sumber: Bank Indonesia Data hingga 2018

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga perbankan yang ada di Kota Sawahlunto mulai mengalami peningkatan pada tahun 2014, karena bertambahnya bank syariah disamping bank konvensional yang ada. Keberadaan lembaga perbankan di Kota Sawahlunto sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya terutama untuk pinjaman usaha.

### 4. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Sebagai sebuah kota yang bertekad pariwisata, maka yang tak kalah pentingnya adalah untuk melihat struktur pendukung industry pariwisata di Sawahlunto. Salah satu struktur pendukung tersebut adalah industry kuliner. Ketersediaan pilihan kuliner di Sawahlunto cukup beragam yang bisa dari pagi hingga tengah malam. Lokasi lokasi menarik untuk berburu kuliner ini ada hingga malam hari dimulai dari pinggir jalan lurus diantara di kawasan Muara Kahayan, Blumplang, Lapangan Sepak Bola, kawasan Kantor PTBA pusat kota hingga ke arah pinggir utara ke arah Teluk. Selain ada tempat makan sekelas Restoran di kota Sawahlunto, akan tetapi jumlah Rumah Makan cukup banyak sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 3.77 Perkembangan Rumah Makan dari Tahun 2011-2018**

Rumah Makan	2011	2012	2013	2014	2018
Jumlah Uasah	40	40	41	41	41
Jumlah Sesi	1275	1375	1226	1286	1286

Sumber: Data Profil

Akan tetapi jumlah sebagaimana table diatas hanyalah untuk rumah makan dengan definisi memiliki bangunan permanen atau semi permanen. Sedangkan untuk tempat makan jenis lain lain jumlahnya diperkirakan mencapai 200 an.

### 5. Ketersaan Terhadap RTKW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTKW) Kota Sawahlunto 2012-2032 yang memuat Pola Ruang terdiri dari Kawasan Lindung Dan Kawasan Budidaya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.78 Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya  
Kota Sawahlunto Tahun 2015**

NO	POLA RUANG	LUAS (HA)
1	Kawasan Lindung	399,86
1	Daman (lago)	306,66
2	Pantai	28,25
3	Kawasan Lindung	72,75
4	Daman	11,45
5	Perikanan	17,00
7	Perikanan Kaki Bukit	32,00
8	Perikanan	1,07 x 33
11	Kawasan Budidaya	28.110,22
1	Sawah	1.777
2	Pertanian	2.124,10
3	Perikanan Perikanan	6.802,48
4	Sawah Perikanan Perikanan	4.113,10
5	Perikanan	3.461,00
6	Perikanan Perikanan	10,74
7	Perikanan	1.11,48
8	Perikanan Perikanan Perikanan	6.000,00
9	Perikanan Perikanan	900,00
10	TPA	28,57
	<b>Total</b>	<b>27.888,00</b>

Sumber: RTRW Kota Sawahlunto

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategi operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto, meliputi :

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi:  
Desa Muara Kibuan, Kecamatan Silungpang ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan mata budaya:
  - Kawasan Kaki Lamo, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pariwisata budaya suku suku budaya;
  - Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kawasan Kiri dan Hutan, guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan kecamatan kota
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- Kawasan kandi, Kecamatan Berangin untuk pengembangan wisata

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah harus dilakukan peninjauan kembali terutama dalam proses persetujuan sebelum materi teknis oleh BAKPR.

Sustansi materi teknis dimaknai menyinkron Peta Dasar yang digunakan sehingga luas wilayah administrasi Kab/Kota harus tepat dan pasti. Pada tahun 2016 ini sedang disusun pembuat peta dasar RTRW dan pada tahun 2017 akan dilakukan peninjauan kembali RTRW 2013-2032.

## 6. Luas Wilayah Kekeringan

Wilayah kekeringan umumnya terdapat di daerah pertukukan Kecamatan Biringkang Oco dan Bulangkang Duo dan Kecamatan Barambang sebagian Talawi Gunung dan Balai Baru Sandaran serta di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan Kecamatan Talawi seperti di Bukit Gadang, Batu Tarung, Tumbuk Tengah, Balai Manung, Kumbayau, Silalang, Balai dan Ngantang Kita. Luas wilayah kekeringan ini 478,18 Ha. Genangan wilayah kekeringan terluas terdapat di Kecamatan Talawi seluas 133,65 Ha selajagi dengan dari kegiatan tambang.

## 7. Luas Wilayah Kebanjiran

Topografi wilayah kota yang ada dengan tingkat kemiringan rata-rata kelas 13-15, tidak menyebabkan terjadi banjir di suatu kawasan karena terdapat aliran air sangat tinggi, hanya ada terdapat beberapa kawasan yang tergenang disebabkan hujan sangat yang ada disekitar kawasan area lain seperti sepanjang aliran sungai Batang Lusi di Bulangkang Duo dan Bulangkang Tiga, sepanjang aliran sungai Cribum di Talawi Hill dan Ngantang. Luas wilayah tergenang hujan sangat ini 1.30 Ha yang berelungung selama 2-3 jam dari hujan lebat sehari.

## 8. Luas Wilayah Perkotaan

Wilayah perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, untuk lebih jelasnya luas wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79 Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2015

NO	NAMA WILAYAH PERKOTAAN	LUAS (Ha)	JUMLAH PENDUDUK (Juni 2015)	JUMLAH PENDUDUK (Juni 2018)
1	KECAMATAN LEMBAR SELAR		7.210	8.881
1	Pasar	0,50	1.000	1.000
2	Kampung Gembira 1 Pesisir	0,18	1.013	1.013
3	Kampung Gembira 2 Pesisir	0,17	1.160	1.161
4	Air Hitam	0,20	1.130	1.200
5	Tumbuh Lintang	0,18	1.275	1.218
6	Air Hitam	0,14	1.655	1.655
7	KECAMATAN BARABANG		8.218	7.872
1	Selatang	0,81	1.823	1.770
2	Kampung Padang	1,03	1.420	1.343
3	Dusun I	1,17	2.845	2.111
4	Dusun II	1,28	3.100	2.106
	<b>TOTAL</b>	<b>5,78</b>	<b>18.828</b>	<b>14.188</b>

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2018

Luas wilayah perkotaan hanya 0,78% atau 2,11% dari luas wilayah dengan jumlah penduduk sebanyak 14.188 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama masyarakat kota Sawahlunto masih bertumpu pada sektor pertanian yang berada di wilayah pedesaan yang mencapai 97,89% dari luas wilayah kota. Namun apabila melihat tingkat perkembangan kegiatan pemerintahan seperti, dalam belakangan ini menunjukkan bahwa kegiatan pemerintahan dan jasa sudah sangat meningkat di wilayah pinggiran perkotaan seperti Muaro Kallian, Simpang, Talawi Hill, Sijentang. Dikawatir ini penduduk pinggiran perkotaan tersebut juga sangat berpengaruh sebagai

dampak keberfalaan berbagai sektor termasuk, energi skala nasional dan pertumbuhan ekonomi lainnya.

#### 9. Persentase RT yang Menggunakan Air Bersih

Sistem penyediaan air minum yang digunakan rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi sistem perpipaan (unit air baku, unit produksi, transmisi, dan distribusi) dan sistem non-perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemauan, atau bangunan perlindungan mata air). Dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat memiliki keteguhan sikap terhadap sumber air sesuai dengan kemampuan aksesibilitasnya dan kemendaiannya sarana dan prasarannya. Selengkapinya cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum bisa dengan sistem perpipaan ataupun non perpipaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.80 Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga	14.011	13.891	14.629	14.841	14.483
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	7.004	4.755	11.703	13.380	13.680
3	Persentase	50,01	34,21	80,00	90,19	94,45

Sumber: Bappenas 2014

Proporsi rumah tangga dengan akses air bersih dengan adanya berbagai program yang telah digulirkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terus mengalami peningkatan yaitu 71,06 % tahun 2010, menjadi 90,19% pada tahun 2014. Capaian ini sudah melewati target MTK% tahun 2015 yaitu sebesar 88,5%, namun dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas masih perlu ditingkatkan agar mencapai pelayanan 100% di bidang air minum.

#### 10. Persentase RT dengan Sarana Sanitasi Layak

Kepuasan secara nasional dasar yang dimiliki oleh keluarga di Desa Sawahlutu meliputi jemban keluarga, tempat sampah dan pengaliran air limbah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.81 Persentase RT dengan Sanitasi Layak Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga	14.051	14.309	14.309	14.809	14.841
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi	9.372	9.551	9.734	9.861	11.082
3	Persentase	66,70	67,27	67,80	67,06	74,55

Sumber: BPD Kota Sawahlutu 2015

Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi dasar dengan adanya berbagai program yang telah digulirkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terus mengalami peningkatan yaitu 66,70 % di tahun 2010, meningkat menjadi 74,55% di tahun 2015. Dengan meningkatnya jumlah keluarga yang telah akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga) berdampak terhadap meningkatnya jumlah Desa / Kelurahan yang telah diyalakan sebagai Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free) / SPS (SupPLY Air Bersih Sembarangan) yang semula 2 buah di tahun 2010, menjadi 19 buah di tahun 2014 buah Desa/Kelurahan.



### 11. Basis Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan daya listrik di Kota Sawahlunto hingga saat ini disediakan oleh PT PLN dalam suatu jaringan terkoneksi pada sistem tenaga listrik Sumatera dimana termasuk didalamnya PLTU Cimahi yang berkapasitas terpasang 2 x 100 MW.

### 12. Persentase RT yang Menggunakan Listrik

Pada saat ini listrik merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemakaian listrik setiap tahunnya seperti tabel berikut.

Tabel 3.82 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2011-2016

NO	WALAM	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	14.364	14.323	14.378	14.709	14.402
2	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik (RT)	11.897	12.371	13.340	13.254	12.550
3	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	82,22	86,32	91,31	90,09	86,41

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2015

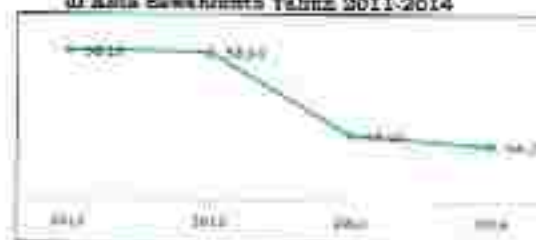
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari 82,22 pada tahun 2011 menjadi 86,41% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 0,55% rumah tangga yang belum teraliri aliran listrik.

## 3.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

### 1. Basis Ketergantungan

Basis ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berupa produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi persentase basis ketergantungan maka semakin banyak beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk tidak produktif lagi di samping membiayai dirinya sendiri. Berikut ini perkembangan basis ketergantungan penduduk 2011-2015.

Grafik 3.01 Basis Ketergantungan di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2014



Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2015

Rasio ketergantungan Kota Sawahlunto tahun 2012 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011. Jika tahun 2011 rasio ketergantungan hanya sebesar 56,12%, maka tahun 2012 meningkat menjadi 58,04%. Sertahi dengan tahun 2014, rasio ketergantungan ini cenderung mengalami penurunan, menjadi 54,28%. Dengan kata lain, setiap 100 orang yang harus kerja (dianggap produktif) di Kota Sawahlunto membantu tanggungan sebanyak 54 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

### BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

#### 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

##### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mengharuskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah Kota Sawahlunto terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana pinjaman dan sumber lainnya, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana pengisian dan perbaikan peninggalan serta pendapatan lainnya.

Pendapatan daerah Kota Sawahlunto antara tahun 2011 - 2015 mengalami pertumbuhan sebesar per tahun sebesar 0,03%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pertumbuhan sumber pendapatan yang berasal dari semua komponen pendapatan kecuali Retribusi Daerah dan Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pendapatan Hibah sebesar 52,39 %. Tahun anggaran 2011 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp. 36.382.150.723,32 dan meningkat menjadi Rp. 37.268.500.320,19 pada tahun anggaran 2015. Secara dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 0,10 %. Sedangkan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,15 %, yaitu meningkat dari Rp.271.921.930.757,00 pada tahun anggaran 2011 menjadi Rp.471.923.233.686,00 pada tahun anggaran 2015, hal ini disebabkan adanya Dana Alokasi Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Sawahlunto dimana pertumbuhan rata-ratanya sebesar 0,44 %, dimana kontribusi pertumbuhannya rata-rata berasal dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Melihat komposisi pendapatan daerah Kota Sawahlunto dana perimbangan menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah sehingga untuk kelancaran pembangunan kota sangat tergantung dari bantuan keuangan dari pusat. Untuk itu, pada masa yang akan datang harus dirapalkan bagaimana meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari potensi yang dimiliki daerah sendiri sehingga proporsi pendapatan asli daerah terhadap keseluruhan pendapatan daerah akan meningkat.

Perseimbangan realisasi pendapatan daerah dan pertumbuhan rata-rata per tahun dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.





Jumlah Peningkatan sebesar 0,07 % dimana nilai investasi jangka panjang tahun 2011 sebesar Rp. 66.010.492.289,00 menjadi Rp. 62.443.262.993,00 pada tahun 2015. Sedangkan kenaikan pertumbuhan rata-rata Aset Tetap sebesar 0,06 % dari tahun 2011 dan 2015.

Aset yang dimiliki Kota Sawahlunto menunjukkan peningkatan, yaitu dari Rp. 725.939.005.575,77 tahun anggaran 2011 menjadi Rp. 926.792.175.851,22 pada tahun anggaran 2015, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,07 %. Peningkatan ini disebabkan antara lain melalui belanja modal setiap tahunnya, peningkatan aset lancar dan peningkatan investasi jangka panjang. Namun apapun aset ini Kota Sawahlunto tidak memiliki dana cadangan karena belum dilakukan penyaliran anggaran untuk pembangunan lainnya. Sedangkan aset lainnya dalam tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 15.274.728.998 karena adanya mutasi ganti kerugian daerah Rp. 17.187.500 aset tidak berwujud Rp. 73.728.000 serta aset lain-lain Rp. 10.153.813.496.

Sesuai dengan konsep keseimbangan, pertumbuhan aset tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana. Pertumbuhan rata-rata ekuitas dana per tahun sebesar 0,03 %. Sedangkan untuk kewajiban terjadi pertumbuhan yang sangat besar yaitu dengan rata-rata per tahun sebesar 0,60 % hal ini disebabkan utang pemerintah Kota Sawahlunto kepada pemerintah pusat. Tabel 3.2 berikut menyajikan jumlah dan pertumbuhan rata-rata aset, kewajiban dan ekuitas dana.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah dan Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana**  
**Kota Sawahlunto, tahun 2011 - 2015**

Rekening	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	Pertumbuhan Rata-rata Rata
<b>ASET</b>						
Aset Lancar	79.367.787.881,00	86.133.293.821,00	84.954.378.793,00	87.018.047.471,00	87.798.811.280,00	0,05
Kas dan Setor	66.010.492.289,00	66.342.047.280,00	64.744.677.000,00	71.488.552.290,00	64.410.464.990,00	0,07
Aset Tetap	213.778.183.000,00	225.857.512.790,00	217.133.535.850,00	243.825.237.850,00	233.070.760.000,00	0,05
Aset Lainnya	-	93.473.733.850,00	97.076.165.940,00	12.504.259.330,00	10.317.586.290,00	0,28
Aset Jangka Panjang	705.895.205.555,77	785.461.906.984,00	808.230.236.960,00	1.041.106.070.960,00	900.000.179.561,22	0,06
Pembelian Tanah	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor	414.722.000,00	840.000.000,00	1.227.400.000,00	1.270.000.000,00	1.120.000.000,00	1,75
Bangunan	-	1.125.000.000,00	11.400.000.000,00	11.400.000.000,00	11.400.000.000,00	0,03
Aset Lainnya	290.752.000,00	6.275.000.000,00	20.787.832.790,00	22.228.000.000,00	22.788.476.000,00	0,40
<b>ASUTAS DANA</b>						
Dana dan Dana Lain	15.274.728.998,00	61.820.075.880,15	61.119.885.300,00	61.820.075.880,00	61.820.075.880,00	0,00
Utang Jangka Panjang	66.342.047.280,00	794.391.177.000,00	808.000.000.000,00	808.000.000.000,00	811.494.000.000,00	0,00
Utang Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
Saluran Dana	155.840.279.021,00	216.900.000.000,00	299.490.000.000,00	277.071.500.000,00	266.306.000.000,00	0,07
Saluran Dana Lain	155.840.000.000,00	216.900.000.000,00	299.490.000.000,00	277.071.500.000,00	266.306.000.000,00	0,00

Sumber Data : DPMPTSP Kota Sawahlunto

Kota memahami kemampuan keuangan Kota Sawahlunto dapat diukur melalui rasio keuangan, meliputi rasio lancar, kas rutin, rasio total utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal. Rasio lancar dan kas rutin keduanya dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah

dalam membayar hutang lainnya pada saat jatuh tempo, maka kas rasio lebih menunjukkan kemampuan di berdasarkan kas yang dimiliki. Sedangkan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio total utang terhadap ekuitas dana, sama-sama menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan seluruh kewajibannya sendirinya saat akan saat terjadi digunakan.

Berdasarkan analisis rasio lancar (current ratio), untuk tahun 2011 rasio lancar sebesar 296,50 artinya pemerintah Kota Sawahlunto mampu melunasi hutang jangka pendeknya sebanyak 296 kali pada saat jatuh tempo, 64 kali pada tahun 2012, 19 kali pada tahun 2013, 12 kali pada tahun 2014 dan 11 kali pada tahun 2015. Untuk quick ratio, rasio saat ini dapat diuraikan dengan persediaan jika kemampuan pemerintah Kota Sawahlunto dalam melunasi hutang jangka pendek pada saat jatuh tempo 277 kali pada tahun 2011, 56 kali pada tahun 2012, 17 kali pada tahun 2013, 12 kali pada tahun 2014 dan 11 kali pada tahun 2015.

Sedangkan rasio total utang terhadap total aset dan rasio total utang terhadap total ekuitas tidak sampai 1 %, artinya kewajiban pemerintah Kota Sawahlunto tidak sampai 1 % dibayangkakan dengan total aset dan total ekuitas dana, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Analisis Rasio Keuangan Kota Sawahlunto**  
**Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio lancar (current ratio)	296,50	64,32	19,88	12,00	11,22
2	Rasio quick (quick ratio)	277,82	56,40	17,47	11,75	10,18
3	Rasio total hutang terhadap aset	0,0004	0,0005	0,0029	0,0233	0,0331
4	Rasio hutang terhadap ekuitas	0,0004	0,0005	0,0282	0,0226	0,0308

Sumber Data : DPMKAD Kota Sawahlunto

## 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA LALU

### 3.2.1. Proposal Penggunaan Anggaran

Pengklasifikasi belanja berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung terdapat metode penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Pengertian anggaran berbasis kinerja adalah penggunaan anggaran berdasarkan auf out yang dihasilkan. Menurut keputusan Menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2003 yang sekarang berubah menjadi Permenpaneg Nomor 13 Tahun 2006 anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dalam era otonomi daerah diuraikan dengan pendekatan kinerja, artinya setiap anggaran yang menggunakan pendekatan hasil kinerja akan keluaran (output) dari pemerintahan adalah biaya yang telah dihasilkan. Dengan demikian diharapkan penyusunan dan pengelolaan anggaran dapat lebih dilaksanakan dengan alokasi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan. Dalam anggaran berbasis kinerja, setiap penggunaan sumber daya yang direncanakan dalam APBD harus dapat diuraikan dengan produk berupa barang atau jasa yang akan dihasilkan, kecuali untuk belanja tidak langsung yang memang tidak dapat diuraikan secara langsung dengan barang atau jasa yang dihasilkan.

Belanja Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun anggaran 2011 s.d tahun anggaran 2015 menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,11 % pada tahun anggaran 2011 realisasi jumlah belanja Rp.

384.121.822.422,00 dan pada akhir tahun anggaran 2015 menjadi Rp. 349.929.794.211,36.

Pada tahun anggaran 2011 s.d 2013, realisasi Belanja Langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Sedangkan tahun anggaran 2014 - 2015 realisasi belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung dikarenakan semakin Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung rata-rata per tahun adalah 0,06 %, yaitu dari Rp. 100.261.663.399,00 pada tahun anggaran 2011 menjadi Rp. 263.626.479.842,56 pada tahun anggaran 2015. Angka ini menunjukkan bahwa belanja tidak langsung seperti belanja pegawai untuk belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung hal ini disebabkan bertambahnya jumlah pegawai dan adanya kenaikan gaji pokok pegawai. Belanja bunga penyminahan besarnya belanja tidak langsung disamping belanja bantuan sosial. Pertumbuhan rata-rata belanja bunga dari tahun 2012 s.d 2015 sebesar 4,61 % dimana tahun 2010 sebesar Rp. 69.400.236,48 menjadi Rp. 1.419.000.739,00 tahun 2015 disebabkan pembayaran bunga hutang.

bedasarkan pertumbuhan rata-rata untuk Belanja Langsung dari tahun 2011 s.d 2015 sebesar 0,17 %. Dari tiga komponen Belanja Langsung yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, pertumbuhan rata-rata tertinggi terjadi pada belanja barang dan jasa, dimana tahun 2011 realisasi sebesar Rp. 73.173.977.162,00 menjadi Rp. 349.985.497.999,00 pada tahun 2015. Sehingga pertumbuhan rata-ratanya sebesar 0,35 %, 0,30 % untuk belanja modal dan 0,10 % untuk belanja pegawai.

Dari pengalasan diatas terlihat pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu anggaran untuk belanja pegawai yang meliputi gaji pegawai, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah, serta memperhitungkan kewajiban dalam dalam belanja tidak langsung lainnya seperti belanja tagg. hasil kepada Pemerintah Desa, belanja bantuan kesehatan, belanja tidak langsung dan sebagainya. Selain itu juga harus memperhatikan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menunjang tugasnya masing-masing seperti biaya alat tulis kantor, listrik, air, telepon, biaya rapat, koordinasi, honorarium non PNS, pemeliharaan peralatan, pemeliharaan kendaraan dinas dan lain-lain sejenisnya yang dalam penganggarnya harus memperhatikan tingkat efisiensi, seperti terlihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Belanja**  
**Kota Sawahlunto, tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata Rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	100.261.663.399,00	100.261.663.399,00	100.261.663.399,00	100.261.663.399,00	100.261.663.399,00	0,06
1	Belanja Pegawai	249.801.095.171,75	249.801.095.171,75	249.801.095.171,75	249.801.095.171,75	249.801.095.171,75	0,00
2	Belanja Modal	49.490.236,48	49.490.236,48	49.490.236,48	49.490.236,48	49.490.236,48	0,00
3	Belanja Barang dan Jasa	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
4	Belanja Hibah	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
5	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
6	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
7	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
8	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
9	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
10	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
11	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
12	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
13	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
14	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
15	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
16	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
17	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
18	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
19	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
20	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
21	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
22	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
23	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
24	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
25	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
26	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
27	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
28	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
29	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
30	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
31	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
32	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
33	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
34	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
35	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
36	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
37	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
38	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
39	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
40	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
41	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
42	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
43	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
44	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
45	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
46	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
47	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
48	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
49	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
50	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
51	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
52	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
53	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
54	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
55	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
56	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
57	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
58	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
59	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
60	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
61	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
62	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
63	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
64	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
65	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
66	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
67	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
68	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
69	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
70	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
71	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
72	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
73	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
74	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
75	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
76	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
77	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
78	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
79	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
80	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
81	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
82	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
83	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
84	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
85	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
86	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
87	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
88	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
89	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
90	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	0,06
91	Belanja Bantuan Sosial	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77	1.052.368.990,77</	



No	Kode	Ta. 2011	Ta. 2012	Ta. 2013	Ta. 2014	Ta. 2015	Persentase Rata-rata Tahun (%)
1	BELANJA OPERASI	174.017.241.000,00	174.017.241.000,00	174.017.241.000,00	174.017.241.000,00	174.017.241.000,00	100
2	Total Belanja	174.017.241.000,00	174.017.241.000,00	174.017.241.000,00	174.017.241.000,00	174.017.241.000,00	100
3	Saldo Awal					14.381.000.000,00	
4	Saldo Akhir					14.381.000.000,00	

Keterangan: Data / DPMKPD Kota Sawahlunto

Pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksudkan untuk mengetahui jumlah belanja untuk aparatur, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, termasuk belanja untuk anggota DPRD dan Kepala Daerah serta belanja modal yang diperuntukkan bagi aparatur. Dengan tinggi alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur berarti semakin banyak dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan kebijakan belanja yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kurun waktu 2011 - 2015, sehingga belanja aparatur menunjukkan kecenderungan yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat pada realisasi belanja untuk aparatur sebesar Rp. 305.330.012.888,00 pada tahun 2011 menjadi Rp. 374.017.241.000,00 pada tahun 2015 atau terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 5,16 %.

Peningkatan terbesar untuk belanja aparatur ini terutama pada belanja gaji dan tunjangan belanja tidak langsung, hal ini sebagaimana tercermin dalam terjadi karena adanya kenaikan gaji pokok pegawai serta penambahan pegawai baru. Sedangkan pada belanja langsung peningkatan terbesar terjadi pada belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dan belanja modal.

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sawahlunto**  
**Tahun 2011 - 2015**

No	Kode	Ta. 2011	Ta. 2012	Ta. 2013	Ta. 2014	Ta. 2015	Persentase Rata-rata Tahun (%)
1	BELANJA Gaji dan Tunjangan	133.836.000.000,00	133.836.000.000,00		133.836.000.000,00	133.836.000.000,00	100
2	BELANJA Perjalanan Dinas	100.145.891.000,00	100.145.891.000,00		100.145.891.000,00	100.145.891.000,00	100
3	BELANJA Belanja Modal	40.035.350.000,00	40.035.350.000,00		40.035.350.000,00	40.035.350.000,00	100
4	BELANJA Belanja Tidak Langsung	0	0		0	0	0
5	BELANJA Belanja Pegawai	34.035.350.000,00	34.035.350.000,00		34.035.350.000,00	34.035.350.000,00	100
6	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
7	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
8	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
9	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
10	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
11	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
12	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
13	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
14	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
15	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
16	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
17	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
18	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
19	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0
20	BELANJA Belanja Pegawai	0	0		0	0	0



No	Uraian	Tk 2011	Tk 2012	Tk 2013	Tk 2014	Tk 2015	Persentase Berkas Kena (%)
6	Saluran transmisi tenaga listrik 150 kV & lebih	1.000.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	200.000.000,00	20,00
7	Saluran transmisi tenaga listrik 110 kV & lebih	50.000.000,00	100.000.000,00	-	2.400.000.000,00	200.000.000,00	4,00
8	Saluran transmisi tenaga listrik 66 kV & lebih	12.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2,00
9	Saluran transmisi tenaga listrik 33 kV & lebih	-	-	-	-	-	-
10	Saluran transmisi tenaga listrik 15 kV & lebih	10.000.000,00	10.000.000,00	-	400.000.000,00	10.000.000,00	0,00
11	Saluran transmisi tenaga listrik 10 kV & lebih	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	22.000.000.000,00	2,00
Total		200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	-	200.000.000.000,00	270.000.000.000,00	0,00

Sumber Data : DPMKAD Kota Sawahlunto

Berdasarkan hasil pengelompokan data perbandingan antara belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja sebagai acuan penurunan proposal belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2011 - 2015, pada tahun 2011 proposal belanja pemenuhan kebutuhan aparatur adalah 57,35 % turun menjadi 45,83 % pada tahun 2015.

Dari analisis tabel (Data Supel) dijumpai bahwa jumlah dana yang dapat digunakan untuk memperlakukan pembiayaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terbatas. Dengan terbatasnya kemampuan produksi daerah, perlu diupayakan terjadinya pemerataan antar sektor, efisiensi penggunaan sumber daya, penyusunan sumber daya dan satuan harga, rasionalisasi berbagai program dan kegiatan yang lebih difokuskan tercapainya sesuai dengan prioritas.

Tabel 3.6  
Proposal Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  
Kota Sawahlunto Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Belanja	Persentase
1	Tahun anggaran 2011	100.000.000.000,00	350.000.000.000,00	57,35
2	Tahun anggaran 2012	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	50,00
3	Tahun anggaran 2013	-	400.000.000.000,00	-
4	Tahun anggaran 2014	200.000.000.000,00	400.000.000.000,00	50,00
5	Tahun anggaran 2015	200.000.000.000,00	450.000.000.000,00	44,44

Sumber Data : DPMKAD Kota Sawahlunto

### 3.3.3. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 5 ayat 3 undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pembiayaan termasuk dari sisi lebih perhitungan anggaran daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan pembiayaan kebutuhan dana pada masa datang.



pengeluaran pribadi wada dan mengalar serta prioritas utama terlewat pada belanja non langsung, gaji dan tunjangan, belanja domes dan kepala daerah, belanja korpas, bagi hasil serta belanja langsung, belanja perumahan PSE karena untuk guru dan tenaga mada, belanja kesehatan pendidikan PSE dan belanja jasa umum.

Hasil perhitungan pengeluaran periode waktu dan material serta prinsipnya sama menunjukkan jumlah yang sama yaitu Rp. 129.343.854.861,50 pada tahun 2011 dan meningkat sebesar Rp. 171.153.401.128,00 pada tahun 2015. Hal ini berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan konsumsi per tahun sebesar 0,02 %, mengesampingkan inflasi pada tahun 2010 dan awal 2011.

Tabel 2.5  
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prinsipas Utama  
Kota Sorohluanto, tahun 2011 - 2012

[illegible]

### 3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Proses meningkatnya penghasilan wajib dan mengikat ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah. Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi yang dapat dipungut bersifat wajib, artinya pemerintah daerah tidak diharuskan membayar kebajikan untuk mendapatkan jenis pajak dan retribusi daerah selain dari apa yang telah digantikan oleh undang-undang tersebut. Dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru ada objek pendapatan asli daerah yang baru dan ada juga yang dihapus. Namun bagi Kota Sawahlunto dengan terlaksananya undang-undang tersebut dapat menambah jumlah PAD, namun mengakibatkan pengurangan pendapatan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena ada sumber pendapatan daerah yang pada awalnya merupakan pajak pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui Dana Bagi Hasil yang jumlahnya cukup besar menjadi pajak daerah yang potensi daerah sangat kecil seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tabel 3.9 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2018

No	Jenis	Proyeksi		
		Ta. 2013	Ta. 2017	Ta. 2018
A	Pendapatan Asli Daerah	89.198.174.888,00	68.600.261.804	71.558.871.094
1	Pajak Daerah	4.816.739.080,00	3.288.180.804	5.817.965.600,00
2	Retribusi Daerah	2.331.888.888	3.654.275.800	4.315.702.248
3	Hasil Pengalokasian Bantuan Daerah yang dihentikan	10.128.388.208	11.174.281.864	12.391.611.372
4	Saldo dari Pendapatan PAD Daerah yang ada	69.948.249.600	64.934.174.240	69.427.891.216
B	Dana Perimbangan	894.881.681.243	910.814.880.948	971.946.888.812
1	Dana Bagi Hasil Pajak	37.104.325.816	41.333.058.160	47.346.888.816
2	Dana Alokasi Umum	380.281.476.183	428.475.323.713	462.533.076.088
3	Dana Alokasi Khusus	118.798.812.867	128.874.929.562	151.217.322.561
4	Dana Alokasi Lain	19.896.811.000	30.230.912.108	22.298.888.810
5	Saldo dari Pendapatan Daerah yang ada	35.891.088.588	29.886.184.188	31.738.213.588
6	Saldo	3.568.000.000	3.568.000.000	3.568.000.000
7	Dana Daerah	-	-	-
8	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya	20.981.889.480	33.886.081.760	38.170.234.72
9	Dana Pengalokasian dari Gubernur Utama	-	-	-
10	Hartanah koruptif dan Pengalokasian pemerintah daerah lainnya	2.568.248.000	30.077.080	30.077.080
11	Pendapatan Lainnya	38.080.000.00	30.000.00	30.000.00



No	Sumber	Rendahnya		
		TA 2016	TA 2017	TA 2018
	RENTAN	640,548,942,378.00	704,108,606,606.00	774,898,420,187.00

Sumber : Data Guben RPJMD Kota Sawahlunto

Dari segi biaya daerah, selama periode tahun 2011 - 2015, pajak daerah mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 18,28 %. Walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan relative sedikit dan diperkirakan akan meningkat cukup signifikan pada tahun 2016 karena Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014 akan diadopsi menjadi pajak daerah, disamping akan meningkatnya pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan karena semakin meningkatnya kunjungan wisata ke Sawahlunto.

Penerimaan retribusi daerah, selama periode 2011 - 2015 meskipun secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang negatif, namun sebaliknya tetap mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan semenjak tahun 2011 pendapatan dari RSUD yang dicatat sebagai retribusi daerah diadopsikan menjadi pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, karena adanya perubahan status RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Walaupun retribusi daerah ini tetap akan mengalami peningkatan terutama yang akan mengalami peningkatan yang cukup besar adalah Retribusi Pelayanan Pasar khususnya pasar Sawahlunto yaitu mulai dioperasionalkannya pasar Sawahlunto tahun 2014.

Untuk Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah yang dipisahkan selama periode 2011-2015 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 24,82 %. Peningkatan ini disebabkan karena semakin besarnya kontribusi Bank Negeri serta bagian laba dari PT WWS yang diterima. Kedepan penerimaan Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (arah) akan mengalami peningkatan dengan ditambahnya penyertaan modal pemerintah Kota Sawahlunto ke Bank Negeri serta semakin besarnya kontribusi PT WWS dan diperlebarkan kedepan Hotel Parui yang merupakan aset daerah juga akan memperoleh keuntungan sehingga akan ada bagian laba yang akan diperoleh pemerintah daerah.

Sedangkan untuk lain-lain PAD yang Sah selama periode 2011 - 2015 mengalami peningkatan dan kedepan akan tetap meningkat. Khusus untuk insentif PNS tidak lagi ada insentif mulai tahun 2014 yang tentunya akan mengurangi Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2014 tersebut dari tahun itu akan tetap mengalami peningkatan terutama untuk penerimaan bunga dan BLUD RSUD Sawahlunto.

Selanjutnya terhadap Dana Perimbangan, untuk Dana Bagi Hasil Pajak selama periode 2011 - 2015 hanya meningkat rata-rata sebesar 0,60 %. Walaupun peningkatan ini disebabkan karena tidak adanya lagi dana bagi hasil BPHTP sejak berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2009. Sedangkan untuk dana Bagi Hasil Pajak mengalami rata-rata peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan terutama karena adanya peningkatan penerimaan royalti terutama Untuk kedepan dana bagi hasil hasil dan bahan pajak ini tetap meningkat, namun peningkatan ini masih kecil karena semakin berkurangnya produksi terutama di Sawahlunto.

Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) selama periode 2011 - 2015 mengalami peningkatan sebesar 10,36 % per tahun sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan sebesar 7,82%. Untuk kedepan pertumbuhan DAU dan DAK diperkirakan sama dengan tahun-tahun sebelumnya ataupun tidak ada perubahan kelanjutannya dari Pemerintah Pusat.

**Tabel 3.10**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016-2018**

No	Urutan	2016	2017	2018
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>306,510,598,541.34</b>	<b>314,172,848,443.37</b>	<b>322,097,189,552.42</b>
1	Belanja Pegawai	296,300,038,801.31	292,016,764,771.37	298,272,382,800.66
2	Belanja Bunga	1,800,000,000	1,387,000,000.00	1,375,000,000.00
3	Belanja Subsidi	3	0	0
4	Belanja Hibah	7,422,772,500	7,815,081,612.00	7,000,000,000.00
5	Belanja Bantuan Sosial	100,000,000	100,000,000.00	100,000,000.00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak, Pembiayaan/Keselamatan dan Pemertuaan Desa	652,480,190	877,217,184.00	1,001,750,114.11
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemertuaan Desa	29,844,804,200	60,001,424,474.00	62,472,110,200.00
8	Belanja Tidak Terduga	720,000,000	720,750,000.00	787,500,750.00
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>401,076,719,815</b>	<b>412,100,887,810.38</b>	<b>421,381,008,798.48</b>
	<b>Total Belanja</b>	<b>707,587,318,356.34</b>	<b>726,273,736,253.75</b>	<b>743,478,198,350.90</b>
<b>C</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>15,250,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>15,000,000,000</b>
	Pembiayaan Modal	15,250,000,000	10,000,000,000	15,000,000,000
	<b>TOTAL</b>	<b>722,837,318,356.34</b>	<b>736,273,736,253.75</b>	<b>758,478,198,350.90</b>

Sumber : Data Olahan BPPKAD Kota Sawahlunto

Tabel 3.11 memperlihatkan proyeksi belanja daerah selama periode 2016-2018.Sesuai dengan asumsi proyeksi pendapatan, maka proyeksi belanja tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran untuk mencairkan belanja tersebut. Pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar 7% sampai dengan 8%. Asumsi selanjutnya dan berdasarkan pengaliran selama periode 2011-2015, terdapat kecenderungan pertumbuhan belanja tidak langsung dengan belanja langsung, sehingga belanja modal terutama untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan terus-bias meningkat.



### Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah (Penerimaan dan Pengeluaran)

Arah kebijakan pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah adalah tertibnya debitur belanja daerah agar cukup tersedia dana untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Berbagai upaya mengurangi defisit belanja adalah pemanfaatan dana lebih signifikan tahun sebelumnya, kalau perlu dilakukan penjualan aset daerah dan menerima pinjaman daerah maupun menarik kembali dana pinjaman dan piutang daerah yang beredar dimasyarakat maupun dundi usaha lainnya serta penerimaan kembali penyertaan modal investasi daerah.

Seiring dengan arah kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal daerah pada berbagai Badan Usaha melalui kaitan yang berorientasi pada keuntungan dengan memisahkan pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang diharapkan adalah kerja dan kegiatan usaha masyarakat baik di hulu maupun di hilir menciptakan lapangan kerja dan pendapatan apabila telah mencapai masa breakeven point).

**Tabel 3.11 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016-2018**

NO	URAIAN	2016	2017	2018
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
	Sisa Laba Perusahaan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SLP)	82.312.202.499,00	84.808.418.154,00	87.388.381.382,00
	Penerimaan Dana Cadangan / Darurat	-	-	-
	Hasil Penjualan aset tetap Daerah yang dimiliki	-	-	-
	Penerimaan Hasil penjualan Revisi	11.830.000.000,00	11.830.000.000,00	11.830.000.000,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
	Penerimaan Kredit Investasi Non Pembiayaan Daerah	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>94.142.202.499,00</b>	<b>96.638.418.154,00</b>	<b>99.218.381.382,00</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
	Pembayaran Dana cadangan / Darurat	-	-	-
	Pembayaran Modal Investasi Daerah	11.380.000.000,00	11.380.000.000,00	11.380.000.000,00
	Pembayaran Pinjaman, Hutang	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
	Pembayaran Pinjaman Daerah	-	-	-
	Pembayaran Utang Maju	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.480.000.000,00</b>	<b>12.480.000.000,00</b>	<b>12.480.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan netto</b>	<b>81.662.202.499,00</b>	<b>84.158.418.154,00</b>	<b>86.738.381.382,00</b>
	<b>SLPA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Monev SPPEAD Kota Banjarmasin

### 3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas (B) keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicatat Kota Samudra dalam periode 2011 - 2013 serta perubahan peraturan yang berlaku khususnya dengan keluarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelembagaan dan Reformasi Desentral.

Berdasarkan realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun sebelumnya, serta dengan memperhitungkan dampak pembangunan antara nasional dan regional Sumatera Barat, proyeksi pengeluaran daerah Kota Samudra tetap akan mengalami kenaikan dalam Tiga tahun kedepan. Berdasarkan hasil analisis pengeluaran wajib dan mengikat tersebut dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.12 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Samudra Tahun 2016-2018

NO	URAIAN	2016	2017	2018
<b>A</b>	<b>BELANJA UTAMA LARGEMING</b>	<b>182.829.819.470</b>	<b>188.280.797.487</b>	<b>179.787.074.262</b>
1	Belanja Bagi dan Timbangan, wajib Penghasilan	126.577.195.754	128.344.130.681	124.987.738.827
2	Belanja Pembiayaan Anggaka dan Program APBD serta Operasional APBD	1.341.300.000	1.479.280.000	1.510.280.000
3	Belanja Bangga	1.431.590.328	1.491.280.286	1.420.649.213
4	Belanja Bagi Hasil	4.854.130.205	3.277.080.230	6.384.028.230
<b>B</b>	<b>BELANJA LARGEMING</b>	<b>12.057.200.462.12</b>	<b>19.489.489.014.78</b>	<b>18.319.999.880.81</b>
1	Belanja honorarium PNS dan honorarium guru dan tenaga kependidikan			-
2	Belanja belanja modal lainnya	97.577.000.000	95.809.275.000	102.304.800.000
3	Belanja jasa kontrak (konsultansi, layanan dukungan kontrak seperti bank, telepon, dan lain sebagainya)	14.592.647.455.12	15.221.840.026.42	15.717.180.780.44
4	Belanja sewa gedung yang telah ada untuk kegiatan pemerintahan			-
<b>C</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
1	Pembiayaan dari cadangan			-
2	Pembiayaan dari pinjaman			-
	<b>Jumlah</b>	<b>177.886.741.092.28</b>	<b>188.056.418.471.48</b>	<b>186.877.074.733.22</b>

Sumber : Data Ombudsman BPKP/KB Kota Samudra



Berdasarkan hasil analisis pengelompokan nilai dan mengklasifikasi lima tahun kedepan terlihat pengeluaran yang terbesar masih didominasi oleh belanja tidak langsung. Akan tetapi, melihat perkembangan jumlah pegawai yang sudah relatif tetap, angka ini diproyeksikan menurun karena meningkat kebutuhan pemerintah pusat dalam membayar gaji PNS. Untuk belanja anggota DPRD dan kepala daerah terangkai dalam ini disebabkan meningkatnya semua harga kebutuhan untuk kepala daerah dan anggota DPRD di daerah. Selain itu, belanja barang dan belanja hasil juga akan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

## BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

### 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

#### 4.1.1. Penguatan Nilai-nilai Agama dan Adat

Kedudukan agama, mental dan kepribadian masyarakat perlu diberikan perhatian lebih untuk mengantisipasi dampak negatif dari pengaruh informasi dan aktivitas pariwisata. Terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat akan menjadi hambatan utama dalam membangun daerah Sasak-Sasak yang memiliki signifikan etnik pesisir, suku-suku, kepercayaan/ kepercayaan dan adat. Karakter dari suku-suku, berbudaya langsung dengan sikap moral dan etnik masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama, etnik suku dan adat istiadat kedalam proses pembelajaran formal dan informal, baik di rumah warga maupun di sekolah. Terjadi musti pembiasaan nilai-nilai agama dan budaya untuk segera diterapkan. Selain itu, dimunculkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam penerapan dan aplikasi nilai-nilai agama, etnik suku dan adat istiadat dalam kehidupan.

#### 4.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita

Perkembangan Kota Sawahlunto menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,41%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebesar 0,00%. Potensi pada masing-masing sektor bisa dikembangkan secara optimal dan terkoordinasi jika akan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga akan membuka lapangan kerja.

PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2015 adalah sebesar Rp.45.270.000,-. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 34.410.000,- pada tahun 2015. Angka ini menjadi indikator bahwa penduduk Kota Sawahlunto secara rata-rata sudah lebih baik tingkat kehidupannya dibandingkan dengan rata-rata masyarakat Sumatera Barat.

#### 4.1.3. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya akses rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pemenuhan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Perangaiangan kemiskinan tetap dijadikan isu strategis dalam pembangunan Kota Sawahlunto. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2015, maka tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto sangat rendah dengan kisaran 1,33%. Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto sebesar 2,33%, yang merupakan tingkat kemiskinan terendah dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Sumatera Barat dan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya mengaitkan perkembangan penduduk miskin juga meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat sehingga kondisi kemiskinan akan dapat segera dikurangi. Upaya dilakukan untuk pengalokasian anggaran penduduk miskin dalam pembangunan sosial dan ekonomi seperti penyediaan beasiswa untuk kalangan keluarga miskin, margin keluarga miskin tetap berproduksi dan mandiri.

kegiatan kesehatan dan peningkatan pendapatan penduduk melalui ke-monev-ke address. Selain menjamin pelayanan, keluarga mulai juga dipersiapkan untuk memiliki tabeahan cadangan waktu dan berusaha lebih, saat bertransaksi pada keluarga ini untuk memudahkan keluarga secara jawa.

Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Anggaran Kerja (TPAK) Kota Sawahlunto serta sebesar 65,50%, meskipun lebih tinggi dibanding TPAN Subkota Deras serta 66,19% merupakan persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan Kota Sawahlunto untuk meningkatkannya ke depan. Pengangguran yang tinggi akan berdampak terhadap resiko ketergantungan semakin tinggi. Di samping itu pengangguran yang tinggi juga akan menimbulkan tingkat investasi. Hal ini perlu diantisipasi dengan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

#### 4.1.4 Pendidikan Karakter, Kelembagaan dan Berwawasan Global

Pembangunan manusia harus selaras antara intelektual (kepala), keterampilan, dan karakter. Untuk meningkatkan pembangunan pendidikan di Kota Sawahlunto, harus diintegrasikan aspek, nilai-nilai moral, akhlak mulia, budi pekerti ke dalam setiap proses pembelajaran yang mendukung. Fokusatif pendidikan karakter adalah melahirkan karakter peserta didik yang bertadab pekerti, ketas dan peraya diri. Pendidikan karakter adalah upaya penanaman keyakinan batin peserta didik yang berdimensi agama, sosial, budaya, yang mampu mengaitkan dalam bentuk budi pekerti, baik dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, maupun kepribadian. Pendidikan karakter yang juga melahirkan rasa berprestasi yang tinggi yang diarah dari budaya Alam Minangkabau dan Agama Wawasan global menjadi tuntutan agar peserta didik memiliki peraya diri yang tinggi, dan memiliki kemampuan dan moral dalam kehidupan global. Dalam pembangunan jangka menengah ini, pendidikan berakhlak dijadikan salah satu strategi yang perlu diperhatikan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Jarak, ada pergeseran urusan pemerintahan, dimana urusan pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkrit, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pendidikan Menengah yang semula ini menjadi kewenangan Pemerintah Kota dengan dilaksanakannya Undang-undang ini beres menjadi kewenangan Provinsi, sehingga seluruh pendidikan, sarana dan sarana prasarana menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, hal ini tentu akan berdampak juga terhadap pelaksanaan dana pendidikan pada Pemerintah Kota Sawahlunto.

Melahirkan tenaga terampil menjadikan kota dengan anak muda lebih kreatif, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Upaya untuk mendukung pasar modal menjadi salah kepastian yang mendeak, akan menghasilkan tenaga terampil, namun juga menghasilkan produk-produk daerah yang berkualitas.

#### 4.1.5 Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih, sehat dan berkeadilan

Ketersediaan masyarakat Kota Sawahlunto yang sebagian besar masih tinggal di Kawasan Pedesaan perlu mendapatkan perhatian terhadap penanganan kebersihannya. Kebersihan akan lahir dari permasalahan hidup secara teratur, penggunaan toilet, air bersih, serta kesehatan lingkungan yang terbagun. Persepsi akan hidup bersih yang diiringi dengan perilaku tingkat individu terapan bersih adalah sangat menentukan ukur. Selain itu, kesadaran untuk bersih juga akan dijadikan ini strategi dalam pembangunan jangka menengah ini. Jwa dan pikiran yang sehat akan mempengaruhi produktivitas

menikmati dalam bekerja. Dilengkapi dengan adanya budaya olah raga yang kuat di tengah masyarakat, rasa kebersamaan dan sportivitas akan menjadi salah satu karakter masyarakat Kota Sawahlunto.

#### 4.1.6 Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Sawahlunto, kualitas kesehatan tidak dapat dikesampingkan. Angka harapan hidup masyarakat Kota Sawahlunto yang tergolong di Sumatera Barat harus selalu dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Pelayanan kesehatan akan diperorientasikan pada peningkatan kualitas pelayanan mulai dari perencanaan keluarga "pre natal care", melahirkan dan pasca melahirkan. Pelayanan kesehatan dasar mengadopsi prinsip pelayanan kuratif, preventif dan promotif. Dengan meningkatkan pelayanan kesehatan berdampak pada berdirangnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Pelayanan rumah sakit juga menjamin kenyamanan, keamanan, dan kenyamanan yang menyedikan suasana pelayanan kepada pasien dengan sempurna. Upaya peningkatan pelayanan ini dimulai dari peningkatan tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan jaminan ketersediaan kesehatan yang dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### 4.1.7 Pelestarian Seni dan Budaya Daerah

Upaya pelestarian seni dan budaya daerah akan mendapatkan perhatian khusus dalam pemanfaatan jangka panjang Kota Sawahlunto. Pelestarian awal dengan identifikasi sejarah, pengumpulan bukti-bukti, pengembangan museum etnografi, dan melindungi semua itu sebagai rumah dikembangkan ke dalam bentuk bentukan yang paling lengkap. Karena hal ini akan berimplikasi langsung dengan pencapaian target visi kota menjadi kota wisata tameng yang berbudaya. Keberadaan budaya akan dikembangkan akan terus dilestarikan dengan memberikan ruang khusus dalam pengembangan budaya. Lem. Pelestarian kuliner, pakaian adat, pidato pamambahan, randai dan paku manik akan digalakan untuk mempromosikan pelestarian adat dan budaya daerah. Selain itu, koordinator wayang golek, wayang orang, Reok dan Judo Lampung juga akan digalakan untuk menampilkan keberagaman style yang tetap harmonis di Kota Sawahlunto.

#### 4.1.8 Peran serta Pemuda dalam pembangunan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembangunan yang berkelanjutan adalah kesiapan generasi muda untuk menerima tanggung jawab pembangunan. Keberadaan pemuda yang kreatif dan inovatif akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa dan Kelurahan. Pembinaan kelompok pemuda yang direalisasi menjadi lebih produktif dan proaktif dalam pembangunan. Pemerintah perlu mengarahkan semangat dan pikiran inovatif dari generasi muda dalam membangun daerahnya. Dapat berupa pembinaan pusat inovasi daerah. Selain dari itu juga diharapkan meminimalkan peredaran narkoba, mengurangi eksploitasi sumber pembangunan berupa lingkungan dengan menjaga alamnya. Dilakukan, dengan adanya pemuda muda yang baik, keberagaman pembangunan di Kota Sawahlunto tidak akan terpisahkan antar pemuda.

#### 4.1.9 Penyediaan infrastruktur dasar yang bermutu dan terjangkau lingkungan

Dalam mewujudkan visi Kota menjadi Kota Wisata pada tahun 2020, infrastruktur menjadi modal utama pencapaiannya. Infrastruktur yang berkualitas akan menjadi jaminan kenyamanan beraktivitas masyarakat utamanya



pengaspalan Kota Sawahlunto. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, drainase dan saluran air bersih akan disiapkan pada standar Kota Paripurna Nasional. Penyelidikan kualitas yang menjadikan Kota Wana Sejati serta pendayagunaan menjadi tempat wisata atau sawahlunto via kota, termasuk peningkatan bangunan untuk museum sejarah, penguatan dokumen sejarah, kawasan, fasilitas parkir, toilet dan pusat pemerintahan yang baik. Selain itu, pendayagunaan akan juga ke daerah terluar juga akan dilakukan via strategi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai infrastruktur dasar yang merupakan kewajiban dalam pemerintah daerah.

#### **4.1.10 Kualitas Lingkungan Hidup**

Peningkatan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya melalui aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Tanpa perhatian kualitas lingkungan hidup yang baik, kemampuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Karena peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan isu strategis yang juga sangat penting dalam proses pembangunan Kota Sawahlunto. Termasuk dalam penguatan eksploitasi sumberdaya alam, penguatan pemerataan usaha, energi dan limbah.

#### **4.1.11 Penguatan Keastaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Penguatan sumber daya manusia tidak terlepas dari isu keastaraan gender, penguatan perempuan dan perlindungan anak. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak maka dibutuhkan kesetaraan terhadap akses, partisipasi, kontrol serta manfaat dalam bidang pembangunan. Upaya perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan masih belum optimal, untuk itu penguatan kebijakan P2TP3A sangat penting dalam rangka promosi kesetaraan, lapangan, penyediaan alternatif (pencegahan), kuratif (perawatan), rehabilitasi (pemulihan/pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan).

#### **4.1.12 Rilis Investasi yang Kondusif**

Dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah, salah satu usaha Pemerintah Kota Sawahlunto dengan meningkatkan pembangunan dan membangun kembali daerah di bidang investasi atau penguatan modal yang diliris oleh beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah menurut aspek permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Hal ini dibutuhkan keberanian dari pihak swasta untuk pengembangan usaha dan perkembangan di Kota Sawahlunto, karena tidak terbatas dalam skala besar akan tetapi pemberdayaan juga diperlukan masyarakat untuk berusaha akan selalu diperlukan untuk mewujudkan hal ini kemudahan perizinan dan fasilitas investor dalam berusaha akan terus diusahakan. Hal ini juga yang kondusif menjadi strategi untuk menarik investasi di Kota Sawahlunto, akan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah juga melakukan penyertaan modal pada beberapa lembaga keuangan daerah lainnya.

#### **4.1.13 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

Salah satu strategis lainnya yang juga menentukan keberlanjutan pembangunan di Kota Sawahlunto adalah penataan tata kelola pemerintahan yang baik. Meratanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus diliputi dengan memberikan pelayanan yang optimal, penguatan pemerintah yang bersih, inovatif

dan profesional. Karena itu, konsep Good Governance and Good Government dan pemerintahan harus dijadikan prioritas dalam melaksanakan birokrasi pemerintahan ini.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari hardware dan software. Hardware dapat berupa komputer, laptop/notebook dilengkapi dengan perangkat pendukungnya seperti printer, jaringan, modem, LAN dan lain-lain. Sedangkan software adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan.

Sejalan instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Teknologi Elektronik Government (E-Government) merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi-selak integrasi organisasi serta membebaskan jejaring dalam manajemen dan proses kerja yang memungkinkan internal pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transportasi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Untuk itu, kelengkapan beberapa faktor pendukung penerapan teknologi informasi berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penempatan stakeholder lainnya.

Selain memfasilitasi pelayanan publik yang terintegrasi, Pemerintah Kota Sawahlunto juga perlu memperhatikan masalah penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas seperti yang diamanatkan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2013-2014, sehingga dapat memberikan pelayanan yang bebas korupsi, jujur dan transparan, optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabilitas, keterbukaan informasi kepada publik dan menjaga strategi pelaksanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

#### 4.1.14 Kelembagaan dan Perputakaan

Pusat dan kearsipan yang berdasarkan web menjadi isu strategi yang penting dalam lima tahun kedepan. Ketersediaan arsip yang memadai akan meningkatkan aktifitas pegawai dalam bekerja. Penguasaan teknologi informasi yang dimiliki dapat juga akan mempengaruhi minat pengunjung ke pustaka, sehingga menjamin terdapatnya bahan bacaan pada perpustakaan adalah salah satu aspek yang menuntut kerjasama kepatif dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan dipertahankan pembangunan Pustaka dan Arsip Daerah yang berbasis internet dan Web. Diharapkan ketertarikan masyarakat akan buku dan budaya membaca akan terus terjaga karena dengan budaya membaca masyarakat akan melahirkan generasi muda yang berprestasi dan tinggi.

#### 4.1.15 Penguatan Kelembagaan yang Terintegrasi dengan Pemerintahan Kota

Sektor pemerintahan akan tetap dijadikan isu strategi dalam pembangunan jangka menengah daerah. Dengan menyadari dunia pemerintahan dengan daerah lain di Sumatera Barat dan Nasional dibutuhkan konsep dan perencanaan yang matang dalam pembangunan sektor pemerintahan Kota Sawahlunto. Pemerintahan harus dijadikan prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan di Kota Sawahlunto secara fisik dan non fisik. Keunggulan partisipasi

dengan konsep budaya tabung bambu yang tumbuh pada Kota Sawahluntah harus dimanfaatkan dengan lebih luas untuk wisata rekreasi.

#### 4.1.15 Produk Industri kecil dan menengah yang bermutu dan berdaya saing

Dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh, peran industri kecil dan menengah harus ditingkatkan. Pada daerah berkembang Kota Sawahluntah, sektor industri yang berkembang (hidroponik dan industri kecil dan Menengah yang bernilai tambah tinggi. Kelurahan Bangor, Siliwangi, Kerupuk Kubang dan Mayak Berek yang perlu mendapat perhatian lebih mengingat keterpaduannya dengan sektor pariwisata dan dapat menyentuh langsung ekonomi masyarakat Kota Sawahluntah. Produk kerajinan rumah tangga perlu diidentifikasi lagi, dikembangkan inovasinya, dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan dari produk UMKI lokal yang ada.

#### 4.1.17 Pengalihan Kewenangan Urusan

Dengan ditemukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, terdapat beberapa urusan yang dialihkan kewenangannya dari kewenangan daerah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat (sesuai lampiran). Adapun urusan pemerintah provinsi tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan:

- a. Pengelolaan pendidikan menengah;
- b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
- d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan ketetapan Perhutani;
- g. Pelaksanaan metrologi legal barang, jasa, alat ukur dan pengemasan;
- h. Pengelolaan tenaga penguji KIR/pelugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian nasional; dan
- k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana pelayanan tenaga listrik untuk berkembang daerah terpencil dan perdesaan.

Pengalihan urusan dimaksudkan merupakan pada pengalihan personal, pemilikan, sarana dan prasarana serta dokumen (PID). Untuk menghindari dampak penyelenggaraan pemerintah daerah yang berakibat terbentunya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang terkait pelayanan kepada masyarakat (mas dan masif yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan PID, tetap dilaksanakan oleh pejabat/stasiun pemerintahan yang saat ini menjalankan urusan pemerintahan kabupaten tersebut sampai dengan berakhirnya PID.

## 4.2. ISU STRATEGIS

### 4.2.1 Urusan Wajib Pendidikan

Pemastian pembangunan pada urusan pendidikan adalah masih terdapat angka tidak melanjutkan hingga tingkat SMA dan perguruan tinggi, sehingga upaya untuk meningkatkan kelompok anak tidak terlayani dalam pendidikan menjadi keharusan. Selain dari itu kualitas pendidikan masih terwujud pada seluruh sekolah dan jenjang pendidikan. Kurangnya mutu guru perlu dilakukan tengah pembinaan guru yang komprehensif, peningkatan keimanan dan profesional, pembinaan manajemen sekolah, penerapan Alat dan media pembelajaran di sekolah (juga secara sekolah belum memiliki GPM) juga menjadi



permasalahan di bidang pendidikan ini. Dari segi kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan Pra-PAUD dan PAUD belum memenuhi standar SI yang ditetapkan pemerintah. Hal ini berakibat kepada rendahnya kecakapan pendiik dan pengajar Pra-PAUD dan PAUD. Untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga yang telah mempunyai kualifikasi pendidik juga masih rendah. Keberadaan sekolah Unggulan (U) juga diwujudkan per pemerataan untuk seluruh jenjang pendidikan. Berbagai permasalahan tersebut, jika tidak diantisipasi secara serius, akan menyebabkan penurunan kualitas pendidikan.

#### 4.2.2 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Kendalanya literatis dan kualitas sumber daya manusia seperti tenaga pemberdayaan masyarakat menjadi kendala yang berarti dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Sawahlunto. Kapasitas kelembagaan Pengerahmahan Gender (PG) dan pemberdayaan perempuan belum optimal. Juga menjadi kendala dalam pemberdayaan perempuan. Maka untuk menjamin pemenuhan hak anak pemerintah daerah mendukung kebijakan nasional, dalam pengimplementasian kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya menarik minat/motivasi Kota Layak Anak yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

#### 4.2.3 Urusan Wajib Kesehatan

Pemenuhan kesehatan dan sosial di kota Sawahlunto terdapat pada pelayanan prima belum dapat dilaksanakan dengan baik karena lokasi geografis kurang mendukung. Selain itu, permasalahan kesehatan masyarakat untuk berpacu hidup bersih dan sehat relatif rendah. Hal ini terdapat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit menular. Masih banyaknya SPAL masyarakat yang belum memiliki akses dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang glis sediaan, higienis dan sanitasi. Untuk masalah tenaga kesehatan jumlah Dokter Spesialis masih belum lengkap dan adanya kualitas kurangnya SPAL. Masalah sarana kesehatan terlihat dari Sistem/Instansi pengolahan limbah dan air belum memadai, akses air bersih kurang lancar, dan terbanyaknya sarung dan prosedur pendukung pelayanan kesehatan.

Selain ketersediaan tenaga membangun sistem yang mudah untuk bidang kesehatan dan sosial merupakan hal yang akan ini dapat dengan mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukannya. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan penyulutan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kedarifatan dan darurat. Selanjutnya, pemenuhan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu terus menerus ditingkatkan.

#### 4.2.4 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada urusan pekerjaan umum, belum semua ruas jalan dalam kondisi mantap dan belum memiliki standar pembangunan infrastruktur secara komprehensif yang diperlukan oleh masyarakat serta kurangnya partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Instansi Pengolahan Limbah Tinja juga belum optimal secara kuantitas. Sistem pengolahan sampah di TPA cenderung open dumping dengan sarana prosedur kurang memadai menyebabkan Pelayanan pemampasan belum terjangkau pada semua masyarakat. Pemetaan kepastian pelayanan PU untuk semua tujuan wisata serta kualitas produknya merupakan hal yang penting dan ini ini ditunjang dengan perbaikan masyarakat sadar wisata.



Pengelolaan Sumber Daya Air juga masih mengalami permasalahan. Standar pelayanan air minum belum memenuhi syarat kesehatan ditambah lagi dengan masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola Air Minum serta keterbatasan ketermampuan air di rumah rumah dan ketersediaan sumber air lain. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyak pembangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata lingkungan dan lingkungan.

Dari segi pemerintahan, cakupan pelayanan ruang masih ada yang belum menjadi produk hukum. SDM pelayanan ruang masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Partisipasi masyarakat dalam peraturan ruang masih rendah karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peraturan ruang. Ketersediaan masyarakat untuk mengurus perizinan wilayah berdasarkan perundang-undangan masih rendah. Semua hal ini menjadi hambatan yang dalam pengelolaan ruang di Kota Sawahlunto.

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman untuk pembangunan bidang air minum dan sanitasi, sebagaimana amanat RPJMN 2015-2019 pembangunan bidang air minum dan sanitasi harus mencapai skor 100% capaian air minum, 75% kawasan umum dan regional skor minimal 100%, dalam rangka pencapaian universal access pada tahun 2019.

#### 4.2.3 Urutan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman padat dan tidak teratur pada parcel kota dan sub parcel kota menjadi permasalahan utama dalam pembangunan perumahan di Kota Sawahlunto. Pada permukiman masih belum sesuai dengan peruntukkan penggunaan lahan disebabkan belum ada regulasi penataan kawasan perumahan. Saat ini masih terdapat housing perumahan yang tidak layak huni. Selain itu, seluruh pemodelan tanah untuk perumahan karena tanah banyak dikuasai oleh kuasa perusahaan PT.BA dan PT.KA. Selain itu, penggunaan tanah adalah tanah ulayat yang menyulitkan pihak swasta berinvestasi di sektor perumahan.

#### 4.2.5 Urutan Wajib Perhubungan

Salah satu permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh Kota Sawahlunto adalah aksesibilitas transportasi yang belum merata, dimana masih banyak bagian wilayah yang belum tercapai oleh pelayanan transportasi. Tempat parkir umum terbatas dibatasi dengan kebutuhan masyarakat. Masih kurangnya sarana dan prasarana (suasana seperti belum adanya terminal Tipe A di Kota Sawahlunto). Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perhubungan Kota juga menjadi permasalahan dalam pembangunan Kota. Dari segi masyarakat terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana lalu lintas. Topografi wilayah rawan banjir juga menjadi permasalahan dalam menghubungkan sektor perhubungan di Kota Sawahlunto.

#### 4.2.7 Urutan Wajib Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan di sektor lingkungan hidup terlihat dari penurunan kualitas air sungai, permasalahan lingkungan sekitar aktivitas industri dan pertambangan serta dampak pemanasan global semakin meningkat. Kurangnya SDM pengelola lingkungan hidup ditambah lagi dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup juga menjadi permasalahan dalam pembangunan lingkungan hidup di Kota Sawahlunto. Peta pembangunan daerah kawasan hijau dan proses penanaman kembali daerah kritis menjadi sangat strategis untuk masa depan Kota Sawahlunto.

#### 4.2.8 Urusan Wajib Pertanahan

Uraian urusan pertanahan, artinya pembebasan tanah masyarakat menjadi permasalahan utama dalam pembangunan. Kepemilikan tanah rakyat yang tidak jelas, sering terjadinya konflik tanah ulayat. Permasalahan tegal batas dengan tanah ulayat juga menjadi permasalahan rutin yang semakin dapat diselesaikan secara teoretis. Upaya mengatasi permasalahan tanah, dan masalah penyelesaiannya akan berdampak kepada pemetaan kepemilikan tanah di kemudian hari.

#### 4.2.9 Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan pembangunan pendudukan terlihat dari Kualitas SDM Aparatur pengelola SIUK masih rendah. Partisipasi masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang rendah, menyebabkan belum lengkapnya pemetaan SIUK online di Kota Sawahlunto. Pengembangan sistem layanan dan pengalihan fungsi menjadi perlu dalam mengatasi masalah ini.

#### 4.2.10 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kebudayaan masyarakat masih etnis yang hidup berdampingan dan masih menjaga khasanah budaya gotong royong akan diadopsi kekuatan dalam pembangunan Kota Sawahlunto. Membangun energi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat akan tetap diprioritaskan. Kaderisasi LPM, kelompok Masyarakat, Karang Taruna dan tokoh masyarakat akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

#### 4.2.11 Urusan Wajib Tenaga Kerja

Masalah ketenaga kerjaan masih menjadi permasalahan pembangunan di Kota Sawahlunto. Walaupun tidak signifikan, permasalahan tenaga fungsional ketenagakerjaan juga menjadi hambatan dalam pelayanan ketenagakerjaan. Kualitas pencari kerja yang sampai belum memadai dan terbatasnya jumlah permintaan tenaga kerja dari dunia usaha menyebabkan kesempatan kerja di Kota Sawahlunto relatif rendah.

Sawahlunto dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan melalui dengan memobil dan mengorganisasikan berbagai jenis keterampilan bersertifikasi. Melalui pemenuhan sekolah kejuruan, sekolah menengah, Dinas Tenaga Kerja dapat membangun sistem yang memperhatikan dunia pemakai, dengan pencari kerja. Dari segi pelayanan, sistem informasi dan data ketenagakerjaan belum optimal serta rendahnya transparansi penerimaan tenaga kerja juga beberapa hal yang perlu difahami.

#### 4.2.12 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Sistem komunikasi dan informasi Kota Sawahlunto masih terbatas sarana dan prasarana teknologi informasi yang belum memadai. Sistem informasi manajemen yang tersebar pun belum dimanfaatkan secara optimal. Urungan desa, masih adanya jaringan internet yang belum terjangkau ke desa. Pengembangan Komunikasi dan Informatika di web dan dengan metode lainnya di luar untuk memantapkan Sawahlunto perlu dibenahi, selain juga sistem pelayanan untuk jasa produksi. Permasalahannya antara lain:

- Koordinasi antar instansi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi masih lemah, hal ini dapat dilibat dengan adanya koneksi internet

yang dilakukan oleh masing-masing instansi padahal beberapa instansi menggunakan data yang sama;

- Aplikasi yang sama atau saling keterkaitan dikembangkan oleh masing-masing instansi seperti pengawalan, keuangan, kesehatan dan pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa integrasi infrastruktur, aplikasi dan data belum terbestik;
- Penguatan dan pemanfaatan hasil studi/pemilihan sebagai dasar penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah;
- Pemanfaatan Iptek dan IT di masyarakat masih kurang;
- Pemanfaatan teknologi dan informasi oleh berbagai lembaga untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal.

#### 4.2.12. Urusan Wajib Keperawatan, Usaha Kecil dan Menengah

Pemaksimalan pembangunan di sektor Keperawatan dan UMKM Masih rendahnya kualitas SDM pekerja UMKM dalam berinovasi dan pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan kualitas produk UMKM yang dihasilkan belum memenuhi standar nasional. Selain itu, Tingkat ketergantungan sektor ini terhadap pemerintah yang tinggi. Kemampuan pengelola koperasi dan partisipasi aktif anggota koperasi dan UMKM juga belum maksimal.

#### 4.2.14. Urusan Wajib Penanaman Modal

Pemaksimalan pembangunan untuk penanaman modal utamanya adalah belum adanya kebebasan investor mengenai penanaman modal yang menjadi daya tarik investor, terbatasnya potensi daerah untuk menarik investor, kurangnya kesadaran investor untuk menghis investasi yang kompeten berwujud prestasi organisasi dan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kebijakan yang mengatur pengembangan BUMD dan belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.

#### 4.2.15. Urusan Wajib Kebudayaan

Dalam upaya pelestarian nilai budaya daerah, budaya luar yang memberikan pengaruh negatif terhadap budaya daerah menyebabkan budaya yang berakut bag Kota Sawahlunto. Hal ini ikut mempengaruhi apresiasi masyarakat terhadap budaya dan seni daerah. Dari segi etnik misalnya, permasalahan masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan adat mulai berkurang sehingga perlu penguatan pendidikan berkeadilan yang tepat.

#### 4.2.16. Urusan Wajib Kepemufahan dan Olah Raga

Belum terbangunnya sistem keolahragaan di sekolah-sekolah merupakan akar masalah rendahnya minat berolah raga. Belum juga terbetasnya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan olahraga menjadi permasalahan utama dalam pengembangan keolahragaan di Kota Sawahlunto. Selain itu, belum optimalnya pembinaan dan pengelolaan kelembagaan pemuda dan olahraga juga menghambat perkembangan keolahragaan di Kota Sawahlunto. Dengan begitu dari adanya media sosial dan IT terhadap generasi muda semakin berkembangnya nilai keolahragaan dan semangat going beyond.

#### 4.2.17. Urusan Wajib Pangan

Itu dilihat dari ketersediaan pangan, ketersediaan pangan lokal Kota Sawahlunto melalui dari konsumsi per kapita per tahun untuk ketahanan pangan. Harga sayur dan buah saat ini sedang. Sedangkan untuk ketersediaan pangan utama telur ayam dan ikan darat belum memenuhi sehingga Kota Sawahlunto menjadi ketergantungan pasokan pangan dari daerah tetangga. Selain itu, harga komoditas pangan fluktuatif dan belum berkembangnya industri pangan berbasis



kegiatan dengan waktu untuk mendukung pengimplementasian kawasan pangan juga merupakan permasalahan yang harus dibenahi dalam membangun ketahanan pangan Kota Sawahlunto.

#### 4.3.18 Urutan Wajib Statistik

Sistem pengolahan data yang masih manual menjadi tantangan utama dalam urutan statistik ini. Akibatnya, belum ada dokumen data yang terverifikasi dan dapat diakses secara online dalam waktu singkat. Dari segi penyediaan data, keterbatasan terhadap pihak SPN tidak dapat dihindari. Akibat terdapat masalah lain yang muncul adalah adanya perbedaan metode penghitungan data antara SPN dan pemerintah daerah.

#### 4.3.19 Urutan Wajib Perputakaan

Untuk pengembangan lapangan dan dukungan dibutuhkan solusi untuk mengatasi rendahnya minat dan fasilitas dalam mengatasi kearpipan dan perpustakaan. Kurangnya kualitas pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang kearpipan dan perpustakaan ditambah lagi kurangnya buku-buku referensi dengan kebutuhan pengguna menyebabkan kurangnya minat pengunjung ke pustaka. Untuk aspek pemerintah daerah, kurangnya kesadaran/bertutuk SOPD terhadap pentingnya pengelolaan arsip/dokumen mengakibatkan penanganan arsip daerah menjadi terkendala.

#### 4.3.20 Ruang Penumpang

- **Perencanaan Pembangunan**  
Permasalahan dalam perencanaan pembangunan secara garis besar adalah ada tiga hal pertama, kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten serta UGDA tidak ada antara lembaga pemerintah pusat. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang konsisten dan sinkron antar SKPD. Kedua, masih rendahnya pemahaman antar SKPD dalam menyusun perencanaan yang konsisten dan sinkron dengan SKPD lainnya. Ketiga adalah rendahnya jumlah dan kualitas SDM perencana. Perencanaan ini menyebabkan proses perencanaan dari awal sampai selesai perencanaan tidak berjalan dengan baik.  
**Keteruan Ruang dan Penanggulangan Kemiskinan Daerah**  
Amalan memahami bahwa pembangunan diarahkan masyarakat menjadi permasalahan utama dalam pengembangan kawasan pembangunan saat ini. Akibatnya terjadi ketegangan terhadap potensi konflik sosial. Di bidang politik, rendahnya pemahaman peraturan di bidang politik di tingkat masyarakat juga masih merupakan permasalahan yang harus diatasi. Sedangkan dalam masalah penanganan kemiskinan, sistem kondisi penanganan kemiskinan masih seadanya dan belum memiliki dukungan kongresional. Hal ini penting lainnya adalah belum terdapatnya sistem dan teknologi informasi dalam mendukung penanganan kemiskinan. Sehingga aparat sipil dan militer dalam urusan penanganan kemiskinan masih perlu ditingkatkan.
- **Optimasi Daerah**  
Dalam pelaksanaan urusan daerah, masalahnya Pendapahan Adh Daerah terhadap kemampuan daerah menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Akibatnya keterbatasan kemampuan daerah terhadap urusan pemerintah tingkat. Dari segi kompetensi pegawai, mutu dan profesionalisme aparat masih perlu ditingkatkan.
- **Dasar strategi pembangunan nasional yang dipaparkan dalam RPJMN 2015-2019**  
Dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memajukan Negeri Kita melalui tiga aksi, yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Negeri Kita



tersebut merupakan rangkaian program-program yang termuat dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang direfleksikan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yaitu: 1) norma pembangunan, 2) tiga dimensi pembangunan, 3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung, serta 4) program-program quick win. Dapat dilihat permasalahan dalam permasalahan reformasi birokrasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam rangka mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, diantaranya:

1. Mengembangkan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronika dan internet berbasis optimal.
2. Efisiensi, sinergitas, akuntabilitas dan harmonisasi dalam kerjasama antara pemerintahan dirasa belum optimal. Kerjasama yang dilakukan masih terbatas terutama dengan kabupaten/kota yang berbatasan.
3. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, opatuk sipil negara, perangkat daerah dan anggota masyarakat. Inovasi ini masih sedikit dan belum optimal.
4. Pemerintah Daerah wajib menyebarkan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi lingkungan daerah. Informasi pembangunan daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah yang wajib mengumumkan kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah ini belum maksimal.

#### 4.2.31 Urutan Pilihan Pertanian

Untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian jangka panjang, masalah lain fungsi lahan pertanian menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Dari potensi daerah yang belum tergarap, masih ada lahan pertanian yang belum tergarap. Dari segi petani, rendahnya kemampuan dan keterampilan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian juga mengakibatkan kualitas meningkatkan kualitas pertanian di Kota Sawahlunto. Pola pikir masyarakat terutama generasi muda yang menjadikan petani merupakan pekerjaan kurang bergengsi juga menjadi penyebab di masa depan. Dari segi pengolahan pasca panen, industri pengolahan hasil pertanian di Kota Sawahlunto relatif minim.

#### 4.2.32 Urutan Pilihan Pariwisata

Permasalahan pariwisata Kota Sawahlunto lebih mengarah pada permasalahan yang sudah ada. Saat ini, belum ada sistemasi besar pengembangan pariwisata sehingga daya tarik wisata belum termanfaatkan. Hal lain yang juga sangat berpengaruh adalah belum ada penjabaran rinci dan teknis dari kebijakan pariwisata yang ada. Dari segi sarana pemerting, ketersediaan sarana transportasi umum menjadi permasalahan bagi pengunjung. Dari segi pemasaran potensi pariwisata yang ada, kualitas still rendah dan arahan tepat guna bagi pemerting lahan belum terlayani menyebarkan investor pariwisata belum optimal Kota Sawahlunto.

#### 4.2.33 Urutan Pilihan Relentasi dan Perikanan

Perikanan mangrove merupakan prioritas di Kota Sawahlunto. Akan tetapi, jika dikelola dengan baik, dapat dijadikan salah satu alternatif pendapatan masyarakat. Permasalahan yang ada saat ini adalah produksi bertani dan masih rendah dan Volume air tidak mencukupi untuk budidaya perikanan. Dari segi pelayanannya, Kualitas SDM yang masih kurang menjadi hambatan dalam

pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Saat ini, Harga pokok jasa di Kota Sawahlunto juga relatif mahal.

#### 4.2.24. **Uraian Pilihan Perdagangan**

Kelebihan dalam pengembangan perdagangan di Kota Sawahlunto adalah ketersediaan jasa barang kurang beragam dan harga relatif tinggi. Penentuan harga komoditas dan aliansi perdagangan menjadi kata kunci ke depan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal salah satunya keberadaan pedagang grosir belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kelelahan usaha dan meror ngumpas seperti ini rumah penduduk juga menjadi ancaman dalam pengembangan perdagangan di Kota Sawahlunto. Hal ini berdampak pada perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja. Dari segi sarana dan prasarana, bangunan pasar baru sudah menyediakan untuk pasar kebutuhan pedagang, akan tetapi perlu diperhatikan juga sarana pendukung pasar tersebut.

#### 4.2.25. **Uraian Pilihan Perindustrian**

Kemudahan yang ditawarkan dalam membangun sektor industri di Kota Sawahlunto adalah kemudahan teknis, kemudahan pengembangan bisnis, serta kemampuan manajemen pengjin dan pelaku UKM kecil hingga skala menengah. Selain itu, dari segi sarana dan prasarana Kemandanya memiliki teknologi dan pemisahan pendukung proses produksi yang dimiliki pengjin dan pelaku UKM. Peningkatan bahan baku lokal yang belum maksimal juga akan menyebabkan penduduknya untuk pindah ekspansi untuk sektor industri di Kota Sawahlunto. Belum adanya pusat inovasi bagi industri dan belum adanya regulasi dan kebijakan dukungan kepada pengjin dan pelaku UKM terutama dalam hal pendirian dapat menyebabkan berkembangnya minat masyarakat untuk mengembangkan industri.

### 4.3. KETERIKATAN DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mandiri serta komitmen dalam sistem pemerintahan pembangunan lainnya, maka arah kebijakan RPMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan sebagai berikut:

#### 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto

##### 1. Struktur Ruang

###### A. Momen Sistem Pelayanan Kota

Unit-unit utama yang diadopsi dalam penentuan pusat struktur pelayanan kota, meliputi: pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan.

###### 1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) terdiri atas:

- a. Kawasan perikanan ditempatkan di Kandih dan Kota Lama;
- b. Kawasan perdagangan dan jasa regional di Muara Kalabau dan
- c. Kawasan Pusat Pemerintahan ditempatkan di Kibiki dan Sijulang.

###### 2. Subpusat Pelayanan Kota (SPK)

SD: Pusat Pelayanan Kota ditempatkan di setiap ibukota kecamatan mempunyai fungsi sebagai pelayanan perdagangan, kesehatan, pemerintahan, perdagangan, jasa, tempat wisata, serta kecamatan, pengembangan sub-kecamatan, jasa layanan dan pengembangan agribisnis, wisata dan pelayanan pendukung lainnya yang mempunyai skala pelayanan tingkat kota dan tingkat kecamatan.

###### 3. Pusat Lingkungan (PL)

Sistem pasar lingkungan yang diharapkan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan meliputi post pemerintahan ketertarikan dan daya.

## B. Sistem Jaringan

### 1. Sistem Jaringan Fisik/infra Utama Kota

Berbasis Sistem Jaringan Jalan

Sistem lingkungan jalan terdiri atas jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder dan lokal.

- Jaringan jalan arteri primer menghubungkan Padang-Bukit-Mangkajene-Muara Kelantan Sawahlunto - Kota Muara Bahau (Provinsi Jambi).
- Jaringan jalan kolektor primer, menghubungkan Kota Sawahlunto dengan Kabupaten/Kota sekitar.
- Jaringan jalan kolektor sekunder menghubungkan antara kecamatan di dalam wilayah Kota Sawahlunto.
- Jaringan jalan lokal menghubungkan sub pusat pelayanan hingga seluruh desa/kelurahan di dalam kota.

Jaringan Prasarana Lintas Lintas Dan Angkutan Jalan

Rencana tipe terminal di Kota Sawahlunto antara lain sebagai berikut:

- Terminal penumpang tipe B direncanakan di Muara Kelantan, Kecamatan Bihanglang.
- Terminal penumpang tipe C, direncanakan di Talawi Hilir Kecamatan Talawi.
- Mengembangkan Terminal barang direncanakan di Desa Sijantang Kota Kecamatan Talawi dan Desa Muara Kelantan, Kecamatan Bihanglang.

### 2. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem prasarana lainnya meliputi:

- Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan: Sistem jaringan energi merupakan sistem jaringan kelistrikan jaringan tenaga listrik yang meliputi pembangkit listrik dan jaringan transmisi listrik. Pembangkit tenaga listrik meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sijantang Kecamatan Talawi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan listrik Sumatera Barat. Dengan grid tidak di Sijantang Kecamatan Talawi.
- Sistem Jaringan Telekomunikasi: Jaringan telekomunikasi di Kota Sawahlunto semakin pesat berkembang, terutama jasa telekomunikasi dari telepon selular. Untuk beberapa daerah masih membutuhkan untuk jasa telekomunikasi jaringan Telkom, karena permasalahan sinyal yang lemah di permukaan di pedesaan. Penggunaan telepon selular yang semakin tinggi mengakibatkan meningkatnya jumlah sarana telekomunikasi. Dalam pembangunan sarana telekomunikasi dilayani berdasarkan dalam sarana-sarana dan listrik memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia. Pemeliharaan dan pembangunan sistem telepon baru dan membangun juga Transmisi System (TTS) sistem sarana berwujud ditugaskan di Kecamatan Lendah Bagan, Kecamatan Bihanglang dan Kecamatan Talawi.
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air: Pengembangan sumber daya air dilakukan untuk memenuhi penyediaan kebutuhan sumber air baku untuk penyediaan air bersih, pengairan pertanian/irigasi, kegiatan budidaya lainnya dan pemeliharaan sumber-sumber air dan kesehatan lingkungan. Untuk meningkatkan produktivitas sistem yang potensial, maka perlu direncanakan peningkatan kapasitas penyediaan air baku untuk beberapa instalasi pengolahan

air (IPA) yang ada dan menambahkan beberapa (PA, dengan berbagai metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat antara lain adalah :

- Peningkatan kapasitas (PA Tahan)
- Menjaga kualitas dan kuantitas sumber air baku yang sudah ada
- Menyeleksi sumber air baku pada daerah yang sulit dijangkau oleh sistem jaringan distribusi yang ada.
- Membangun embung yang berfungsi untuk menampung air.

### 5. Sistem Infrastruktur Perumahan

Sistem jaringan infrastruktur perkotaan meliputi:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum: Sistem penyediaan air minum meliputi jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan, ditetapkan di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Hiluhilung, Kecamatan Talam, Kecamatan Barangan dan Kecamatan Lumbah Segar.
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah:
  - Air Limbah Domestik: sistem pengolahan air limbah sebagai alternatif sesuai individual (agregat rumah pada kawasan kawasan yang belum memiliki sistem terpusat. Sistem pengolahan air limbah terpusat diberikan sesuai individu melalui jaringan pengumpul dan diolah serta diuang seras terpusat untuk rencana kawasan, perlu pemertanian di kolam, kawasan perumahan Kandi, kawasan perikanan dan jasa, kawasan perumahan dan kawasan permukiman padat. Sedangkan PAI terpusat diberikan industri di Kecamatan Barangan.
  - Air Limbah Industri: Sistem pengolahan limbah industri dilakukan dengan sistem pengolahan air limbah setempat.
  - Air Limbah Baku: Berdasarkan Peraturan (B3): Sistem pengolahan air limbah B3 dilakukan secara tersendiri oleh pihak penghasil limbah B3 dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sistem Persampahan: Pengelolaan sistem persampahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Rencana pengembangan sistem persampahan untuk kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:
  - Sistem persampahan terdiri dari Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
  - Tempat Penampungan Sementara (TPS) berupa tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pengolahan ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu, dengan lokasi pada setiap unit lingkungan permukiman dan perusahaan/industri. Ditetapkan di setiap desa/kelurahan.
  - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berupa tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengurangan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, ditetapkan di setiap pusat lingkungan/ atau kelurahan kecamatan atau kawasan seluas 500-1.000 m<sup>2</sup>.
  - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa tempat untuk penanganan dan mengembalikannya sampah ke media lingkungan secara aman, baik manusia dan lingkungan, ditetapkan di Kota Sawahlunto Kecamatan Barangan.
  - METODA pengolahan sampah di TPA dengan menggunakan metode controlled landfill pada tahap 5 tahun pertama dan dilanjutkan dengan metoda sanitary landfill.



- d. Sistem Drainase: Dengan kondisi topografi Kota yang bergelombang dan berbukit, proses aliran air hujan cenderung cepat. Jika kondisi ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan banjir yang mengganggu keamanan masyarakat kota yang cukup luas dan merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan jasa. Jaringan primer merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir di Wilayah Sungai Indragiri. Jaringan drainase primer dan sekunder ditetapkan dengan menggunakan pendekatan DDB-D&G pada masing-masing kecamatan.
- e. Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Jaringan Jalur Pejalan Kaki: Sistem sirkulasi pejalan kaki merupakan sistem yang harus diperhatikan, mengingat kebermatan pembentukan kawasan yang hidup dan berkembang. Sistem sirkulasi pejalan kaki dibentuk sepanjang koridor, berorientasi dengan jalan arteri. Dimensi yang direkomendasikan untuk kawasan perkotaan lebar 2 - 4 m. Perencanaan dan pemantauan prasarana dan sarana jaringan jalur pejalan kaki ditetapkan disepanjang jalan arteri primer, sekunder, primer dan di area kota lama, pusat pemerintahan, kawasan wisata budaya, rencana pengembangan perdagangan regional Muang Sekeloa dan di antara industri kecil di Kecamatan Blungkong khusus untuk kawasan kota lama lebar ruang pejalan kaki minimal 1 - 1,2 m. Diharuskan dengan lebar ini, tidak saja jalur pejalan kaki, namun juga bagi yang akan bersepeda. Luasan khusus pejalan kaki berada di jalan-jalan di Kota Lama.
- f. Jalur Evakuasi Bencana: Jalur evakuasi bencana bertujuan sebagai penyediaan ruang yang dapat digunakan sebagai tempat berlindung dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana. Jalur evakuasi bencana meliputi *sempa sempa jalur keluar* dan *matang paku/ sempa berkesangul* baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan. Jalur keluar ditetapkan di jalan-jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder.
- g. Sistem Pemisahan Kehakatan: Sistem pemisahan kehakatan kota perlu dilakukan studi lebih lanjut dalam skema Rencana Induk Sistem Pemisahan Kehakatan (RISPK) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

## II. POLA RUANG

Pola ruang wilayah Kota Sawahlunto terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

### 1. Rencana Kawasan Lindung

#### a. Hutan Lindung

Hutan lindung terdapat di Kecamatan Lembeh Segar dan Kecamatan Blungkong dengan luas kurang lebih 88,31 (delapan puluh delapan lima tiga satu) hektar.

#### b. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat di Kota Sawahlunto meliputi sempadan sungai, perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air.

#### c. Ruang Terbuka Hijau

Kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau (Kawasan Lindung Kota Sawahlunto sesuai standar UU No. 26 Tahun 2007: 30% dari 27.348 Ha = 8.205,5 Ha. Kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau (Kawasan MUIH) Kota Sawahlunto sesuai standar UU No. 26 Tahun 2007: 10% dari 27.348 Ha = 2.734,8 Ha.

#### d. Kawasan Cagar budaya

Kawasan Cagar budaya di Kota Sawahlunto dapat dibagi dengan beberapa kategori:

- Kawasan Kota Lama, pada kawasan ini terdapat beberapa pusat kawasan yang memiliki karakter yang berbeda dari segi fungsi maupun bentuk kawasan
- Situs/ruas Heritage, situs/ruas yang terinspirasi dari kawasan kota lama dimana keberadaan objek tersebut memiliki nilai-nilai sejarah dan pengembangannya harus diperhatikan. Sehingga tersebar di seluruh pulau Kota Sawahlunto
- e. Kawasan taman berbudaya yang meliputi kawasan hutan tanah longgar.  
Kawasan taman berbudaya alam di Kota Sawahlunto meliputi kawasan hutan dasar ditetapih, kawasan hutan, kawasan kawasan Kolak, Sikalang, Durian I, Durian II dan Kelurahan Lohang Perang, tanah longgar dan erosi ditetapih di Terasak Bawah, Vahmahan Durian I, Durian II, di sekitar Batang Gredub, Lumindan, Lumbi Bunt, Lumbi Tindu dan Kibung Tengah.
- 2. Rencana Kawasan Budidaya  
Kawasan budidaya yang terdapat di Kota Sawahlunto terdiri atas:
  - a. kawasan pertukaran perumahan, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan dengan kepadatan rendah.
  - b. kawasan pertukaran pertambangan dan juga, terdiri atas pusat perdagangan, pusat pemerintahan dan lain modern
  - c. kawasan pertukaran pemerintahan, terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta
  - d. kawasan pertukaran industri, meliputi industri rumah tangga/ kecil dan industri menengah dan industri berbasis sumberdaya alam
  - e. kawasan pertukaran pariwisata untuk menampung kegiatan pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata lainnya
  - f. kawasan ruang terbuka untuk hijau terdiri dari pemukiman umum, plaza, dan tempat parkir
  - g. kawasan ruang evakuasi bencana
  - h. kawasan pertukaran ruang bagi kegiatan sektor informal
  - i. kawasan pertukaran lainnya yang meliputi kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan kawasan hutan produksi.
- 3. Rencana Pembangunan Angkutan Perang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025
  - a. Visi RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025  
Visi Kota Sawahlunto mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota yaitu "Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya". Visi pembangunan jangka panjang pada dasarnya merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Saat kondisi dimana pada tahun 2020 Kota Sawahlunto adalah Kota Wisata Tambang yang Berbudaya dimana kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat Kota Sawahlunto dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata dengan karakteristik unik, wisata rekreasi dan wisata lainnya.
  - b. Misi RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025  
Misi merupakan upaya utama yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Kota Sawahlunto tersebut yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh) tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:
    - Misi 1: memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tingkat-tengah masyarakat  
Mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat yang baik tidak terjerus dari nurutun dan perintah dari agama dan kepercayaan masing-masing. Kehidupan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai beragama

akan menciptakan iklim investasi yang tinggi untuk semua. Hal ini sejalan dengan filosofi pembangunan yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat yaitu "Arah Basuki Brata, Brata Basuki Kintamani".

- Misi 2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan umum:  
Tupak utama dan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia serta dibuktikan dengan, secara berkesinambungan untuk meningkatkan iklim masyarakat dalam mengembangkan berbagai macam usaha. Semua itu harus didukung oleh pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance) yang merupakan prasyarat penting untuk dapat mewujudkan upaya pembangunan daerah yang terarah, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Misi 3. Mengembangkan objek wisata tambang  
Kota Sawahlunto memiliki keindahan alam, nilai budaya dan budaya yang spesifik sehingga mempunyai daya tarik tersendiri yang menarik dalam setiap objek wisata yang memiliki nilai historis wisata yang tumbuh dan berkembang budaya masyarakat serta yang ada. Daya tarik daerah yang memiliki hasil dapat dimanfaatkan oleh Kota Sawahlunto untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera Barat dengan wisata tambang dan budaya dengan objek di kawasan.
- Misi 4. Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.  
Pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto didukung oleh berbagai sektor baik pendidikan, pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, hiburan, olahraga, kuliner maupun seni lainnya.

### 3. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Profil pembangunan nasional yang dirumuskan ke dalam 3 Dimensi Pembangunan yaitu sebagai berikut:

- a. Dimensi Pembangunan Manusia, terdiri dari:
  - 1) Pendidikan
  - 2) Kesehatan
  - 3) Pertumbuhan
  - 4) Mental/Karakter
- b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan terdiri dari:
  - 1) Keadayaan Pangan
  - 2) Keadayaan Energi dan Kelangkaan
  - 3) Kemiskinan dan Kesenjangan
  - 4) Partisipasi dan Inklusif
- c. Dimensi Demokrasi dan Kewarganegaraan, terdiri dari:
  - 1) Arus Kelompok Pendukung
  - 2) Antar Wilayah, Desa, Pembangunan Luar Jawa dan Kawasan Timur.

### 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah: Terwujudnya Sumatera Barat yang Mandiri dan Sejahtera. Sumatera Barat Mandiri adalah suatu masyarakat yang berperiode tinggi dan maju yang berbudaya pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang utuh yang utuh dan bermartabat. Sumatera Barat sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dan pemerintahan atau keamanan tidak terganggu baik secara fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, pemerintahan



dan kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; tercapainya hubungan antar masyarakat yang adil, saling menghormati, bantu membantu, saling pengertian serta intensifnya pelayanan dan sarana untuk bermitra dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang memadai, nyaman dan kepedulian dengan baik.

b. Misi RPJMD Provinsi Sumatera (tahun 2016-2021)

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berkeadilan berdasarkan Pancasila "Adil, Beradab, Agamis, Berkeadilan" (ABAB)
- 2) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, berprestasi dan berkeadilan tinggi
- 4) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

3. RPJMD Kabupaten/Kota Tawangs

a. RPJMD Kabupaten Solok

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, dengan Visi pembangunan Kabupaten Solok untuk lima tahun kedepan yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Melalui Kehidupan Masyarakat yang Madani dalam Rangka Adil, Beradab, Agamis, Berkeadilan". Untuk mewujudkan visi tersebut maka pemerintahan ini yang diikut untuk dipedomani dalam mewujudkan misi tersebut sebagai berikut:

- Misi 1 : Memantapkan program Wajib Belajar 12 Tahun
- Misi 2 : Meningkatkan akses kesehatan masyarakat, pemberdayaan hidup bersih dan lingkungan sehat
- Misi 3 : Mengembangkan pulau dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai
- Misi 4 : Membangun karakter masyarakat yang sesuai filosofi ABAB
- Misi 5 : Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

b. RPJMD Kabupaten Sijunjung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021, dengan Visi pembangunan Kabupaten Sijunjung untuk lima tahun kedepan yaitu "Terwujudnya Negeri Madani yang Maju, Jaya, Adil dan Sejahtera". Untuk mewujudkan visi tersebut maka pemerintahan ini yang diikut untuk dipedomani dalam mewujudkan misi tersebut sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan masyarakat yang kuat, berdaya saing tinggi dan sejahtera



- Misi 2 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, kuat, cerdas dan berkeadilan mulia
  - Misi 3 : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata
  - Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani
  - Misi 5 : Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
  - Misi 6 : Meningkatkan kualitas hidup dan budaya berdasarkan Ajar Rasulul Syara', Syara' Basaidil Kitabullah
- e. RPJMD Kabupaten Tanah Datar
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, dengan Visi pembangunan Kabupaten Tanah Datar untuk lima tahun kedepan yaitu : "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Mandiri, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Ajar Imamul Syara', Syara' Basaidil Kitabullah". Untuk mewujudkan visi tersebut maka perumusan misi yang dibuat untuk dipadankan dalam mewujudkan misi tersebut sebagai berikut:
- Misi 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
  - Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM yang beriman, sehat, cerdas, berkeadilan dan sejahtera berdasarkan falsafah AMN-KHK
  - Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang beriman, sehat dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
  - Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan
  - Misi 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kemandirian dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah

## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SARARAN

Bab ini menjelaskan dan mengarahkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD. Mengingat visi, misi dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijadikan sebagai subseksi dan tujuan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, managerial dan sesuai dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dijabarkan dan dijabarkan sesuai prinsip penyusunan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

#### 5.1. VISI

Kemana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahluntah Tahun 2013-2018, adalah rencana pelaksanaan tahap kedua (2013-2018) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahluntah Tahun 2005-2025; dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahluntah adalah **"Sawahluntah Tahun 2025 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya"**. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Sawahluntah telah menetapkan 4 nilai utama pembangunan daerah jangka panjang, meliputi: 1)Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat; 2)Meningkatkan kualitas dan pelayanan umum; 3)Mengembangkan objek wisata tambang; 4) Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.

Mengenai kepala pemerintahan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Sawahluntah pada Tahap ke-3 tahun 2013-2018, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada pengoptimalan kualitas sumberdaya manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan serta pemerataan mutu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu:

1. Bidang Agama dan budaya dengan fokus pada pendalaman pemahaman masyarakat untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berbudhi luhur berakhlak mulia.
2. Bidang pembangunan hukum dan pemerintahan dengan fokus pada terwujudnya Melayatikan Tata Kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani, dan Pemanfaatan sistem birokrasi yang berkeadilan dan transparansi peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Bidang ekonomi dengan fokus pada Penguatan Keaktifan Lokal untuk meningkatkan berbagai pola kehidupan perekonomian yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan berdaya saing.
4. Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus Penguatan Jaring-jaring Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

- K. Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Enda RPJPD Kita Sasahanta Tahun ke-5 tahun 2013-2018, penekanan pembangunan diarahkan pada melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan pada tahap kedua dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber manusia bidang.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bernilai guna pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan mekanisme prioritas nasional dan daerah. Sehingga dengan itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terlekat dalam RPJPD Tahun 2013-2019, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah gambaran ringkas visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional.

Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Ujarnya untuk mewujudkan visi ini melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan memperluas keterpadatan Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokrasi berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa dan lelaya seing;
6. Mengajukan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berlandaskan kepemimpinan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dalam kebudayaan.

Adapun Strategi Pembangunan Nasional yang digariskan dalam RPJMN 2013-2019 sebagai berikut:

1. Bentuk pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2013-2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
  - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, yang makin meluas yang dapat memuat kesejahteraan pembangunan;
  - c. Aktivitas pembangunan tidak hanya memusatkan, memantapkan daya dukung lingkungan dan mendukung keseimbangan ekosistem;
2. Tiga Dimensi Pembangunan:
  - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat:  
Meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter;
  - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:  
Meliputi stabilitas pangan, ketersediaan energi dan komunikasi, kemandirian dan keberlanjutan pariwisata dan budaya;
  - c. Dimensi pemerintahan dan kesejahteraan:  
Meliputi antar kelompok pendapatan dan antar wilayah dalam hal kesejahteraan, luar Jawa dan kawasan timur;
3. Kondisi Sosial, Politik, Hukum dan Keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Antara lain kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi dan tata lula dan reformasi birokrasi.

4. *Quadrans* hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perbaikan menuju Indonesia yang berkeadilan secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkeprinsipan dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **KAWACITA**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum kepada seluruh warga negara.
2. Membina pemerintahan yang baik, jujur, bersih, aman, dan bertanggung jawab.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan kota-kota baru.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Menjadikan komodifikasi ekonomi dengan menggunakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Meningkatkan kebudayaan dan memperkuat budaya nilai Indonesia.

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi di masa depan yang diuraikan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2016-2021. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, masa visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah *Terwujudnya Sumatera Barat yang Mandiri dan Sejahtera*, dengan 4 nilai sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berkeadilan berdasarkan kitabullah "Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah".
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakhlak dan berkeadilan tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kearifan yang unggul, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

Gesam mempertimbangkan kondisi, permasalahan dan kesempatan prioritas nasional harus diarahkan, serta mengkomitir visi, misi, kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah Kota Sawahluluo Tahun 2016-2018 adalah : **"Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahluluo yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan yang Melayani"**

Untuk lebih jelasnya makna atas kata-kata pilihan dalam visi tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. **Produktif**, berarti suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu barang atau jasa yang mempunyai nilai jual sebagai peningkatan ekonomi keluarga.
2. **Mandiri**, berarti berada pada kondisi dimana masyarakat dan daerah memiliki kehidupan yang sejajar dengan masyarakat dan daerah lainnya dengan mengandalkan kemampuan dan kegiatan sendiri melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dan mewujudkan nilai keberagaman.



1. **Kelipian**, berarti perilaku masyarakat yang menaruh pada kehidupan yang apatis dengan mengabaikan ketepatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menggunakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Sejahtera**, berarti suatu kondisi dimana terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan daya saling dengan dilandasi meningkatnya indikator pembangunan sumber daya manusia antara lain pendapatan perkapita, pertumbuhan angka kelahiran dan kelahirannya tingkat pengangguran sejalan dengan peningkatan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi yang berkualitas serta meningkatnya tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. **Pemerintahan yang melayani**, Pemerintahan daerah dengan peran berwujud nyata diberikan sebagai fasilitator dan pengendali pelaksanaan langsung suatu urusan dan layanan.

## 5.3 MISI

Sebagai langkah nyata dari visi Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tersebut di atas, maka misi Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2013-2018 dalam upaya mengembangkan dan mengukuhkan pembangunan daerah sesuai bidang melalui pembangunan yang berkesinambungan, merata dan terukur. **Berkesinambungan** artinya melaksanakan program kerja yang sudah disusun dan ditetapkan dalam APBD tahun 2013 dan tahun selanjutnya dengan berorientasi dengan program kerja yang sudah ada. **Merata** artinya bahwa pembangunan dan pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan tetap berkesinambungan secara terwujudnya visi kota tahun 2020. Sedangkan **terukur** artinya pelaksanaan program kerja dari tahun ke tahun harus mengalami peningkatan dengan tingkat kemajuan program yang jelas dan diwujudkan dengan kemampuan keuangan daerah, meskipun sumber pendanaan lainnya yang ada untuk pembangunan daerah.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas diperlukan **Misi** Pembangunan Daerah yang telah kami susun untuk periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan peluang usaha melalui kemitraan pemerintah dan produk lokal
2. Meningkatkan kesehatan dan daya saling daerah
3. Menyusut kehidupan sosial yang agamis dan berakhlak mulia serta mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan berkualitas
4. Meningkatkan masyarakat yang berbudaya, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien
6. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah
7. Memperluas jaringan ekonomi, ekonomi setara nasional dan internasional

Visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto tersebut sepenuhnya mendukung tercapainya target Visi dan Misi Pemerintah Provinsi dan Nasional. Secara lebih terbitur, berikut diuraikan lebih hubungan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

Revisi RPMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018



### 5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai misi Kemana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

#### 5.3.1 Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif Dan Menciptakan Peluang Usaha Melalui Kemampuan Perekayasa Dan Produk Lokal

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah :

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang berkeadilan dengan inisiasi Rumah Tangga. Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
  - a. Mengembangkan kegiatan industri dan ekonomi kreatif
2. Meningkatkan ketahanan pangan. Dengan sasaran yang akan dicapai :
  - a. Terwujudnya ketahanan pangan

#### 5.3.2 Menwujudkan Kesejahteraan Dan Daya Sejahtera Daerah

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah :

1. Meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja dan calon tenaga kerja. Dengan sasaran yang akan dicapai :
  - a. Meningkatkan kesempatan kerja
2. Menyediakan infrastruktur kota yang berkelanjutan. Dengan sasaran yang akan dicapai :
  - a. Meningkatkan kualitas infrastruktur.
3. Menwujudkan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang baik. Dengan sasaran yang akan dicapai :
  - a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
  - b. Meningkatkan kepelanggaran dan penanganan terhadap limbah.

#### 5.3.3 Menwujud Kehidupan Sosial yang Agamis dan Berakhlak Melalui Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah :

1. Membentuk akhlak dan kepribadian generasi muda sesuai corak dari ajaran agama. Dengan sasaran yang akan dicapai :
  - a. Meningkatkan pemahaman ajaran agama pada generasi muda.
2. Menyediakan kehidupan yang harmonis dan agamis dengan masyarakat. Dengan sasaran yang akan dicapai :
  - a. Menjadikan kehidupan harmonis secara dini antar umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan serta mengoptimalkan pendidikan karakter. Dengan sasaran yang akan dicapai :
  - a. Meningkatkan kualitas pendidikan.

#### 5.3.4 Menumbuhkan Masyarakat yang berkeadilan, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah :

1. Meningkatkan jiwa dan sikap intelektual pada masyarakat Sasaran yang akan dicapai :
  - a. Terwujudnya kesadaran Berpolitik di antara masyarakat
2. Meningkatkan pemahaman, kedisiplinan, disiplin, terhadap masyarakat Sasaran yang akan dicapai :
  - a. Meningkatnya tingkat kesadaran di masyarakat
3. Mengembangkan pengetahuan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan Sasaran yang akan dicapai :
  - a. Terwujudnya Kota Sawahlunto menjadi Smart City
4. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat Sasaran yang akan dicapai :
  - a. Terwujudnya pelayanan kesehatan dan sosial yang berkualitas
  - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sasaran yang akan dicapai :
  - a. Meningkatnya tingkat kemakmuran
6. Mengoptimalkan peran masyarakat dan kegiatan kependidikan dalam pembangunan Sasaran yang akan dicapai :
  - a. Meningkatkan peran pemuda dan masyarakat dalam pembangunan
  - b. Terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan desa anak (PITDA)
  - c. Terwujudnya budaya kerukunan di antara masyarakat

#### **5.3.5 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien**

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah

1. Mengajukan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien Sasaran yang akan dicapai :
  - a. Meningkatnya kualitas pemerintahan pembangunan dan akuntabilitasnya kinerja
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dengan sasaran yang akan dicapai :
  - a. Meningkatnya besaran Pendapatan Asli daerah termasuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PADMD)
3. Mengajukan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat Sasaran yang akan dicapai :
  - a. Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap OPD
  - b. Terwujudnya terbit administrasi kependudukan

#### **5.3.6 Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah**

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah

1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah melalui pengelolaan yang bermutu dan lingkungan Sasaran yang akan dicapai



#### A. Perkembangan Import/eksportasi di Kota Sawahlunto

#### 5.3.7 Memperluas Jaringan Sosial dan Ekonomi secara Nasional dan Internasional

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah:

1. Meningkatkan jaringan, promosi dan aksesibilitas daerah dalam rangka pengembangan ekonomi dan sosial daerah yang akan dicapai adalah:
  - a. Tersenyainya kerjasama pengembangan ekonomi dan peningkatan penyerapan modal
  - b. Meningkatnya aksesibilitas dalam daerah dan lingkup daerah lainnya

Berikut landasan, hubungan hierarki antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Sawahlunto dalam periode 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 5.2**  
**Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Progresif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan yang Mulia		
MISI	TUJUAN PERKEMBANGAN	SASARAN
1	2	3
1. Mengembangkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan peluang usaha melalui keunggulan potensi dan produk lokal	1. Mengembangkan produktivitas masyarakat yang berakademi potensi budaya (Rumah Lingsar)	1. Berkembangnya kegiatan wisata dan ekonomi kreatif
	2. Meningkatkan ketahanan pangan	1. Tersenyainya kerjasama pangan
2. Meningkatkan keterampilan dan daya saing daerah	1. Meningkatkan produktivitas dan kemampuan kerja bagi tenaga kerja dan kelas tenaga kerja	1. Meningkatnya kemampuan kerja
	2. Memperdalam pemahaman kerja yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur
	3. Menyajikan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pekerjaan yang baik	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya kewaspadaan dan penanganan bencana
3. Menegakkan Kehidupan Sosial yang Agamis dan Berkeadilan Mulla serta Mengembangkan Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan	1. Membentuk sikap dan perilaku sesuai nilai agama, moral, adat dan norma agama	1. Meningkatnya pengontrolan agama agama pada pemerintah
	2. Meningkatkan kehidupan yang harmonis dan agamis dengan masyarakat	1. Meningkatnya kehidupan harmonis internal dan eksternal masyarakat

**VIH - Tawakulnya Masyarakat Kita Berakhlak yang Produktif, Mandiri, Berjaya, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Malayan**

ISU	TUJUAN PEMBAHARUAN	SASARAN
1	2	3
1. Memantapkan Masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan selaras yang mengutamakan keadilan, integritas, kecekapan dan inovasi	1. Meningkatkan kualiti dan Pelancongan Perindustrian serta memperkayakan penciptaan karakter	1. Meningkatkan kualiti perindustrian
	1. Memantapkan jawatan yang integritas pada masyarakat	1. Terwujudnya Masyarakat Beradab dan Berkeadilan
	2. Meningkatkan perindustrian, pembangunan pelancongan, perindustrian dan perikanan	1. Meningkatkan usaha perikanan di kawasan
	3. Meningkatkan perindustrian, perikanan, perikanan, perikanan dan perikanan	1. Terwujudnya Air Bersih dan Berkeadilan
	4. Meningkatkan perindustrian, perikanan, perikanan, perikanan dan perikanan	1. Terwujudnya Pelancongan Berkeadilan dan Sejahtera yang berkeadilan
	5. Meningkatkan perindustrian, perikanan, perikanan, perikanan dan perikanan	2. Meningkatkan perindustrian, perikanan, perikanan dan perikanan
	6. Meningkatkan perindustrian, perikanan, perikanan, perikanan dan perikanan	1. Meningkatkan perindustrian, perikanan, perikanan dan perikanan
2. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Beradab, Berkeadilan, Berjaya, Sejahtera dan Inovatif	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Beradab dan Inovatif	1. Meningkatkan kualiti perindustrian, perikanan, perikanan dan perikanan
	2. Meningkatkan perindustrian, perikanan, perikanan, perikanan dan perikanan	2. Meningkatkan perindustrian, perikanan, perikanan dan perikanan
	3. Meningkatkan perindustrian, perikanan, perikanan, perikanan dan perikanan	1. Meningkatkan perindustrian, perikanan, perikanan dan perikanan

RMK : Terwujudnya Masyarakat Kota Samarinda yang Peduli, Mandiri, Religius, Sehat dan Pemerintahan yang Berkeadilan		
MISI	TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN
I	II	III
1. Meningkatkan Pengkaderan dan Pemertahanan Timbal Daerah	1. Meningkatkan kemampuan jaring daerah melalui pengkaderan yang berkesinambungan	1. Berhasilnya upaya-upayaan di Kota Samarinda
2. Memperluas Jaringan Sosial dan Ekonomi secara Nasional dan Internasional	2. Meningkatkan kerjasama, jaringan dan keterkaitan daerah dalam rangka pembangunan ekonomi dan sosial	2. Terwujudnya jaringan, pemangkuhan ekonomi dan kerjasama regional 3. Meningkatnya partisipasi dalam daerah dan dengan daerah lainnya

Selanjutnya indikator dan target kinerja RMMD Kota Samarinda Tahun 2013-2018 untuk setiap misi dan sasaran yang telah dijabar dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.27 Target dan Indikator Rencana RPJMD  
Kata Kunci: Tahun 2013-2018

Kategori	Indikator	Materi	Tahun					Kategori	Indikator	Materi
			2013	2014	2015	2016	2017			
Kategori 1: Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Kategori 1: Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah
Kategori 2: Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Kategori 2: Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah
Kategori 3: Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Kategori 3: Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah



TOWAN	MAGNITUDE	INSTRUMENT	MUTUAL	MAGNITUDE		TOWAN		MAGNITUDE	MAGNITUDE	MAGNITUDE
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MAGNITUDE	MAGNITUDE	MAGNITUDE	MAGNITUDE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MAGNITUDE	MAGNITUDE	MAGNITUDE	MAGNITUDE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MAGNITUDE	MAGNITUDE	MAGNITUDE	MAGNITUDE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020



KETERANGAN	SARAF	INDIKATOR	SATUAN	ACUAN KUALITAS AREA	Tahun						KEMERUKAAN AREA	GPO PERANGKOPAN JAWAB
					2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia
Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia	Keterampilan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia















## BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan daerah harus didasarkan pada asasen tertentu yang hendak dicapai untuk ketajaman yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelaksanaan pemerintahan pada tahun-tahun sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan ini selanjutnya menjadi pedoman pertimbangan bagi stakeholder pembangunan di daerah. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat pernyataan-pernyataan kebijakan selama lima tahun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang Pemerintah Daerah mengenai tujuan dan asasen RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perubahan kinerja birokrasi. Formulasi strategi tidak saja menggariskan siklus pembangunan tetapi juga semua program yang mendukung dan menetapkan kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

### 6.1. MISI 1 : MENGUATKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN MENCIPTAKAN PELUANG USAHA MELALUI KEUNGGULAN PARIWISATA DAN PRODUK LOKAL

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan keadaan pemerintahan yang memiliki pasar dengan mengurangi batasan-batasan impor dan peningkatan kualitas produk yang diantisipasi menjadi persaingan yang sehat bagi pelaku usaha Negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, perlu adanya elemen masyarakat yang produktif, tangguh dan berbasis kepada keunggulan produk asli yang berdaya saing merupakan unsur penting untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta menjawab tentang Pasar ASEAN. Kota Sawahlunto sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berperan dalam pembangunan ekonomi dan mempersiapkan strategi dan arah kebijakan yang mendukung visi Kota Sawahlunto untuk menghadapi pasar ASEAN ini (*Daftar Misi Ekonomi ASEAN*).

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam misi adalah 1) Mengembangkan pertumbuhan masyarakat yang berbasis pada potensi (potensi budaya, Rumah Tangga dan 2) Meningkatkan kesadaran pangan. Sedangkan asasen yang hendak dicapai dalam misi ini adalah 1) Berkesinambungan kegiatan dan ekonomi kreatif dan 2) Terjaganya ketersediaan pangan.

#### 6.1.1. STRATEGI UNTUK MISI 1

Untuk mencapai asasen yang ditetapkan pada misi 1, diupayakan sebagai :

1. Peningkatan kuantitas, kualitas serta mutu dari ekonomi kreatif
2. Penyelesaian sengketa dan prosedur penyelesaian hasil industri kreatif dan industri rumah tangga berbasis lokal lokal di kawasan wisata
3. Peningkatan konsentrasi dan bina bagi pelaku usaha baru dengan sumber pendanaan dalam pertumbuhan

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Pertanian.

#### 6.1.2. ARAH KEBIJAKAN UNTUK MIN 1

Selanjutnya arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah:

1. Mengembangkan kawasan strategis menjadi kawasan jasa dan perdagangan, UMKM dan koperasi;
2. Meningkatkan keterampilan dan SDM tenaga kerja sektor industri rumah tangga;
3. Meningkatkan keahlian lokal untuk pengembangan ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing;
4. Meningkatkan perdagangan dan pemasaran pasar tradisional/kawasan wisata;
5. Meningkatkan infrastruktur perdagangan dan fasilitas pendukung jasa lainnya;
6. Meningkatkan sistem distribusi perdagangan;
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan koperasi dan UMKM serta kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya;
8. Meningkatkan pemanfaatan industri berbasis kluster;
9. Meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah;
10. Meningkatkan sumber daya petani;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
12. Memperkuat kelembagaan kelompok tani;
13. Mewujudkan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil.

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan  
Kota Sawahlunto pada Min 1

<b>Visi</b>	Tercapainya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Penuh Tatakelola yang Modern		
<b>Misi 1</b>	Mengembangkan Nilai Ekonomi Produktif dan Menyiapkan Peluang Usaha melalui Menggubuk Perikanan dan Produk Lokal		
TOJOK PERUSAHAAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Memanfaatkan perkembangan teknologi yang berkembang pesat untuk Melayan Dengan...	1. Berkompetensi logistik industri dan ekonomi kreatif	Penggunaan bantuan, keahlian pusat industri dan ekonomi kreatif	1. Mengembangkan kawasan strategis menjadi kawasan jasa perdagangan, UMKM dan koperasi
			2. Meningkatkan keterampilan dan SDM tenaga kerja sektor industri rumah tangga
			3. Meningkatkan keahlian lokal untuk pengembangan ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing
		Pengembangan usaha dan pemasaran berbasis hasil industri kreatif dan industri rumah tangga berbasis hasil lokal di kawasan wisata	1. Meningkatkan pemasaran dan pemasaran pasar tradisional/kawasan wisata
			2. Meningkatkan infrastruktur perdagangan dan fasilitas pendukung jasa lainnya

<b>Visi</b>	Tercapainya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Sejahtera, Berkeadilan dan Penguatan Yang Meluas		
<b>Misi</b>	Mempertahankan Daya Ekonomi Produktif dan Meningkatkan Peluang Usaha melalui Pengembangan Potensi dan Produk Lokal		
TUJUAN PEMBANGUNAN	SARAN	STRATEGI	AKSI KEBANGSAAN
1	2	3	4
			1. Meningkatkan peran pemerintah dalam peningkatan
		Peningkatan kemampuan dan hasil bagi pribadi usaha baru dengan sumber pendanaan dalam pendanaan	1. Meningkatkan kegiatan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat dengan UMKM serta kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya
			2. Meningkatkan penguatan infrastruktur berbasis teknologi
			3. Meningkatkan kerjasama pemerintah antar daerah
2. Meningkatkan kemakmuran rakyat	1. Terpenuhinya kebutuhan pangan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan	1. Meningkatkan sumber daya pangan
			2. Meningkatkan peran dan peranan pertanian
			3. Menyediakan infrastruktur kewirausahaan
			4. Meningkatkan infrastruktur, komunikasi dan transportasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil

## 6.2. MISI 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAUKU DASAR

Kemandirian daerah untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan daerah. Daya saing yang tinggi akan menjadikan Kota Sawahlunto siap menghadapi tantangan-bekas globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, Kota Sawahlunto diarahkan dengan memperhatikan permasalahan berbasis kewirausahaan. Melalui masing-masing kawasan menuju kewirausahaan kompetitif serta mengedepankan pemanfaatan SDM yang produktifitas dan berkeadilan.

Dewasa ini, Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur tetap mengedepankan pola prinsip pembangunan yang berkeadilan dan berkeadilan lingkungan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang bersih, serta menyerasakan akan dapat diwujudkan melalui penguatan, pemertanian air, penguatan, penataan pembangunan yang merata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW).

Tujuan dari misi 2 ini adalah :

1. Meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja dan calon tenaga kerja;
2. Menyediakan infrastruktur Kota yang berkeadilan;
3. Meningkatkan pendapatan lingkungan hidup pertanian yang baik

Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ini adalah :

1. Meningkatkan kemampuan kerja;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan dan penanganan terhadap bencana.

### 6.2.1 STRATEGI UNTUK WISI 3

Untuk mencapai sasaran yang hendak diwujudkan pada visi 3 dilakukan sebagai strategi berikut:

1. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan SUM tenaga kerja, hasil graduate dan pengangguran sesuai potensinya;
2. Peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur kota;
3. Pemanfaatan kawasan yang berbatasan lingkungan dan penyesuaian urban sistem lingkungan;
4. Peningkatan pelayanan masyarakat dalam penanganan dan penanganan limbah;
5. Meningkatkan energi dan peran masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan bencana.

### 6.2.2 ASAS KERJA UNTUK WISI 3

Asas berikut untuk melaksanakan strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, kompetensi dan keahlian pengendali;
2. Meningkatkan program kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait lainnya dalam penyediaan tenaga kerja;
3. Mengupayakan peningkatan ilmu keterampilan hasil masyarakat;
4. Memelihara jaringan infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain;
5. Meningkatkan standar dan kualitas jalan dan jembatan;
6. Meningkatkan sistem jaringan air minum;
7. Meningkatkan pelayanan administrasi transportasi dan pembangunan jalan ke pusat pertumbuhan Perkotaan;
8. Meningkatkan kerjasama pembangunan antara dan provinsi di dalam kawasan pertumbuhan kota;
9. Menyediakan alat berat dan alat jalan;
10. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman;
11. Meningkatkan jaringan irigasi;
12. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dari aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
13. Memanfaatkan pertumbuhan pertumbuhan perumahan, perkotaan, perdagangan dan kawasan industri sesuai dengan rencana tata ruang;
14. Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
15. Meningkatkan pengelolaan RRA dan lingkungan yang berbasis manfaat untuk kepentingan daerah dan masyarakat;
16. Melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup;
17. Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan;
18. Memelihara dan meningkatkan rutan terbuka hijau serta taman-taman kota;
19. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya;
20. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai terpadu dan konsisten;
21. Memanfaatkan kesadaran masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang;
22. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;



23. Meningkatkan pengawasan lahan serta dibarengi dengan yang mengalami kondisi rawan bencana seperti banjir, angin dan kekeringan untuk pemangku kepentingan dan lintas sektor.
24. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan untuk pemangku kepentingan dan mitra pemerintah.
25. Melakukan penanganan curah/had/longsor pada daerah rawan longsor dan bencana.
26. Meningkatkan pelaksanaan mitigasi bencana.
27. Meningkatkan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
28. Membantu Tim Mitigasi Bencana tingkat masyarakat desa/kelurahan yang mempunyai potensi bencana tinggi.

Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Sawahlunto Pada Misi 2

VISI		: Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Berkeadilan dan Pemerintahan yang Berkeadilan		
MISI 2		: Kesejahteraan Komodifikasi dan Tercipta Ruang Domestik		
TEMA		SARANA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
1. Meningkatkan produktivitas dan kesengajaan Tercipta Ruang Domestik		Meningkatkan kemampuan kerja	Peningkatan keterampilan, kompetensi dan SDM tenaga kerja, baik graduate dan non-graduate untuk pemangku sektor produktif	1. Mengembangkan dan mengembangkan kemampuan, kompetensi dan keahlian (kemampuan)
				2. Mengembangkan Program Kerjasama dengan Lembaga dan Organisasi Swasta Lokal dalam mengembangkan Tercipta Ruang Domestik
				3. Mengembangkan Program, Peningkatan, dan Pengembangan bagi masyarakat
2. Meningkatkan infrastruktur Kota yang Berkeadilan		Meningkatkan infrastruktur infrastruktur	Pengembangan bisnis dan pembangunan infrastruktur Kota	1. Membangun/ulangi infrastruktur umum: Transportasi dan Ruang Publik
				2. Meningkatkan Kualitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan
				3. Mengembangkan Sistem Jaringan Drainase
				4. Mengembangkan Program Infrastruktur Transportasi dan Pembangunan Jalan ke Pusat Perumahan Perkotaan
				5. Meningkatkan kerjasama pembangunan antara dan pemerintah G. dan swasta, pemerintah kota
				6. Meningkatkan nilai lahan dan air tanah
				7. Mengembangkan Sistem Jaringan Perumahan
				8. Mengembangkan program air





<b>VISI</b>	<b>1. Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemberdayaan Yang Meliputi</b>		
<b>MISI 2</b>	<b>1. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SARANA</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>AKSI KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			1. Mengembangkan sektor-sektor unggulan dan lain-lain sektor
			2. Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang secara menyeluruh mematuhi pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian
			3. Meningkatkan kemampuan manajerial/kepemimpinan pada semua instansi/lembaga dan lembaga
			4. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas
			5. Meningkatkan kualitas infrastruktur masyarakat dalam meningkatkan ekonomi
			6. Mendukung Tim Kajian Rencana Strategis Kabupaten/Kota/Provinsi yang mampu memonitor kemajuan kerja

### 6.3. MISI 3 : MEMUPUK KEHIDUPAN SOSIAL YANG AGAMIS DAN BERAKHLAK MULIA SERTA MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 3 ini adalah a). Untuk membentuk sikap dan kepribadian generasi muda sesuai ajaran dari ajaran agama; b) Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan agamis di masyarakat; dan c) Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan serta mengoptimalkan pendidikan berkeadilan

Sasaran yang hendak dicapai adalah a) Meningkatkan pemahaman ajaran agama pada generasi muda; b) Meningkatkan kehidupan harmonis (religi) dan antar umat beragama dan c) Meningkatkan kualitas pendidikan

#### 6.3.1. STRATEGI UNTUK MISI 3

Untuk mencapai sasaran yang dijabarkan pada Misi 3, ditempuh strategi :

1. Peningkatan nilai agama di atas pada masyarakat;
2. Peningkatan toleransi antar umat beragama;
3. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Tertegapnya lima nilai-nilai kebangsaan dan etika moral dalam setiap mata pelajaran;
5. Pemerataan akses dan pelayanan pendidikan.

### 6.3.3. Aras Kebijakan untuk Misi 3

Sedangkan aras kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan agama agama dan kesiapan kepada Tuhan YME;
2. Meningkatkan nilai adat dan budaya setiap suku sebagai ngen nilai budaya daerah;
3. Meningkatkan toleransi antar umat beragama dalam berbudaya;
4. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Meningkatkan kualitas pada setiap jenjang pendidikan;
6. Meningkatkan harkat, marjalah dan masa berkarya, berima pengetahuan dan menguasai sains, teknologi, seni dan budaya;
7. Menjadikan pelaksanaan pendidikan Waifu Balajar 12 tahun yang berkualitas;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan pendirian satuan pendukung pendidikan yang memadai;
9. Meningkatkan pemerdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
10. Menubuhkan baya pendidikan bagi semua didik yang berasal dari keluarga miskin;
11. Menyediakan pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus;
12. Meningkatkan pengembangan perguruan tinggi;
13. Menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam peningkatan mutu jasa.

Tabel 6.3 Strategi dan Aras Kebijakan  
Kons Rahmatu pada Misi 3

VISI		MISI	
- Perwujudan Masyarakat Kota Sumbawa yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan yang Melayani		- Mencapai Kehidupan Sosial yang Agamis dan Berakhlak Waifu serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Berkesetaraan	
TUJUAN PENDIDIKAN	SAHABAT	STRATEGI	ARAS KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Meningkatkan minat dan keprhatian pnyara siswa semua syar dan agama	1. Meningkatkan pengetahuan agama agama pada semua mata	Peningkatan nilai agama dan sains pada masyarakat	1. Meningkatkan pengetahuan agama agama dan kesiapan kepada Tuhan YME
			2. Meningkatkan nilai adat dan budaya setiap suku sebagai nilai budaya daerah
2. Menjadikan lembaga yang berakhlak dan agamis dengan masyarakat	1. Meningkatkan kebhayaan berakhlak antar dan antar umat beragama	Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama	1. Meningkatkan toleransi antar antar beragama dalam berbudaya
3. Meningkatkan kualitas dan Pelayanan Pendidikan serta mengoptimalkan pendidikan kesetaraan	1. Meningkatkan kualitas pendidikan	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
		Peningkatan dan nilai sains teknologi dan seni sebagai nilai budaya	2. Meningkatkan kualitas pada setiap jenjang pendidikan
			3. Meningkatkan harkat, marjalah dan masa berkarya, berima pengetahuan dan menguasai sains, teknologi, seni dan budaya



WISI	Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Protokol, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan yang Melayani		
MISI 3	Memupuk Skill/Keahlian Sosial yang Agamis dan Berakhlak Walid serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Berakhlak		
TUJUAN PEMBAKORAN	LOKASI	STRATEGI	AKSI KEMAJARAN
		Penerapan aksi dan pelayanan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan prasarana Wajar 12 Tahun yang bermutu</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan pemetaan ulang pendamping pembelajaran yang memadai</li> <li>3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan pendidikan yang berakhlak dan berkeadilan untuk semua guru, kepala sekolah dan pendidik</li> <li>4. Meningkatkan kesejahteraan pendidik yang berakhlak dan berkeadilan</li> <li>5. Meningkatkan kesejahteraan pendidik yang berakhlak dan berkeadilan</li> <li>6. Meningkatkan kesejahteraan pendidik yang berakhlak dan berkeadilan</li> <li>7. Meningkatkan kesejahteraan pendidik yang berakhlak dan berkeadilan</li> <li>8. Meningkatkan kesejahteraan pendidik yang berakhlak dan berkeadilan</li> <li>9. Meningkatkan kesejahteraan pendidik yang berakhlak dan berkeadilan</li> </ol>

#### 2.4. MISI 4 : MEMBUNYIKAN MASYARAKAT YANG BERINTELIGENTIALITAS, SEHAT DAN SEJAHTERA YANG MEMILIKI BERBAGAI ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI DAN BUDAYA

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 4 ini adalah a). Meningkatkan daya dan sikap intelektualitas pada masyarakat, b).Memajukan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat, c).Mengembangkan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan, d). Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat, e).Memajukan kesejahteraan hidup masyarakat dan f).Mengoptimalkan peran pemuda, perempuan dan masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Terwujudnya kedewasaan berpikir di tengah masyarakat;
2. Memerumahnya untuk kemajuan di masyarakat;
3. Terwujudnya Kota Sawahlunto menjadi Smart City;
4. Terwujudnya pelayanan kesehatan dan sosial yang bermutu;
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
6. Memerumahnya tingkat kemakmuran;
7. Meningkatkan peran pemuda dan masyarakat dalam pembangunan;
8. Terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PAHA)
9. Terpenuhinya budaya berolahraga di tengah masyarakat.

#### 6.4.1. Strategi Untuk Misi 4

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 4 adalah a) Sosialisasi dan Pendidikan kepada masyarakat tentang masalah kelangkaan dan demokrasi, b) Penguatan kerja sama antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi, c) Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi, d) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, e) Peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan dan sosial, f) Peningkatan jumlah tenaga pelayanan kesehatan dan sosial, g) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial dan h) Peningkatan Pelayanan KB, i) Peningkatan efisiensi Efektivitas Penanggulangan Kemandirian Kita Sewaktu, j) Peningkatan kualitas SDM dan aspeknya keluarga/kelompok masyarakat serta penyelesaian gender, k) Peningkatan budaya kehidupan dan l) Peningkatan kualitas organisasi pemerintahan.

#### 6.4.2. Arah Kebijakan untuk Misi 4

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermutu kepada program dan kegiatan yang perlu untuk dilaksanakan oleh lembaga yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 4 adalah

1. Peningkatan kehidupan berpolitik bagi masyarakat;
2. Membangun Sistem Politik yang demokratis dengan memberi peran kepada semua partai secara konstitif dan proporsional;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam politik;
4. Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya pencapaian situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif;
5. Meningkatkan fasilitas pengawasan pemerintahan nasional;
6. Meningkatkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pemanggilan terjadinya gangguan kamtibmas;
7. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, perempuan gender, peningkatan tingkat ketahanan dalam keluarga;
8. Koordinasi dengan badan hukum mengenai KIRY dan perlindungan anak;
9. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi setiap wilayah;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;
11. Menyediakan fasilitas pelayanan, obat dan pelayanan kesehatan;
12. Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan;
13. Meningkatkan akses masyarakat kota terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
14. Meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan;
15. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan;
16. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan;
17. Mengoptimalkan kualitas pengurusan KB terhadap Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS);
18. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program KB;
19. Meningkatkan pemberdayaan dan SDM profesional nasional serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang manggigit;
20. Mengoptimalkan satu data tunggal kamtibmas Kota Sewaktu;
21. Mengoptimalkan pengendalian pembangunan kamtibmas (PBB) dalam proses pemerintahan;
22. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan;
23. Meningkatkan rasa kebersamaan sosial, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat;

24. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan;
25. Penguatan kelembagaan dan dukungan program dan kegiatan perempuan;
26. Mendukung penguatan program KONI serta kelompok olahraga desa dan kelurahan;
27. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dengan dukungan program dan kegiatan kepemimpinan;
28. Meningkatkan organisasi kepemudaan dengan dukungan program dan kegiatan kepemudaan.

Tabel 6.4 Strategi dan Aksi Kebijakan  
Kota Sawahlunto pada Misi 4

Tertujujudaya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Sejahtera dan Pemerintahan yang Berkelanjutan			
MISI 4 Memajukan Masyarakat yang berkeadilan, sehat dan sejahtera yang mengutamakan keberagaman pengetahuan, teknologi, seni dan budaya			
TUJUAN PEMBANGUNAN	KEGARAN	STRATEGI	AKSI TERKAIT
1	2	3	4
1. Meningkatkan pwa dan sikap intelektual pada masyarakat	1. Terwujudnya kemajuan berprinsip di tingkat masyarakat	Kelembagaan dan pembinaan kepada masyarakat tingkat kecamatan kelurahan dan desa/kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelembagaan kependidikan yang berkualitas</li> <li>2. Membangun kualitas politik yang demokratis dengan memberi peran kepada semua pihak secara konstruktif dan profesional</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan masyarakat untuk warga diwilayah jangkau</li> <li>4. Memanfaatkan pelaksanaan kebijakan dengan sikap kepatuhan, luhur dan upaya pencapaian nilai-nilai kearifan yang lebih baik dan berkelanjutan</li> <li>5. Mengembangkan rencana pembangunan pemerintah</li> <li>6. Meningkatkan penguatan kelembagaan layanan yang lebih profesional terutama dalam pelayanan masyarakat dengan kualitas</li> </ol>
2. Mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat	1. Memanfaatkan hasil kemajuan di masyarakat	Peningkatan kualitas secara preventif, reaktif dan proaktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan anak</li> </ol>
3. Mengembangkan penguatan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan	1. Terwujudnya Kota Sawahlunto menjadi Smart City	Penguatan sistem layanan dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif</li> </ol>

VISI	Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Sejahtera, dan Pemerintahan yang Modern		
MISI	Memperbaiki Masyarakat yang berkeadilan sosial, sehat dan sejahtera yang menggunakan berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya		
TUJUAN PERKULIAHAN	KASABAH	STRATEGI	AKSI KEBELAKANG
1	2	3	4
1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat	1. Meningkatkan program kesehatan dan sosial yang berkualitas	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat Peningkatan kualitas RUMAH SAKIT Kecamatan dan sosial Peningkatan program pelayanan kesehatan dan sosial	1. Meningkatkan akses dan program kesehatan
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan, dan dan perbaikan kesehatan
			3. Meningkatkan program kesehatan dasar: Daya Manusia di tingkat
			4. Meningkatkan akses masyarakat kota, berbagai pelayanan kesehatan yang terjangkau
	2. Meningkatkan akses pelayanan masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial Peningkatan Pelayanan RS	1. Meningkatkan program kesehatan masyarakat dan kesehatan
			2. Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan
			3. Meningkatkan kualitas pelayanan RS terhadap Warga Desa Sukor (RS) dan Peningkatan Layanan RS
			4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan program RS
2. Meningkatkan kesehatan tingkat masyarakat	1. Meningkatkan tingkat kesehatan	Peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesehatan Kota Sawahlunto	1. Meningkatkan pelayanan RS RSRS pemerintah kota serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang bertanggung
			2. Meningkatkan akses data terpadu pelayanan Kota Sawahlunto
			3. Meningkatkan program kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (PPL) dalam proses peningkatan
3. Meningkatkan peran swasta, pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan kualitas RUMAH SAKIT dan kualitas berbagai layanan masyarakat serta peningkatan program	1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pembangunan





VISI	Terwujudnya Masyarakat Kota Samarinda yang Produktif, Mandiri, Religius, Berprestasi dan Demokratis yang Berkeadilan		
MISI 4	Memajukan Masyarakat yang berbudaya, sehat dan sejahtera yang mengungguli berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya		
TOJUAN PERBAIKAN	SASARAN	STRATEGI	AKSI KEBIJAKAN
1	2	3	4
	1. Peningkatan pemerintahan gender (PUG) dan pemberdayaan hak anak (PUGA)		1. Meningkatkan peran partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan
			2. Meningkatkan kualitas kinerja dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pemerintahan
	2. Peningkatan budaya berbudaya di tingkat masyarakat	Pengembangan budaya keolahragaan	1. Peningkatan prestasi dan dukungan prestasi dan kegiatan olahraga
			2. Meningkatkan pembinaan, pengembangan, promosi, KOP serta kegiatan olahraga dan kesehatan
		Pengembangan kualitas lingkungan perumahan	1. Meningkatkan kualitas perumahan dengan dukungan program dan kegiatan perumahan
			2. Meningkatkan kualitas perumahan dengan dukungan program dan kegiatan perumahan

#### 6.5. MISI 5 : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK, BERSIH, MELAYANI, KREATIF, INOVATIF DAN EFISIEN.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 5 ini adalah a) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, b) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan c) Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima seperti masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai a) Meningkatkan kualitas pemerintahan dan administrasi daerah, b) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki (DUMD), c) Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai OPD dan d) Terwujudnya pengelolaan aset dan pertanahan daerah yang berkeadilan dan e) Terwujudnya administrasi pemerintahan yang baik.

##### 6.5.1. STRATEGI UNTUK MISI 5

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 5 adalah a) Penguatan sistem keuangan yang berkeadilan dan transparansi serta masyarakat dalam melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan serta penguatan teknologi informasi, b) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, c) Penguatan sistem dan memaksimalkan pendapatan pajak dan distribusi daerah, d) Penguatan pengelolaan kekayaan pemerintah daerah, e) Penguatan penguatan SPM dan SOP sesuai pelaporannya dan f) Optimalisasi SAK online.

### 6.5.3. ARAH KEBIJAKAN UNTUK MIN 6

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah diuraikan di atas sebagai berikut:

1. Memantapkan sistem birokrasi yang berkeadilan dan memfokuskan peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketepatan dan peningkatan pembangunan;
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani;
3. Meningkatkan pengmatikan, pemerataan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatkan SIM bagi operator pemerintah daerah;
5. Meningkatkan kualitas sistem informasi pemerintahan yang tepat waktu, akurat dan mudah diakses;
6. Meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pembinaan lingkungan daerah;
7. Memperluas basis data objek pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
9. Mendorong terbentuknya tenaga profesional kearsipan;
10. Mengusai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan kualitas jasa layanan kearsipan;
11. Mendorong pengapalan SIM dan pemerataan penyediaan SOP serta pengembangannya;
12. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sampai tingkat pemerintahan terdapat;
13. Menjaga/mempertahankan data administrasi kependudukan;

Tabel 6.5 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Sawahlunto pada Min 6

TITIK		MISI	
1. Penguatan dan pemberdayaan Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Berkeadilan Yang Berkeadilan		Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Melayani, Akurat, Inovatif dan Efisien	
TUJUAN PEMBANGUNAN	REKOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	1. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan akuntabilitas kinerja	Pemerataan sistem birokrasi yang berkeadilan, dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantapkan sistem birokrasi yang berkeadilan dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan lingkungan</li> <li>2. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani</li> <li>3. Meningkatkan pengmatikan, pemerataan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan</li> <li>4. Meningkatkan SIM bagi operator pemerintah daerah</li> <li>5. Meningkatkan kualitas sistem informasi pemerintahan daerah yang tepat waktu, akurat dan mudah diakses</li> </ol>

<b>Visi</b>	: Terwujudnya Masyarakat Kota Gorontalo yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan yang Melayani		
<b>Misi</b>	: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Akuntabel, Inovatif dan Efisien		
<b>TUJUAN PEMBAHARUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang prima secara menyeluruh	1. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang terakumulasi (TKM)	Peningkatan kinerja dan profesionalitas aparatur sipil negara dan instansi daerah	1. Meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan prima dan kepuasan masyarakat
	2. Terwujudnya standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap OPD	Peningkatan pelayanan SPM dan SOP beserta pelaksanaannya	2. Mendukung pencapaian SPM dan peningkatan pelayanan SPM serta pengembangannya
	3. Terwujudnya pengelolaan aset dan perwujudan aset yang produktif	Peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas RKT dan asetnya	1. Meningkatkan efisiensi biaya anggaran
2. Meningkatkan peran administrasi pemerintahan	1. Terwujudnya sistem administrasi pemerintahan	Optimalisasi RAK Unsur	1. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan secara tingkat pemerintah daerah
	2. Terwujudnya sistem administrasi pemerintahan		2. Meningkatkan peran administrasi pemerintahan

#### 6.6. MISI 6 : MERGOPTIMALKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH

Tujuan yang berada di scope dalam misi 6 ini adalah Untuk mengoptimalkan pemerintahan pusat daerah melalui pengelolaan yang bertanggung jawabnya. Sesuai yang diarahkan Berkenangannya keterkaitan di Kota Gorontalo.

##### 6.6.1. STRATEGI UNTUK MISI 6

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi 6 adalah a). Peningkatan pengelolaan potensi wisata dan b). Peningkatan pelayanan kesehatan dan kebudayaan daerah.

##### 6.6.2. ARAH KINERJA UNTUK MISI 6

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh lembaga yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi (pada Misi 6 adalah):

1. Meningkatkan sarana prasarana dan potensi wisata,
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam industri wisata.

2. Meningkatkan pembinaan nilai-nilai seni dan budaya daerah;
4. Meningkatkan kualitas daerah menjadi kota hijau dan warisan dunia.

Tabel 6.6 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Sawahlunto pada Misi 6

TUGAS : Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Tertampil, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Demokratis Yang Mahakaya			
MISI 6 : Meningkatkan Pendidikan dan Peningkatan Potensi Daerah			
TUJUAN PEMBANGUNAN	SARANA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Untuk meningkatkan pemerataan sumber daya manusia yang berkualitas yang berwawasan lingkungan	Perkembangan Infrastruktur di Kota Sawahlunto	Peningkatan pendidikan formal/waktu	1. Meningkatkan akses dan pemerataan dan pemerataan akses
		Peningkatan keterampilan teknis dan keahliasaan daerah	2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan akses
			3. Melakukan penelitian-penelitian seni budaya daerah
			4. Memperkuat komitmen daerah sebagai kota hijau dan warisan dunia

#### 6.7. MISI 7 : MEMPERLUAS JARINGAN SOCIAL, EKONOMI SECARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Sebagai bagian terintegrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Kota Sawahlunto akan menjadi bagian yang berperan dalam pembangunan jaringan social dan ekonomi. Perwujudan ekonomi masyarakat yang tumbuh, produktif dan berdaya saing merupakan salah satu hal yang penting untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta mengawali Pasar ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan keadaan perekonomian yang semakin pesat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 7 ini adalah Untuk Meningkatkan Kinerja, Produktivitas dan Akesibilitas Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi dan Sosial. Secara yang dicapai adalah a) Terwujudnya kegiatan pembangunan ekonomi dan peningkatan penyertaan modal dan b) Meningkatkan aksesibilitas dalam daerah dan dengan daerah lainnya.

##### 6.7.1. STRATEGI UNTUK MISI 7

Strategi yang diambil untuk mencapai Misi 7 adalah a) Meningkatkan kerjasama antar daerah dan investor serta mengoptimalkan BUMD yang berdaya saing dan b) Peningkatan perantara dan pendanaan jalur alternatif baru ke dalam kota Sawahlunto dari daerah lainnya.

##### 6.7.2. ARAH KEBIJAKAN UNTUK MISI 7

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang berwujud berupa program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 7 adalah :



1. Meningkatkan proses ekspor-impor perikanan daerah;
2. Meningkatkan RUM berteknologi yang terdistribusi bagi investor;
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan (pemantau pasar), BMD dan lembaga keuangan;
4. Meningkatkan manajemen transportasi/perikanan sehingga transportasi dapat menunjang antara pariwisata dan umum;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan fasilitas perikanan;
6. Memfasilitas terwujudnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur.

**Tabel 6.7 Strategi dan Aksi Kebijakan Kota Sawahlunto pada Misi 7**

MISI 7 : Meningkatkan Jaringan Sosial dan Ekonomi antara Nasional dan Internasional			
TUJUAN PROGRAM	MASALAH	STRATEGI	AKSI KEBIJAKAN
1	2	3	4
Untuk Meningkatkan Kegiatan, Peranan dan Aktivitas dalam Rangka Pengembangan Ekonomi dan Sosial	1. Terjadinya kerjasama pendanaan dalam dan pengalihan, perbaikan modal	Meningkatkan kerjasama antar daerah dan investor serta mengoptimalkan PUM yang sudah ada	1. Meningkatkan proses ekspor-impor perikanan daerah
			2. Meningkatkan RUM berteknologi yang terdistribusi bagi investor
			3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perusahaan daerah, BMD dan lembaga keuangan
	2. Meningkatkan Akumulasi dalam daerah dan dengan daerah lainnya	Pemasukan pengorbanan dan pengalihan lahan alternatif dari ke-capaian RUM dan investasi dari daerah lainnya	1. Meningkatkan Manajemen Kegiatan, Peranan dan Aktivitas dalam Rangka Pengembangan Ekonomi dan Sosial
			2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan fasilitas perikanan
			3. Memfasilitas Terwujudnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur

## BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

### 7.1. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah diuraikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Bab V, serta strategi dan arah kebijakan pada Bab VI, pada Bab VII ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengembawa keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja umum yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan (juga menjadi dasar berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam periode 5 tahun mendatang) serta diuraikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. Program-program tersebut merupakan langkah nyata yang akan dilakukan Pemerintah Kota Sawahlunto pada periode 2013-2018.

Sebelum diuraikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam implementasinya secara operasional, program-program yang telah dirumuskan harus dijabarkan menjadi urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sekaligus ditentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang menjadi pemegang jawab dan setiap program tersebut, sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SOPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dalam rangka merumuskan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah disusun dengan tujuan untuk mengembawa keterkaitan bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja umum yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan hingga mencapai daerah berkeseluruhan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, pemerintah daerah untuk mengidentifikasi atau mengidentifikasi berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, diuraikan kebijakan umum agar dapat mengidentifikasi program-program prioritas yang relevan. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program prioritas yang tepat, kebijakan umum tersebut dalam bentuk konsep atau strateginya, sebagai berikut:

1. Kebijakan pada **perspektif masyarakat/masyarakat sipil** kebijakan yang dapat menghasilkan kebijakan segmentasi masyarakat yang akan difokuskan, ketertarikan dan ekspansi sumber daya dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada **perspektif proses internal** adalah kebijakan yang operasionalisasi tingkat dan lembaga pemerintahan yang mendukung proses pemerintahan nilai dan proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan pelayanan layanan pada segmentasi masyarakat yang relevan.
3. Kebijakan pada **perspektif kelembagaan** yaitu kebijakan yang mendukung upaya-upaya yang meningkatkan kinerja masa depan seperti investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada **perspektif keuangan** yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengidentifikasi situasi anggaran, sumber biaya, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Setelah kebijakan umum dapat dijabarkan selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam pelaksanaan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang terdapat dalam bentuk program prioritas. Visi dan misi adalah juga kerangka perumusan program pembangunan daerah adalah inti dan penyusunan strategi itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun. Program pembangunan daerah merupakan eksekusi dari program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan atau selanjutnya kerangka mengadopsi program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang berdasar strategis.

#### **PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

##### **PRIORITAS 1: PENGEMBANGAN EKONOMI KEPARİYATAN YANG BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, MANDIRI DAN DAYA SAING**

Prioritas pengembangan Ekonomi KeparİYatan Yang Berbasis Pada Pengembangan (Ekonomi Kreatif, Mandiri dan Daya Saing) diarahkan pada (a) Pengembangan sektor industri kecil dan menengah, dengan trik baru pada pengembangan produk unggulan, (b) Pengembangan sektor perdagangan dengan meningkatkan peran perdagangan produk-produk kecil (c) Peningkatan peran wilayah pedesaan sebagai aktor penggerak ekonomi daerah (d) Pengembangan Sektor Pertanian dengan melalui peningkatan keseimbangan antara on-farm dan off-farm.

##### **PRIORITAS 2: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKARA ADIL DAN MERATA**

Prioritas Pengembangan Infrastruktur Ekara Adil dan Merata diarahkan pada (a) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur perhubungan (b) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik (c) Pengembangan energi alternatif berbasis pemanfaatan limbah, baik limbah rumah maupun industri untuk keperluan akses listrik (d) Pengembangan Infrastruktur Olahraga, (e) Mengefisienkan Lahan Tempa Pemukiman Umum (TPU), (f) Meningkatkan pembangunan sarana transportasi yang berbasis dalam rencana pengembangan kereta api.

##### **PRIORITAS 3: PENINGKATAN KUALITAS KESELEHAN SOSIAL MELALUI PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN NILAI-NILAI AGAMA, ADAT DAN BUDI PEKERTI**

Pembangunan manusia awal diarahkan untuk menempatkan fungsi dan peran agama dan adat sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, menghargai prestasi, dan menjadi kebutuhan pendukung guna mencapai Kota Sawahlunto yang religius, beradab dan berkeadilan. Selama ini telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan para pemuda agamis dan adat di Kota Sawahlunto untuk membangun harmoni sosial, hubungan internal, antar umat beragama dan antar suku yang aman, damai, dan saling menghargai. Dimulai berakutan ini sangat penting dalam upaya membangun masyarakat Kota Sawahlunto yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna keberagaman sosial, sehingga terdapat suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, bangga rasa dan harmonis. Pembangunan sumber daya manusia dengan pemahaman dan kualitas keadaban sosial yang semakin meningkat dapat dilakukan dalam beberapa cara dan pendekatan yaitu peningkatan pendidikan, kualitas pemerintahan agama dan pendidikan adat pada

semas jalur, jejak dan jaringan pendidikan. Selain itu melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penggunaan sarana dan prasarana, serta peningkatan efisiensi layanan untuk bersama dengan akses yang sama bagi setiap peserta agama. Upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga social keagamaan dan lembaga adat juga harus dilakukan.

#### **PRIORITAS 4: MENJALIN KEHIDUPAN SOCIAL YANG HARMONIS DALAM KOMPOSISI MASYARAKAT YANG HETEROGEN DAN BERBEDA AGAMA**

Untuk mendukung terwujudnya kehidupan social yang harmonis dalam komposisi masyarakat yang heterogen dan beda agama akan diberikan programnya yaitu : (a) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh aspek masyarakat dalam memperoleh hak-hak dasar menaati agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. (b) Mendukung aktifitas lembaga pendidikan untuk turut serta memambuhkan rasa kebanggaan dan kebangsaan serta penanaman nilai-nilai keagamaan dalam upaya menumbuhkembangkan sikap toleransi secara positif di lingkungan masyarakat yang beragam.

#### **PRIORITAS 5: PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER**

Pendidikan tidak hanya sekedar penyediaan nilai intelektual semata, tetapi juga menanamkan nilai karakter karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata kelola, budaya dan adat istiadat. Pendidikan berkarakter dapat dipahami sebagai alat dasar, keprithaman, pertakutirngan) laku, dan kebiasaan yang berpijak. Pendidikan berkarakter adalah upaya penyediaan layanan belajar peserta didik yang berdimensi agama, social, budaya, yang mampu diwujudkan dalam bentuk buku, poster, teks dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, maupun keprithaman. Langkah-langkah aplikasi yang dapat dilakukan antara lain : (a) Mendukung kebiasaan dan perilaku yang terpacu sejalan dengan nilai-nilai universal, tradisi budaya, kesepakatan social dan etipons. (b) Memberikan forum keprithaman yang bertanggung jawab sebagai guru/pemerintah. (c) Memupuk kelompok mental peserta didik terhadap situasi sekitarnya, sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang, baik secara individu maupun social. (d) Meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi alat tarca yang dapat merangsang diri sendiri, orang lain dan lingkungan. (e) Agar peserta didik memahami dan menghayati nilai-nilai yang relevan bagi perkembangan dan penghayatan luhur dan martabat manusia. Strategi yang akan diterapkan dalam penguatan pendidikan berkarakter yaitu dengan menggunakan strategi integrasi dalam mata pelajaran lainnya. Nilai-nilai karakter dapat disampaikan melalui mata pelajaran Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Jasmani dan Olahraga, IPA, Bahasa Indonesia dan Pengembangan Diri.

#### **PRIORITAS 6: PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIHAN, SUPREMACI HUKUM DAN HAM**

Dalam rangka untuk meningkatkan keamanan dan ketertihan, maka cara-cara yang dapat diupayakan antara : (a) Revitalisasi system keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, mencegah terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan pengrusakan dan penyalahgunaan narkoba. (b) Meningkatkan kemampuan mencegah, menangani dan menindak kejahatan.





terutama melalui diskusi dan dengan melibatkan para tokoh masyarakat; (d) Meningkatkan kerja sama dengan institusi penanggung jawab kesehatan dalam upaya menciptakan keamanan dan kesehatan masyarakat; (e) Pemberian insentif-praktik pengasah nilai-nilai dan keterampilan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk semangat bekerja dan membangun komunitas politik pemeliharaan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungannya.

#### **PRIORITAS 7: Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlunya Menjaga Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan**

Praktik Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap perlunya menjaga keamanan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan akan diupayakan dengan cara: (a) Memberi bantuan teknis kepada warga masyarakat, baik masyarakat terutama untuk keluarga miskin, terutama dengan pemberian insentif untuk berbagai jenis layanan kesehatan yang berorientasi sebagai "alat pembayaran" di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik rumah sakit umum, puskesmas maupun pusat kesehatan; (b) Pengembangan kesadaran dan sarana kesehatan pada wilayah-wilayah yang kurang terlayani melalui cara lain; (c) Melakukan perbaikan-perbaikan kualitas lingkungan, seperti sanitasi, MCK, perbaikan lingkungan perumahan bagi keluarga miskin, sistem pemukiman air bersih, dan sarana lain dilakukan sejalan dengan kebutuhan; (d) Meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kesehatan, kepatutan dan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial.

#### **PRIORITAS 8: Lanjutan RUPU Berbasis Pemberdayaan**

Secara spesifik kebijakan pengembangan berkelanjutan diarahkan pada: (a) Penguatan berbagai kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan lebih berfokus kepada rakyat miskin serta komunitas dalam pelaksanaannya; (b) Mendorong berbagai masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan; (c) Pelaksanaan program pembangunan dasar untuk dan oleh rakyat yang diupayakan pada desa-desa dan tingkat-tingkat komunitas miskin; (d) Peningkatan pemukiman dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap intermediasi pangan yang memadai dan berakut; (e) Peningkatan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara gratis melalui program jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan program-program lain yang berkeadilan; (f) Peningkatan aksesibilitas dan layanan pendidikan dasar secara gratis dan berakut; (g) Peningkatan intermediasi dan akses masyarakat miskin terhadap rumah sakit, sanitasi dan lingkungan yang sehat serta keterlaksanaan fasilitas air bersih; (h) Peningkatan akses dan layanan perumahan dan pengentasan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan akses rumah (uang tunai) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada; (i) Pemertanian dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang unggul dalam masalah lingkungan kerja yang harmonis antar pelaku produksi, adanya perlindungan kesehatan dan keamanan kerja serta peningkatan aspek sosial berdasarkan standar kebutuhan hidup minimal; (j) Pengembangan jalur akses dan aksesibilitas pedesaan baik pada akses dasar, pemukiman dan pertambakan dengan mengembangkan produk unggulan yang unggul dan kompetitif; (k) Pemertanian kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan; (l) Pengembangan semua program sektoral yang diikat oleh prioritas utama pengentasan kemiskinan; (m) Pengembangan kerja dengan kalangan LSM dan perguruan tinggi dalam rangka fasilitas atau pemberdayaan masyarakat miskin dan berbagai program; (n) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam



pengambilan keputusan pembangunan terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melalui forum dialog yang kondusif.

Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakefisienan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program dilaksanakan dengan potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat. Sasaran terwujud program satu bentuk kemiskinan ini adalah (a) Menurunnya prosentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan; (b) Terpentingnya kemampuan pangan yang berakut dan terjangkau; (c) Terpentingnya pelayanan dan jaminan pelayanan kesehatan sehingga diadiri secara gratis dan bermutu; (d) Terpentingnya pelayanan pendidikan dasar secara gratis, bermutu dan merata; (e) Terpentingnya kesehatan perumahan dan sanitasi yang layak dan aman serta kebersihan air bersih bagi masyarakat miskin; (f) Terwujudnya kesempatan kerja dan berusaha; (g) Terwujudnya akses permodalan dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha; (h) Terwujudnya pusat pengembangan cluster ekonomi kawasan pedesaan dan pembangunan masyarakat miskin dalam pengembangan potensi cluster pedesaan; (i) Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan kapasitas kelompok masyarakat (khususnya) dalam mengelola usaha baik secara mandiri maupun kolektif; (j) Terwujudnya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan menjaga kualitas lingkungan hidup. (k) Mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan seputaran; (l) Terwujudnya integrasi program sektoral yang secara nyata berorientasi pada peningkatan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

#### **PRORITAS 9: PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN DI SEMUA BIDANG DAN TERJAMINYA KESTERAPAN GENDER**

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta memastikan gender dilaksanakan melalui : (a) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; (b) Meningkatkan peran ketutupan dan layanan kesehatan, serta bidang pemerintahan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya human perempuan; (c) Pengakuan keberagaman, koordinasi, dan jaring pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

#### **PRORITAS 10: PENINGKATAN PERAN OLAHRAGA DAN PEMERAN KEPEREMPUAN**

Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan adalah kesegaran generasi muda untuk menerima manfaat esat pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan pendidikan dan kesehatan menjadi faktor utama. Namun demikian, selain kedua faktor tersebut, faktor lain yang juga cukup berpengaruh adalah pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Dalam konteks yang seperti ini, pembinaan olahraga seperti bola di Kota Sawahlunto menjadi prioritas pembinaannya, karena olah raga seperti bola akan itu, kenyataannya sudah menjadi alat marketing komunikasi yang efektif untuk membangun citra Kota Sawahlunto di masyarakat nasional. Di samping aspek bola, cabang-cabang olah raga yang lain perlu mendapat perhatian serius karena juga memiliki keefektifan yang besar seperti Judo, Judo, di Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini maka diperlukan fungsi Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sawahlunto menjadi strategis dan harus

ditunjuk. Disamping itu, akan dilaksanakan program Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Kemudiannya ILC, sebagai salah satu solusi mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya dalam pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan pemuda.

**PRIORITAS 11: PEMBERATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYAN**

Prinsipnya Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani. Ditekankan pada: (a) Meningkatkan fungsi dan peran kepemimpinan daerah serta lawa organisasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan pembangunan secara mandiri; (b) Mewujudkan komitmen pemerintahan, dengan meniadai jarak kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi dan dengan Provinsi lainnya; antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, swasta / perguruan tinggi, dan LLD dalam lingkup wilayah Kota Sawahlunto antara lain dalam upaya pemertumbuhan perekonomian, peningkatan mutu-kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan wilayah secara umum; (c) Meningkatkan kemandirian keuangan dan penguasaan pembangunan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); (d) Mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik, sehingga pemerintahan masyarakat akan semakin meningkat pula; (e) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat; (f) Meningkatkan stabilitas kehidupan sosial politik dan sosial budaya yang dimediasi dalam mendorong perilaku aktif/peran serta masyarakat, kedaulatan kehidupan demokrasi; (g) Memanfaatkan fungsi komunikasi yang cepat dan optimal dalam pemerintahan sebagai akses responsive terhadap masyarakat melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memadai; (h) melakukan reformasi birokrasi, memantapkan paradigma, aparatur sebagai pelayanan masyarakat bukan melayani, terutama pada pusat pelayanan umum; (i) Penguasaan dan pemerintahan teknologi informasi, antara lain penguasaan system informasi keuangan daerah, pengembangan one stop service, pengembangan bursa tenaga kerja on line, penguasaan manajemen wilayah; (j) Penguasaan e-governance, e-government, e-development; (k) Penguasaan hukum dan penguasaan bagi aparatur.

**PRIORITAS 12: PENGEMBANGAN SEKTOR KEPARIWISATAAN**

Dalam upaya memanfaatkan pengelolaan objek wisata yang telah ada maka Pemerintah Kota Sawahlunto telah mendirikan Perusahaan Daerah yaitu PT. WWS (Wahana Wisata Sawahlunto) yang mempromosikan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata Kota Sawahlunto yaitu Waterboom, Bioskop 4D dan Wisata Kandi. Disamping mengelola dan mengembangkan objek wisata yang sudah ada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto perlu melaksanakan terdapat baru dari wisata objek wisata yang lebih diminati oleh wisatawan. Dalam upaya memarat minat wisatawan, pengembangan tempat-tempat tujuan wisata akan dilakukan melalui perbaikan ruang dan penyediaan fasilitas umum yang memadai dengan penekanan pada lingkungan sekitar tempat-tempat tujuan wisata tersebut, sehingga dapat menjadi pusat wisata dan produksi produk-produk unggulan Kota Sawahlunto.

**PRIORITAS 13: PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN POTENSI DAERAH**

Intervensi Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah tersebut yaitu (a) Melakukan perbaikan-pertemuan



dengan memberikan kemudahan akses dan mekanisme perizinan, perpajakan, keamanatan, pelayanan birokrasi dan perpedaan infrastruktur yang memungkinkan. (b) Memperluas perlindungan hukum atas usaha yang dilaksanakan oleh investor sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan tenang, aman dan nyaman serta menghindari terjadinya konflik antara pengusaha dan masyarakat sekitar. (c) Meningkatkan daya saing inovatif (in-cube local) agar tidak terpinggirkan oleh investor dari luar daerah. (d) Memberikan kemudahan investasi lintas sektor dan pembangunan melalui kebijakan usaha dan perbaikan infrastruktur guna mendorong kesinambungan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi antara sektor pertanian, agribisnis, wisata dan sektor perikanan. (e) Mendukung Terwujudnya Kebijakan Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur. (f) Mengembangkan kebijakan investasi pada pembangunan agribisnis dimana prioritas pengembangannya sektor pertanian dan perikanan. (g) Meningkatkan eksplorasi dan ekspansi Sumber Daya Mineral dan Sumber Daya Energi dan tanah galian lainnya. (h) Meningkatkan pemanfaatan/pengelolaan pengidulasi lingkungan hidup.

#### **PRINSIP 14: PERLUASAN JARINGAN SOSIAL, EKONOMI NASIONAL DAN INTERNASIONAL.**

Prinsip Perluasan jaringan sosial, ekonomi secara nasional dan internasional akan diartikan pada (a) Mengembangkan kerja sama tripartit (perusahaan daerah, pengusaha dan pekerja) (b) Mengembangkan promosi dan (c) investasi dengan mengutamakan keunggulan kompetitif dan kompetitif daerah, (d) meningkatkan kegiatan daerah dalam kegiatan regional, nasional dan internasional dan (e) meningkatkan produktivitas BUMD dan lembaga keuangan lainnya.

Selanjutnya akan melihat keterkaitan antara nilai dengan prinsip pembangunan, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dapat di lihat pada Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018







no	nama	deskripsi dan jenis tindakan		jumlah/total		jumlah persentase		nilai persentase
		jumlah	persentase	jumlah	persentase	jumlah	persentase	
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100





No	Subsidiary	Accounting and Audit Subsystem		Information Management		Production Management		Business Process	Other Management
		Accounting	Audit	Information	Management	Production	Management		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

Revised: 2010-01-01 10:00:00 AM

Page 1 of 1

No.	KETERANGAN	Jumlah dan Nilai (Rp)		Jumlah dan Nilai (Rp)		Jumlah dan Nilai (Rp)		Jumlah dan Nilai (Rp)	Keterangan
		Uraian	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									



No.	GAMBAR	KETERANGAN LAMBAK KATA: KETERANGAN		INSTRUKSI PENYAJIAN		KETERANGAN		PENGANTARAN PENYAJIAN		KETERANGAN	KETERANGAN			
		1	2	3	4	5	6	7	8					
5. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
a. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
b. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
c. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
d. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
e. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
f. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
g. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
h. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
i. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
j. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
k. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
l. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
m. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
n. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
o. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
p. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
q. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
r. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
s. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
t. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
u. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
v. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
w. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
x. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
y. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														
z. Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian														



No.	Indikator	Aspek yang dinilai		Skor	Catatan	Penilaian	Kategori	Catatan
		Aspek 1	Aspek 2					
1	Kemampuan Berpikir Kritis	1.1. Mengidentifikasi masalah	1.2. Menganalisis masalah	1.3. Menentukan solusi	1.4. Menjalankan solusi	1.5. Mengevaluasi solusi	1.6. Menyimpulkan hasil	1.7. Menyampaikan hasil
2		2.1. Mengidentifikasi masalah	2.2. Menganalisis masalah	2.3. Menentukan solusi	2.4. Menjalankan solusi	2.5. Mengevaluasi solusi	2.6. Menyimpulkan hasil	2.7. Menyampaikan hasil
3	Kemampuan Berpikir Kreatif	3.1. Mengidentifikasi masalah	3.2. Menganalisis masalah	3.3. Menentukan solusi	3.4. Menjalankan solusi	3.5. Mengevaluasi solusi	3.6. Menyimpulkan hasil	3.7. Menyampaikan hasil
4		4.1. Mengidentifikasi masalah	4.2. Menganalisis masalah	4.3. Menentukan solusi	4.4. Menjalankan solusi	4.5. Mengevaluasi solusi	4.6. Menyimpulkan hasil	4.7. Menyampaikan hasil
5	Kemampuan Berpikir Komputasi	5.1. Mengidentifikasi masalah	5.2. Menganalisis masalah	5.3. Menentukan solusi	5.4. Menjalankan solusi	5.5. Mengevaluasi solusi	5.6. Menyimpulkan hasil	5.7. Menyampaikan hasil
6		6.1. Mengidentifikasi masalah	6.2. Menganalisis masalah	6.3. Menentukan solusi	6.4. Menjalankan solusi	6.5. Mengevaluasi solusi	6.6. Menyimpulkan hasil	6.7. Menyampaikan hasil
7	Kemampuan Berpikir Komunikasi	7.1. Mengidentifikasi masalah	7.2. Menganalisis masalah	7.3. Menentukan solusi	7.4. Menjalankan solusi	7.5. Mengevaluasi solusi	7.6. Menyimpulkan hasil	7.7. Menyampaikan hasil
8		8.1. Mengidentifikasi masalah	8.2. Menganalisis masalah	8.3. Menentukan solusi	8.4. Menjalankan solusi	8.5. Mengevaluasi solusi	8.6. Menyimpulkan hasil	8.7. Menyampaikan hasil
9	Kemampuan Berpikir Kolaborasi	9.1. Mengidentifikasi masalah	9.2. Menganalisis masalah	9.3. Menentukan solusi	9.4. Menjalankan solusi	9.5. Mengevaluasi solusi	9.6. Menyimpulkan hasil	9.7. Menyampaikan hasil
10		10.1. Mengidentifikasi masalah	10.2. Menganalisis masalah	10.3. Menentukan solusi	10.4. Menjalankan solusi	10.5. Mengevaluasi solusi	10.6. Menyimpulkan hasil	10.7. Menyampaikan hasil









No.	Materi	Penerapan dan hasil pembelajaran		Penguasaan materi	Kemampuan		Peningkatan Pengetahuan	Materi	Hasil	Catatan
		1. Menganalisis	2. Menganalisis		3. Menganalisis	4. Menganalisis				
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
25.										
26.										
27.										
28.										
29.										
30.										
31.										
32.										
33.										
34.										
35.										
36.										
37.										
38.										
39.										
40.										
41.										
42.										
43.										
44.										
45.										
46.										
47.										
48.										
49.										
50.										
51.										
52.										
53.										
54.										
55.										
56.										
57.										
58.										
59.										
60.										
61.										
62.										
63.										
64.										
65.										
66.										
67.										
68.										
69.										
70.										
71.										
72.										
73.										
74.										
75.										
76.										
77.										
78.										
79.										
80.										
81.										
82.										
83.										
84.										
85.										
86.										
87.										
88.										
89.										
90.										
91.										
92.										
93.										
94.										
95.										
96.										
97.										
98.										
99.										
100.										

Penilaian dan Pengetahuan (Penilaian)

Penilaian dan Pengetahuan (Penilaian)











## **BAB VIII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DIHARTAI KESUTUTAN PENDANAAN**

Pada bab-bab terdahulu, telah diuraikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota secara mendasar menurut tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam 51 prioritas pembangunan, program-program tersebut adalah upaya-upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mengefektifkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan OPD terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas OPD dalam melaksanakan rencana kebijaksanaan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab OPD langsung dalam pencapaian Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Program dan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam 21 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Pemukiman, Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Masyarakat, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemanfaatan Modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Ketahanan Pangan, Koperasi, Komunikasi dan Informatika, dan Urusan Perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kehendak, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, dan Pendidikan.

Untuk dapat melaksanakan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan diukur bersama OPD dan kemudian disepakati dengan DPRD Provinsi. Pada target kinerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Penilaian output akan outcome pada indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada OPD dalam merencanakan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas pada perencanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Sedangkan pada strategi pembiayaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dialokasikan dalam rangka pencapaian target tersebut serta OPD penanggungjawab. Namun demikian pendanaan program dan kegiatan setiap tahunnya mengacu kepada pagu indikatif yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rincian program berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.1.

СЕРИЯ 8.1  
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ УДАЛ ПЕРИОДА КАПИТОЛИН ПОСЛЕДНИЙ  
ПРОФИЛЬ КРИВОЙ ПЕРИОДА КРИВОЙ  
ТАБЛИЦА 2012-2013

[illegible]





















Unit	Activity Program Project Initiative	Indicator (Metric) (Target)	Baseline (2010)	Year 2011		Year 2012		Year 2013		Year 2014		Status	
				Actual		Actual		Actual		Actual			
				Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit		
Unit 1	Activity 1	Indicator 1	Baseline 1	10	kg	15	kg	20	kg	25	kg	On Track	
				20	kg	25	kg	30	kg	35	kg	On Track	
				30	kg	35	kg	40	kg	45	kg	On Track	
				40	kg	45	kg	50	kg	55	kg	On Track	
				50	kg	55	kg	60	kg	65	kg	On Track	
				60	kg	65	kg	70	kg	75	kg	On Track	
				70	kg	75	kg	80	kg	85	kg	On Track	
				80	kg	85	kg	90	kg	95	kg	On Track	
				90	kg	95	kg	100	kg	105	kg	On Track	
				100	kg	105	kg	110	kg	115	kg	On Track	
Unit 2	Activity 2	Indicator 2	Baseline 2	10	kg	15	kg	20	kg	25	kg	On Track	
				20	kg	25	kg	30	kg	35	kg	On Track	
				30	kg	35	kg	40	kg	45	kg	On Track	
				40	kg	45	kg	50	kg	55	kg	On Track	
				50	kg	55	kg	60	kg	65	kg	On Track	
				60	kg	65	kg	70	kg	75	kg	On Track	
				70	kg	75	kg	80	kg	85	kg	On Track	
				80	kg	85	kg	90	kg	95	kg	On Track	
				90	kg	95	kg	100	kg	105	kg	On Track	
				100	kg	105	kg	110	kg	115	kg	On Track	
Unit 3	Activity 3	Indicator 3	Baseline 3	10	kg	15	kg	20	kg	25	kg	On Track	
				20	kg	25	kg	30	kg	35	kg	On Track	
				30	kg	35	kg	40	kg	45	kg	On Track	
				40	kg	45	kg	50	kg	55	kg	On Track	
				50	kg	55	kg	60	kg	65	kg	On Track	
				60	kg	65	kg	70	kg	75	kg	On Track	
				70	kg	75	kg	80	kg	85	kg	On Track	
				80	kg	85	kg	90	kg	95	kg	On Track	
				90	kg	95	kg	100	kg	105	kg	On Track	
				100	kg	105	kg	110	kg	115	kg	On Track	



Rang	Projektname in kurzer Beschreibung	Lokalisierung Stadt Region Land	Stadium des Projekts in %	Projektfortschritt												Bemerkungen Anmerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Zeitraum 2024						Zeitraum 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Plan Jahr	Ist Jahr	Plan Jahr	Ist Jahr	Plan Jahr	Ist Jahr	Plan Jahr	Ist Jahr	Plan Jahr	Ist Jahr	Plan Jahr	Ist Jahr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Projekt A in kurzer Beschreibung	Stadt A Region A Land A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10

[illegible]









Sl. No.	Name of the Institution	Address	Distance from the District Head Office	Details of the Institution												Remarks
				General Information				Financial Information				Academic Information				
				Year of Establishment	Type of Institution	Medium of Instruction	Level of Education	Annual Income	Capital	Fixed Assets	Current Assets	Number of Students	Number of Teachers	Number of Staff	Number of Rooms	
1	St. Xavier's College, Kottayam	Kottayam	10	1950	College	English	Higher Secondary	1000000	500000	1000000	1000000	1000	100	10	100	Good
2	St. Joseph's College, Kottayam	Kottayam	15	1955	College	English	Higher Secondary	800000	400000	800000	800000	800	80	8	80	Good
3	St. Ignace's College, Kottayam	Kottayam	20	1960	College	English	Higher Secondary	700000	350000	700000	700000	700	70	7	70	Good
4	St. Xavier's College, Kottayam	Kottayam	25	1965	College	English	Higher Secondary	600000	300000	600000	600000	600	60	6	60	Good
5	St. Francis College, Kottayam	Kottayam	30	1970	College	English	Higher Secondary	500000	250000	500000	500000	500	50	5	50	Good
6	St. Peter's College, Kottayam	Kottayam	35	1975	College	English	Higher Secondary	400000	200000	400000	400000	400	40	4	40	Good
7	St. John's College, Kottayam	Kottayam	40	1980	College	English	Higher Secondary	300000	150000	300000	300000	300	30	3	30	Good
8	St. Mary's College, Kottayam	Kottayam	45	1985	College	English	Higher Secondary	200000	100000	200000	200000	200	20	2	20	Good
9	St. Elizabeth's College, Kottayam	Kottayam	50	1990	College	English	Higher Secondary	100000	50000	100000	100000	100	10	1	10	Good
10	St. Anne's College, Kottayam	Kottayam	55	1995	College	English	Higher Secondary	50000	25000	50000	50000	50	5	0.5	50	Good

S/N	Strategic Outcome	Target Output Results Program for Strategic Outcomes																Remarks		
		Strategic Outcome	Indicator	Target Output Results Program for Strategic Outcomes				Target Output Results Program for Strategic Outcomes				Target Output Results Program for Strategic Outcomes				Target Output Results Program for Strategic Outcomes	Target Output Results Program for Strategic Outcomes		Target Output Results Program for Strategic Outcomes	Target Output Results Program for Strategic Outcomes
				Indicator	Target	Actual	Target	Actual	Indicator	Target	Actual	Indicator	Target	Actual	Indicator					
1	Strategic Outcome 1: Improved Access to Basic Services	Indicator 1.1: Access to Basic Services	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Strategic Outcome 2: Improved Quality of Basic Services	Indicator 2.1: Quality of Basic Services	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Strategic Outcome 3: Improved Access to Basic Services	Indicator 3.1: Access to Basic Services	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Strategic Outcome 4: Improved Quality of Basic Services	Indicator 4.1: Quality of Basic Services	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Strategic Outcome 5: Improved Access to Basic Services	Indicator 5.1: Access to Basic Services	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Strategic Outcome 6: Improved Quality of Basic Services	Indicator 6.1: Quality of Basic Services	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Strategic Outcome 7: Improved Access to Basic Services	Indicator 7.1: Access to Basic Services	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Strategic Outcome 8: Improved Quality of Basic Services	Indicator 8.1: Quality of Basic Services	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Strategic Outcome 9: Improved Access to Basic Services	Indicator 9.1: Access to Basic Services	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Strategic Outcome 10: Improved Quality of Basic Services	Indicator 10.1: Quality of Basic Services	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible]





[illegible]

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Utama (IKU) per Semester														Catatan	
				Semester I (2013/2014)							Semester II (2013/2014)								
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1. Kinerja Akademik	Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Rata-rata Nilai Ujian Akhir Semester (UAS)	Rata-rata Nilai Ujian Akhir Semester (UAS)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Nilai Rata-rata UAS	
				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
2. Kinerja Non Akademik	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Jumlah Kegiatan Ekstrakurikuler	Jumlah Kegiatan Ekstrakurikuler	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Kegiatan Ekstrakurikuler	
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
3. Kinerja Sosial	Indikator Kinerja Utama (IKU) 3: Jumlah Kegiatan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Kegiatan Sosial	
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100

13

[illegible]



[illegible]



Kode	Nama Kegiatan / Subkegiatan	Subsistem / Program / Kegiatan	Tahun Anggaran / Pelaksanaan	Grafik (Target dan Realisasi) / Rincian Anggaran										Catatan / Keterangan
				Tahun 2019					Tahun 2020					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												
		No. uraian kegiatan / subkegiatan / kegiatan												

Kategorie	Einheit	Beschreibung	Menge	Leistungsdaten												Anmerkungen
				Jahressumme				1. Halbjahr				2. Halbjahr				
				Jan	Feb	Mär	Q1	Jan	Feb	Mär	Q2	Jan	Feb	Mär	Q3	
Produktion	Stück	Produkt A	1000	120	110	130	360	130	140	150	420	140	160	170	470	Produkt A ist der Hauptartikel der Abteilung.
				110	120	140	370	140	150	160	450	150	170	180	500	
				130	140	150	420	150	160	170	480	160	180	190	530	
				140	150	160	450	160	170	180	510	170	190	200	560	
Produktion	Stück	Produkt B	800	90	85	95	270	95	100	110	305	100	110	120	330	Produkt B wird in der Abteilung B gefertigt.
				85	90	100	275	100	110	120	330	110	120	130	360	
				95	100	110	305	110	120	130	360	120	130	140	390	
				100	110	120	330	120	130	140	390	130	140	150	420	
Produktion	Stück	Produkt C	600	70	65	75	210	75	80	90	245	80	90	100	270	Produkt C ist ein Ersatzteil für Produkt A.
				65	70	80	215	80	90	100	270	90	100	110	300	
				75	80	90	245	90	100	110	300	100	110	120	330	
				80	90	100	270	100	110	120	330	110	120	130	360	
Produktion	Stück	Produkt D	400	50	45	55	150	55	60	70	185	60	70	80	210	Produkt D wird in der Abteilung C gefertigt.
				45	50	60	155	60	70	80	210	70	80	90	240	
				55	60	70	185	70	80	90	240	80	90	100	270	
				60	70	80	210	80	90	100	270	90	100	110	300	





Sl. No.		Institution Name	Address	Pin Code	Details of the Institution														Remarks
					General Information				Financial Information				Infrastructure				Total		
					Year of Establishment	Area (sq. ft.)	Capacity	Staff	Income (Rs.)	Expenditure (Rs.)	Assets (Rs.)	Liabilities (Rs.)	Land (sq. ft.)	Building (sq. ft.)	Other (sq. ft.)	Value (Rs.)			
1	St. Xavier's College, Palayamkottai	Palayamkottai, Tamil Nadu	626 001	1964	10000	500	100	1000000	500000	1000000	500000	10000	10000	20000	10000	10000	10000	10000	
2	St. Joseph's College, Palayamkottai	Palayamkottai, Tamil Nadu	626 001	1964	10000	500	100	1000000	500000	1000000	500000	10000	10000	20000	10000	10000	10000	10000	
3	St. Ignace's College, Palayamkottai	Palayamkottai, Tamil Nadu	626 001	1964	10000	500	100	1000000	500000	1000000	500000	10000	10000	20000	10000	10000	10000	10000	
4	St. Francis Xavier's College, Palayamkottai	Palayamkottai, Tamil Nadu	626 001	1964	10000	500	100	1000000	500000	1000000	500000	10000	10000	20000	10000	10000	10000	10000	
5	St. Peter's College, Palayamkottai	Palayamkottai, Tamil Nadu	626 001	1964	10000	500	100	1000000	500000	1000000	500000	10000	10000	20000	10000	10000	10000	10000	
6	St. John's College, Palayamkottai	Palayamkottai, Tamil Nadu	626 001	1964	10000	500	100	1000000	500000	1000000	500000	10000	10000	20000	10000	10000	10000	10000	
7	St. Mary's College, Palayamkottai	Palayamkottai, Tamil Nadu	626 001	1964	10000	500	100	1000000	500000	1000000	500000	10000	10000	20000	10000	10000	10000	10000	
8	St. George's College, Palayamkottai	Palayamkottai, Tamil Nadu	626 001	1964	10000	500	100	1000000	500000	1000000	500000	10000	10000	20000	10000	10000	10000	10000	
9	St. Andrew's College, Palayamkottai	Palayamkottai, Tamil Nadu	626 001	1964	10000	500	100	1000000	500000	1000000	500000	10000	10000	20000	10000	10000	10000	10000	
10	St. Basil's College, Palayamkottai	Palayamkottai, Tamil Nadu	626 001	1964	10000	500	100	1000000	500000	1000000	500000	10000	10000	20000	10000	10000	10000	10000	

Index	Project Name	Project Type	Project Status	Project Performance Indicators												Remarks
				Financial Performance						Operational Performance						
				Revenue	Cost	Profit	Margin	ROI	NPV	Output	Quality	Efficiency	Customer Satisfaction	Employee Satisfaction	Environmental Impact	
1	Project A	Construction	Completed	1000	800	200	20%	15%	100	1000	95%	90%	85%	80%	75%	Good
2	Project B	Manufacturing	In Progress	1200	950	250	21%	16%	110	1100	92%	88%	82%	78%	72%	Fair
3	Project C	Software Development	On Hold	800	600	200	25%	18%	90	800	90%	85%	80%	75%	70%	Poor
4	Project D	Research & Development	Completed	1500	1200	300	20%	14%	120	1400	98%	95%	90%	85%	80%	Excellent
5	Project E	Marketing Campaign	In Progress	600	450	150	25%	17%	70	550	93%	91%	88%	85%	82%	Good
6	Project F	Infrastructure Development	On Hold	900	700	200	22%	16%	100	800	90%	85%	80%	75%	70%	Fair
7	Project G	Human Resources	Completed	700	550	150	21%	15%	80	650	94%	92%	89%	86%	83%	Good
8	Project H	IT System Upgrade	In Progress	1100	850	250	23%	17%	110	1000	96%	94%	91%	88%	85%	Excellent
9	Project I	Product Launch	On Hold	500	350	150	30%	19%	60	450	91%	89%	86%	83%	80%	Fair
10	Project J	Customer Service	Completed	400	300	100	25%	18%	50	350	97%	96%	93%	90%	87%	Excellent



S/N	Project Name	Project Location	Project Type	Project Status	Project Budget Breakdown (in US\$)												Remarks
					Total Budget				Total Budget				Total Budget				
					Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	
1	Project A	Location A	Project A	Project A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Project A
2	Project B	Location B	Project B	Project B	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Project B
3	Project C	Location C	Project C	Project C	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	Project C
4	Project D	Location D	Project D	Project D	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	Project D
5	Project E	Location E	Project E	Project E	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Project E
6	Project F	Location F	Project F	Project F	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Project F
7	Project G	Location G	Project G	Project G	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	Project G
8	Project H	Location H	Project H	Project H	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	Project H
9	Project I	Location I	Project I	Project I	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Project I
10	Project J	Location J	Project J	Project J	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Project J



S/N	Project Name	Project Location	Project Period	Project Budget (USD)	Project Implementation Progress and Financial Performance												Remarks
					Quarterly Progress Report				Financial Performance				Project Status and Remarks				
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
1	Project A	Location A	Period A	1000000	100000	200000	300000	400000	100000	200000	300000	400000	100000	200000	300000	400000	Completed
2	Project B	Location B	Period B	2000000	200000	400000	600000	800000	200000	400000	600000	800000	200000	400000	600000	800000	In Progress
3	Project C	Location C	Period C	3000000	300000	600000	900000	1200000	300000	600000	900000	1200000	300000	600000	900000	1200000	On Hold
4	Project D	Location D	Period D	4000000	400000	800000	1200000	1600000	400000	800000	1200000	1600000	400000	800000	1200000	1600000	Completed
5	Project E	Location E	Period E	5000000	500000	1000000	1500000	2000000	500000	1000000	1500000	2000000	500000	1000000	1500000	2000000	In Progress
6	Project F	Location F	Period F	6000000	600000	1200000	1800000	2400000	600000	1200000	1800000	2400000	600000	1200000	1800000	2400000	On Hold
7	Project G	Location G	Period G	7000000	700000	1400000	2100000	2800000	700000	1400000	2100000	2800000	700000	1400000	2100000	2800000	Completed
8	Project H	Location H	Period H	8000000	800000	1600000	2400000	3200000	800000	1600000	2400000	3200000	800000	1600000	2400000	3200000	In Progress
9	Project I	Location I	Period I	9000000	900000	1800000	2700000	3600000	900000	1800000	2700000	3600000	900000	1800000	2700000	3600000	On Hold
10	Project J	Location J	Period J	10000000	1000000	2000000	3000000	4000000	1000000	2000000	3000000	4000000	1000000	2000000	3000000	4000000	Completed
11	Project K	Location K	Period K	11000000	1100000	2200000	3300000	4400000	1100000	2200000	3300000	4400000	1100000	2200000	3300000	4400000	In Progress
12	Project L	Location L	Period L	12000000	1200000	2400000	3600000	4800000	1200000	2400000	3600000	4800000	1200000	2400000	3600000	4800000	On Hold
13	Project M	Location M	Period M	13000000	1300000	2600000	3900000	5200000	1300000	2600000	3900000	5200000	1300000	2600000	3900000	5200000	Completed
14	Project N	Location N	Period N	14000000	1400000	2800000	4200000	5600000	1400000	2800000	4200000	5600000	1400000	2800000	4200000	5600000	In Progress
15	Project O	Location O	Period O	15000000	1500000	3000000	4500000	6000000	1500000	3000000	4500000	6000000	1500000	3000000	4500000	6000000	On Hold
16	Project P	Location P	Period P	16000000	1600000	3200000	4800000	6400000	1600000	3200000	4800000	6400000	1600000	3200000	4800000	6400000	Completed
17	Project Q	Location Q	Period Q	17000000	1700000	3400000	5100000	6800000	1700000	3400000	5100000	6800000	1700000	3400000	5100000	6800000	In Progress
18	Project R	Location R	Period R	18000000	1800000	3600000	5400000	7200000	1800000	3600000	5400000	7200000	1800000	3600000	5400000	7200000	On Hold
19	Project S	Location S	Period S	19000000	1900000	3800000	5700000	7600000	1900000	3800000	5700000	7600000	1900000	3800000	5700000	7600000	Completed
20	Project T	Location T	Period T	20000000	2000000	4000000	6000000	8000000	2000000	4000000	6000000	8000000	2000000	4000000	6000000	8000000	In Progress
21	Project U	Location U	Period U	21000000	2100000	4200000	6300000	8400000	2100000	4200000	6300000	8400000	2100000	4200000	6300000	8400000	On Hold
22	Project V	Location V	Period V	22000000	2200000	4400000	6600000	8800000	2200000	4400000	6600000	8800000	2200000	4400000	6600000	8800000	Completed
23	Project W	Location W	Period W	23000000	2300000	4600000	6900000	9200000	2300000	4600000	6900000	9200000	2300000	4600000	6900000	9200000	In Progress
24	Project X	Location X	Period X	24000000	2400000	4800000	7200000	9600000	2400000	4800000	7200000	9600000	2400000	4800000	7200000	9600000	On Hold
25	Project Y	Location Y	Period Y	25000000	2500000	5000000	7500000	10000000	2500000	5000000	7500000	10000000	2500000	5000000	7500000	10000000	Completed
26	Project Z	Location Z	Period Z	26000000	2600000	5200000	7800000	10400000	2600000	5200000	7800000	10400000	2600000	5200000	7800000	10400000	In Progress
27	Project AA	Location AA	Period AA	27000000	2700000	5400000	8100000	10800000	2700000	5400000	8100000	10800000	2700000	5400000	8100000	10800000	On Hold
28	Project AB	Location AB	Period AB	28000000	2800000	5600000	8400000	11200000	2800000	5600000	8400000	11200000	2800000	5600000	8400000	11200000	Completed
29	Project AC	Location AC	Period AC	29000000	2900000	5800000	8700000	11600000	2900000	5800000	8700000	11600000	2900000	5800000	8700000	11600000	In Progress
30	Project AD	Location AD	Period AD	30000000	3000000	6000000	9000000	12000000	3000000	6000000	9000000	12000000	3000000	6000000	9000000	12000000	On Hold
31	Project AE	Location AE	Period AE	31000000	3100000	6200000	9300000	12400000	3100000	6200000	9300000	12400000	3100000	6200000	9300000	12400000	Completed
32	Project AF	Location AF	Period AF	32000000	3200000	6400000	9600000	12800000	3200000	6400000	9600000	12800000	3200000	6400000	9600000	12800000	In Progress
33	Project AG	Location AG	Period AG	33000000	3300000	6600000	9900000	13200000	3300000	6600000	9900000	13200000	3300000	6600000	9900000	13200000	On Hold
34	Project AH	Location AH	Period AH	34000000	3400000	6800000	10200000	13600000	3400000	6800000	10200000	13600000	3400000	6800000	10200000	13600000	Completed
35	Project AI	Location AI	Period AI	35000000	3500000	7000000	10500000	14000000	3500000	7000000	10500000	14000000	3500000	7000000	10500000	14000000	In Progress
36	Project AJ	Location AJ	Period AJ	36000000	3600000	7200000	10800000	14400000	3600000	7200000	10800000	14400000	3600000	7200000	10800000	14400000	On Hold
37	Project AK	Location AK	Period AK	37000000	3700000	7400000	11100000	14800000	3700000	7400000	11100000	14800000	3700000	7400000	11100000	14800000	Completed
38	Project AL	Location AL	Period AL	38000000	3800000	7600000	11400000	15200000	3800000	7600000	11400000	15200000	3800000	7600000	11400000	15200000	In Progress
39	Project AM	Location AM	Period AM	39000000	3900000	7800000	11700000	15600000	3900000	7800000	11700000	15600000	3900000	7800000	11700000	15600000	On Hold
40	Project AN	Location AN	Period AN	40000000	4000000	8000000	12000000	16000000	4000000	8000000	12000000	16000000	4000000	8000000	12000000	16000000	Completed
41	Project AO	Location AO	Period AO	41000000	4100000	8200000	12300000	16400000	4100000	8200000	12300000	16400000	4100000	8200000	12300000	16400000	In Progress
42	Project AP	Location AP	Period AP	42000000	4200000	8400000	12600000	16800000	4200000	8400000	12600000	16800000	4200000	8400000	12600000	16800000	On Hold
43	Project AQ	Location AQ	Period AQ	43000000	4300000	8600000	12900000	17200000	4300000	8600000	12900000	17200000	4300000	8600000	12900000	17200000	Completed
44	Project AR	Location AR	Period AR	44000000	4400000	8800000	13200000	17600000	4400000	8800000	13200000	17600000	4400000	8800000	13200000	17600000	In Progress
45	Project AS	Location AS	Period AS	45000000	4500000	9000000	13500000	18000000	4500000	9000000	13500000	18000000	4500000	9000000	13500000	18000000	On Hold
46	Project AT	Location AT	Period AT	46000000	4600000	9200000	13800000	18400000	4600000	9200000	13800000	18400000	4600000	9200000	13800000	18400000	Completed
47	Project AU	Location AU	Period AU	47000000	4700000	9400000	14100000	18800000	4700000	9400000	14100000	18800000	4700000	9400000	14100000	18800000	In Progress
48	Project AV	Location AV	Period AV	48000000	4800000	9600000	14400000	19200000	4800000	9600000	14400000	19200000	4800000	9600000	14400000	19200000	On Hold
49	Project AW	Location AW	Period AW	49000000	4900000	9800000	14700000	19600000	4900000	9800000	14700000	19600000	4900000	9800000	14700000	19600000	Completed
50	Project AX	Location AX	Period AX	50000000	5000000	10000000	15000000	20000000	5000000	10000000	15000000	20000000	5000000	10000000	15000000	20000000	In Progress
51	Project AY	Location AY	Period AY	51000000	5100000	10200000	15300000	20400000	5100000	10200000	15300000	20400000	5100000	10200000	15300000	20400000	On Hold
52	Project AZ	Location AZ	Period AZ	52000000	5200000	10400000	15600000	20800000	5200000	10400000	15600000	20800000	5200000	10400000	15600000	20800000	Completed
53	Project BA	Location BA	Period BA	53000000	5300000	10600000	15900000	21200000	5300000	10600000	15900000	21200000	5300000	10600000	15900000	21200000	In Progress
54	Project BB	Location BB	Period BB	54000000	5400000	10800000	16200000	21600000	5400000	10800000	16200000	21600000	5400000	10800000	16200000	21600000	On Hold
55	Project BC	Location BC	Period BC	55000000	5500000	11000000	16500000	22000000	5500000	11000000	16500000	22000000	5500000	11000000	16500000	22000000	Completed
56	Project BD	Location BD	Period BD	56000000	5600000	11200000	16800000	22400000	5600000	11200000	16800000	22400000	5600000	11200000	16800000	224	

Kode	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran (Target)	Rencana Kerja Tahun 2013										Catatan		
				Bulan Januari		Bulan Februari		Bulan Maret		Bulan April		Bulan Mei			Bulan Juni	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
3	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
4	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
5	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
6	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
7	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
8	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
9	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
10	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%

Large-Scale Strategic Program for Sustainable Development															
S/N	Project Name	Project Description	Project Status	Financial Performance (USD Millions)										Remarks	
				Actual Performance					Budgeted Performance						
				Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5		
1	Infrastructure Development	Construction of roads and bridges	Completed	120	150	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
2	Healthcare Services	Establishment of clinics and hospitals	In Progress	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
3	Educational Programs	Construction of schools and universities	Completed	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480
4	Water Supply Systems	Installation of water treatment plants	In Progress	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225
5	Renewable Energy Projects	Development of solar and wind farms	Completed	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310
6	Urban Planning Initiatives	Development of smart cities and urban infrastructure	In Progress	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235
7	Disaster Preparedness	Construction of disaster relief centers and evacuation routes	Completed	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
8	Environmental Conservation	Establishment of national parks and wildlife reserves	In Progress	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
9	Space Exploration Programs	Development of space technology and satellite systems	Completed	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330
10	Artificial Intelligence Research	Development of AI algorithms and applications	In Progress	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
11	Quantum Computing Projects	Research and development in quantum computing	Completed	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
12	Blockchain Technology Applications	Implementation of blockchain in various sectors	In Progress	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
13	Autonomous Vehicle Development	Research and development of self-driving cars	Completed	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
14	Biotechnology Innovations	Development of new drugs and medical devices	In Progress	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
15	Space Colonization Initiatives	Research and development for long-term space habitation	Completed	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16







S/N	Project Name	Project Location	Project Period	Project Status	Project Budget (USD)										Project Manager																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Project Budget (USD)					Project Budget (USD)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Project A	Location A	2015-2016	Completed	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000</

No	Problems in the area of the river	Location	Area (km <sup>2</sup> )	Number of people affected (in thousands)										Remarks									
				Number of people affected (in thousands)																			
				Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male										
1	Problems in the area of the river	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
2	Problems in the area of the river	2	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4
3	Problems in the area of the river	3	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6
4	Problems in the area of the river	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8
5	Problems in the area of the river	5	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10
6	Problems in the area of the river	6	6	6	12	6	6	12	6	6	12	6	6	12	6	6	12	6	6	12	6	6	12
7	Problems in the area of the river	7	7	7	14	7	7	14	7	7	14	7	7	14	7	7	14	7	7	14	7	7	14
8	Problems in the area of the river	8	8	8	16	8	8	16	8	8	16	8	8	16	8	8	16	8	8	16	8	8	16
9	Problems in the area of the river	9	9	9	18	9	9	18	9	9	18	9	9	18	9	9	18	9	9	18	9	9	18
10	Problems in the area of the river	10	10	10	20	10	10	20	10	10	20	10	10	20	10	10	20	10	10	20	10	10	20
11	Problems in the area of the river	11	11	11	22	11	11	22	11	11	22	11	11	22	11	11	22	11	11	22	11	11	22
12	Problems in the area of the river	12	12	12	24	12	12	24	12	12	24	12	12	24	12	12	24	12	12	24	12	12	24
13	Problems in the area of the river	13	13	13	26	13	13	26	13	13	26	13	13	26	13	13	26	13	13	26	13	13	26
14	Problems in the area of the river	14	14	14	28	14	14	28	14	14	28	14	14	28	14	14	28	14	14	28	14	14	28
15	Problems in the area of the river	15	15	15	30	15	15	30	15	15	30	15	15	30	15	15	30	15	15	30	15	15	30
16	Problems in the area of the river	16	16	16	32	16	16	32	16	16	32	16	16	32	16	16	32	16	16	32	16	16	32
17	Problems in the area of the river	17	17	17	34	17	17	34	17	17	34	17	17	34	17	17	34	17	17	34	17	17	34
18	Problems in the area of the river	18	18	18	36	18	18	36	18	18	36	18	18	36	18	18	36	18	18	36	18	18	36
19	Problems in the area of the river	19	19	19	38	19	19	38	19	19	38	19	19	38	19	19	38	19	19	38	19	19	38
20	Problems in the area of the river	20	20	20	40	20	20	40	20	20	40	20	20	40	20	20	40	20	20	40	20	20	40
21	Problems in the area of the river	21	21	21	42	21	21	42	21	21	42	21	21	42	21	21	42	21	21	42	21	21	42
22	Problems in the area of the river	22	22	22	44	22	22	44	22	22	44	22	22	44	22	22	44	22	22	44	22	22	44
23	Problems in the area of the river	23	23	23	46	23	23	46	23	23	46	23	23	46	23	23	46	23	23	46	23	23	46
24	Problems in the area of the river	24	24	24	48	24	24	48	24	24	48	24	24	48	24	24	48	24	24	48	24	24	48
25	Problems in the area of the river	25	25	25	50	25	25	50	25	25	50	25	25	50	25	25	50	25	25	50	25	25	50
26	Problems in the area of the river	26	26	26	52	26	26	52	26	26	52	26	26	52	26	26	52	26	26	52	26	26	52
27	Problems in the area of the river	27	27	27	54	27	27	54	27	27	54	27	27	54	27	27	54	27	27	54	27	27	54
28	Problems in the area of the river	28	28	28	56	28	28	56	28	28	56	28	28	56	28	28	56	28	28	56	28	28	56
29	Problems in the area of the river	29	29	29	58	29	29	58	29	29	58	29	29	58	29	29	58	29	29	58	29	29	58
30	Problems in the area of the river	30	30	30	60	30	30	60	30	30	60	30	30	60	30	30	60	30	30	60	30	30	60
31	Problems in the area of the river	31	31	31	62	31	31	62	31	31	62	31	31	62	31	31	62	31	31	62	31	31	62
32	Problems in the area of the river	32	32	32	64	32	32	64	32	32	64	32	32	64	32	32	64	32	32	64	32	32	64
33	Problems in the area of the river	33	33	33	66	33	33	66	33	33	66	33	33	66	33	33	66	33	33	66	33	33	66
34	Problems in the area of the river	34	34	34	68	34	34	68	34	34	68	34	34	68	34	34	68	34	34	68	34	34	68
35	Problems in the area of the river	35	35	35	70	35	35	70	35	35	70	35	35	70	35	35	70	35	35	70	35	35	70
36	Problems in the area of the river	36	36	36	72	36	36	72	36	36	72	36	36	72	36	36	72	36	36	72	36	36	72
37	Problems in the area of the river	37	37	37	74	37	37	74	37	37	74	37	37	74	37	37	74	37	37	74	37	37	74
38	Problems in the area of the river	38	38	38	76	38	38	76	38	38	76	38	38	76	38	38	76	38	38	76	38	38	76
39	Problems in the area of the river	39	39	39	78	39	39	78	39	39	78	39	39	78	39	39	78	39	39	78	39	39	78
40	Problems in the area of the river	40	40	40	80	40	40	80	40	40	80	40	40	80	40	40	80	40	40	80	40	40	80
41	Problems in the area of the river	41	41	41	82	41	41	82	41	41	82	41	41	82	41	41	82	41	41	82	41	41	82
42	Problems in the area of the river	42	42	42	84	42	42	84	42	42	84	42	42	84	42	42	84	42	42	84	42	42	84
43	Problems in the area of the river	43	43	43	86	43	43	86	43	43	86	43	43	86	43	43	86	43	43	86	43	43	86
44	Problems in the area of the river	44	44	44	88	44	44	88	44	44	88	44	44	88	44	44	88	44	44	88	44	44	88
45	Problems in the area of the river	45	45	45	90	45	45	90	45	45	90	45	45	90	45	45	90	45	45	90	45	45	90
46	Problems in the area of the river	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	46	46	92	46	46	92	46	46	92	46	46	92
47	Problems in the area of the river	47	47	47	94	47	47	94	47	47	94	47	47	94	47	47	94	47	47	94	47	47	94
48	Problems in the area of the river	48	48	48	96	48	48	96	48	48	96	48	48	96	48	48	96	48	48	96	48	48	96
49	Problems in the area of the river	49	49	49	98	49	49	98	49	49	98	49	49	98	49	49	98	49	49	98	49	49	98
50	Problems in the area of the river	50	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	50	100









[illegible]

[illegible]









Index	Project Name	Project Location	Project Type	Project Status	Project Budget (USD)												Project Description
					Project Budget (USD)												
					Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Year 11	Year 12	
1	Project A	Location A	Project A	Project A	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	Project A Description
2	Project B	Location B	Project B	Project B	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	Project B Description
3	Project C	Location C	Project C	Project C	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	Project C Description
4	Project D	Location D	Project D	Project D	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	Project D Description
5	Project E	Location E	Project E	Project E	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	Project E Description
6	Project F	Location F	Project F	Project F	350	700	1050	1400	1750	2100	2450	2800	3150	3500	3850	4200	Project F Description
7	Project G	Location G	Project G	Project G	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	Project G Description
8	Project H	Location H	Project H	Project H	450	900	1350	1800	2250	2700	3150	3600	4050	4500	4950	5400	Project H Description
9	Project I	Location I	Project I	Project I	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	Project I Description
10	Project J	Location J	Project J	Project J	550	1100	1650	2200	2750	3300	3850	4400	4950	5500	6050	6600	Project J Description
11	Project K	Location K	Project K	Project K	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200	Project K Description
12	Project L	Location L	Project L	Project L	650	1300	1950	2600	3250	3900	4550	5200	5850	6500	7150	7800	Project L Description
13	Project M	Location M	Project M	Project M	700	1400	2100	2800	3500	4200	4900	5600	6300	7000	7700	8400	Project M Description
14	Project N	Location N	Project N	Project N	750	1500	2250	3000	3750	4500	5250	6000	6750	7500	8250	9000	Project N Description
15	Project O	Location O	Project O	Project O	800	1600	2400	3200	4000	4800	5600	6400	7200	8000	8800	9600	Project O Description
16	Project P	Location P	Project P	Project P	850	1700	2550	3400	4250	5100	5950	6800	7650	8500	9350	10200	Project P Description
17	Project Q	Location Q	Project Q	Project Q	900	1800	2700	3600	4500	5400	6300	7200	8100	9000	9900	10800	Project Q Description
18	Project R	Location R	Project R	Project R	950	1900	2850	3800	4750	5700	6650	7600	8550	9500	10450	11400	Project R Description
19	Project S	Location S	Project S	Project S	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	Project S Description
20	Project T	Location T	Project T	Project T	1050	2100	3150	4200	5250	6300	7350	8400	9450	10500	11550	12600	Project T Description
21	Project U	Location U	Project U	Project U	1100	2200	3300	4400	5500	6600	7700	8800	9900	11000	12100	13200	Project U Description
22	Project V	Location V	Project V	Project V	1150	2300	3450	4600	5750	6900	8050	9200	10350	11500	12650	13800	Project V Description
23	Project W	Location W	Project W	Project W	1200	2400	3600	4800	6000	7200	8400	9600	10800	12000	13200	14400	Project W Description
24	Project X	Location X	Project X	Project X	1250	2500	3750	5000	6250	7500	8750	10000	11250	12500	13750	15000	Project X Description
25	Project Y	Location Y	Project Y	Project Y	1300	2600	3900	5200	6500	7800	9100	10400	11700	13000	14300	15600	Project Y Description
26	Project Z	Location Z	Project Z	Project Z	1350	2700	4050	5400	6750	8100	9450	10800	12150	13500	14850	16200	Project Z Description

[illegible]

S/N	Project Name	Project Location	National Health Insurance Scheme (NHIS) Performance Indicators																Remarks
			2018-2019						2019-2020						2020-2021				
			2018-2019			2019-2020			2020-2021			2020-2021			2020-2021				
			Target	Actual	Variance	Target	Actual	Variance	Target	Actual	Variance	Target	Actual	Variance	Target	Actual	Variance		
1	Health Insurance Scheme (HIS)	Abuja	100	95	-5	95%	100	90	-10	90%	100	95	-5	95%	100	98	-2	98%	Good
2	Health Insurance Scheme (HIS)	Kaduna	100	98	-2	98%	100	95	-5	95%	100	90	-10	90%	100	92	-8	92%	Good
3	Health Insurance Scheme (HIS)	Kano	100	92	-8	92%	100	85	-15	85%	100	80	-20	80%	100	85	-15	85%	Good
4	Health Insurance Scheme (HIS)	Katsina	100	90	-10	90%	100	80	-20	80%	100	75	-25	75%	100	78	-22	78%	Good
5	Health Insurance Scheme (HIS)	Kogi	100	85	-15	85%	100	75	-25	75%	100	70	-30	70%	100	72	-28	72%	Good
6	Health Insurance Scheme (HIS)	Kwara	100	80	-20	80%	100	70	-30	70%	100	65	-35	65%	100	68	-32	68%	Good
7	Health Insurance Scheme (HIS)	Lagos	100	95	-5	95%	100	90	-10	90%	100	95	-5	95%	100	98	-2	98%	Good
8	Health Insurance Scheme (HIS)	Niger	100	85	-15	85%	100	75	-25	75%	100	70	-30	70%	100	72	-28	72%	Good
9	Health Insurance Scheme (HIS)	Nigeria	100	90	-10	90%	100	85	-15	85%	100	90	-10	90%	100	92	-8	92%	Good
10	Health Insurance Scheme (HIS)	Plateau	100	80	-20	80%	100	70	-30	70%	100	65	-35	65%	100	68	-32	68%	Good
11	Health Insurance Scheme (HIS)	Rivers	100	75	-25	75%	100	65	-35	65%	100	60	-40	60%	100	62	-38	62%	Good
12	Health Insurance Scheme (HIS)	Sokoto	100	70	-30	70%	100	60	-40	60%	100	55	-45	55%	100	58	-42	58%	Good
13	Health Insurance Scheme (HIS)	Taraba	100	65	-35	65%	100	55	-45	55%	100	50	-50	50%	100	52	-48	52%	Good
14	Health Insurance Scheme (HIS)	Yobe	100	60	-40	60%	100	50	-50	50%	100	45	-55	45%	100	48	-52	48%	Good
15	Health Insurance Scheme (HIS)	Zamfara	100	55	-45	55%	100	45	-55	45%	100	40	-60	40%	100	42	-58	42%	Good
16	Health Insurance Scheme (HIS)	Abia	100	50	-50	50%	100	40	-60	40%	100	35	-65	35%	100	38	-62	38%	Good
17	Health Insurance Scheme (HIS)	Adamawa	100	45	-55	45%	100	35	-65	35%	100	30	-70	30%	100	32	-68	32%	Good
18	Health Insurance Scheme (HIS)	Bayelsa	100	40	-60	40%	100	30	-70	30%	100	25	-75	25%	100	28	-72	28%	Good
19	Health Insurance Scheme (HIS)	Borno	100	35	-65	35%	100	25	-75	25%	100	20	-80	20%	100	22	-78	22%	Good
20	Health Insurance Scheme (HIS)	Central African Republic	100	30	-70	30%	100	20	-80	20%	100	15	-85	15%	100	18	-82	18%	Good
21	Health Insurance Scheme (HIS)	Cote d'Ivoire	100	25	-75	25%	100	15	-85	15%	100	10	-90	10%	100	12	-88	12%	Good
22	Health Insurance Scheme (HIS)	DRC	100	20	-80	20%	100	10	-90	10%	100	5	-95	5%	100	8	-92	8%	Good
23	Health Insurance Scheme (HIS)	Egypt	100	15	-85	15%	100	5	-95	5%	100	0	-100	0%	100	3	-97	3%	Good
24	Health Insurance Scheme (HIS)	Guinea	100	10	-90	10%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
25	Health Insurance Scheme (HIS)	Guinea-Bissau	100	5	-95	5%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
26	Health Insurance Scheme (HIS)	Kenya	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
27	Health Insurance Scheme (HIS)	Madagascar	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
28	Health Insurance Scheme (HIS)	Mali	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
29	Health Insurance Scheme (HIS)	Morocco	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
30	Health Insurance Scheme (HIS)	Mozambique	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
31	Health Insurance Scheme (HIS)	Nicaragua	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
32	Health Insurance Scheme (HIS)	Niger	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
33	Health Insurance Scheme (HIS)	Nigeria	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
34	Health Insurance Scheme (HIS)	Rwanda	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
35	Health Insurance Scheme (HIS)	Senegal	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
36	Health Insurance Scheme (HIS)	Sierra Leone	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
37	Health Insurance Scheme (HIS)	South Africa	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
38	Health Insurance Scheme (HIS)	South Sudan	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
39	Health Insurance Scheme (HIS)	Tanzania	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
40	Health Insurance Scheme (HIS)	Togo	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
41	Health Insurance Scheme (HIS)	Tunisia	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
42	Health Insurance Scheme (HIS)	Uganda	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
43	Health Insurance Scheme (HIS)	Uzbekistan	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
44	Health Insurance Scheme (HIS)	Vietnam	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
45	Health Insurance Scheme (HIS)	Yemen	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
46	Health Insurance Scheme (HIS)	Zambia	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
47	Health Insurance Scheme (HIS)	Zimbabwe	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good
48	Health Insurance Scheme (HIS)	World	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	100	0	-100	0%	Good

No	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan / Kegiatan	Kategori Kegiatan	Realisasi Kinerja Utama Program dan Kegiatan				Target Kinerja Utama Program dan Kegiatan										Monev Pencapaian Tahun		
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Berkas Kinerja Tahun				
			Realisasi Pencapaian	Target Pencapaian	Realisasi Pencapaian	Target Pencapaian	Realisasi Pencapaian	Target Pencapaian	Realisasi Pencapaian	Target Pencapaian	Realisasi Pencapaian	Target Pencapaian	Realisasi Pencapaian	Target Pencapaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kegiatan Manajemen Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan Manajemen Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kegiatan Manajemen Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan Manajemen Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kegiatan Manajemen Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan Manajemen Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kegiatan Manajemen Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan Manajemen Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

















**SAB IX  
PEMETAPAN INDIKATOR KINERJA DASAR**

**9.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dapat dilakukan melalui dua cara. Cara pertama adalah dengan melakukan pengukuran langsung terhadap indikator kinerja utama. Cara kedua adalah dengan melakukan pengukuran tidak langsung terhadap indikator kinerja utama. Cara pertama lebih akurat karena pengukuran dilakukan langsung terhadap indikator kinerja utama. Cara kedua lebih sederhana karena pengukuran dilakukan terhadap indikator kinerja utama yang lebih mudah diukur.

**Tabel 9.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Data Samudra Tahun 2012-2013**

No.	Kategori	Indikator	Tahun Dasar (2012)				Tahun Sasaran (2013)
			2012	2013	2014	2015	
1	Kategori 1	Indikator 1.1	100	100	100	100	100
2		Indikator 1.2	100	100	100	100	100
3	Kategori 2	Indikator 2.1	100	100	100	100	100
4		Indikator 2.2	100	100	100	100	100
5	Kategori 3	Indikator 3.1	100	100	100	100	100
6		Indikator 3.2	100	100	100	100	100
7	Kategori 4	Indikator 4.1	100	100	100	100	100
8		Indikator 4.2	100	100	100	100	100
9	Kategori 5	Indikator 5.1	100	100	100	100	100
10		Indikator 5.2	100	100	100	100	100
11	Kategori 6	Indikator 6.1	100	100	100	100	100
12		Indikator 6.2	100	100	100	100	100
13	Kategori 7	Indikator 7.1	100	100	100	100	100
14		Indikator 7.2	100	100	100	100	100
15	Kategori 8	Indikator 8.1	100	100	100	100	100
16		Indikator 8.2	100	100	100	100	100
17	Kategori 9	Indikator 9.1	100	100	100	100	100
18		Indikator 9.2	100	100	100	100	100
19	Kategori 10	Indikator 10.1	100	100	100	100	100
20		Indikator 10.2	100	100	100	100	100

[illegible]

[illegible]



Tabel 9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terdapat  
dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Sambutan Tahun 2013-2014

ID	NAME (LAST, FIRST, MIDDLE) ИМЯ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕВО, ПОСРЕДНЕЕ)	BIRTH DATE ДАТА РОЖДЕНИЯ	BIRTH PLACE МЕСТО РОЖДЕНИЯ			BIRTH TIME ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ			BIRTH WEIGHT МАССА РОЖДЕНИЯ	BIRTH LENGTH РОСТ ПРИ РОЖДЕНИИ	BIRTH HEAD CIRCUMFERENCE ОБЪЕМ ГОЛОВЫ ПРИ РОЖДЕНИИ	BIRTH Apgar 1 АПГАР 1	BIRTH Apgar 5 АПГАР 5
			Country Страна	Region Регион	City Город	BIRTH TIME ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ							
						Day День	Month Месяц	Year Год					
1	John Doe Джон Доу	1990-01-01	USA США	CA Калифорния	LA Лос-Анджелес	01	01	1990	3.5 kg 7.7 lb	50 cm 19.7 in	34 cm 13.4 in	9	9
2	Jane Smith Джейн Смит	1992-03-15	USA США	NY Нью-Йорк	NYC Нью-Йорк	15	03	1992	3.2 kg 7.1 lb	48 cm 18.9 in	33 cm 13.0 in	8	8
3	Michael Brown Майкл Браун	1995-07-22	USA США	TX Техас	DFW Даллас	22	07	1995	3.8 kg 8.4 lb	52 cm 20.5 in	35 cm 13.8 in	10	10
4	Sarah White Сара Уайт	1998-11-05	USA США	FL Флорида	MIA Майами	05	11	1998	3.1 kg 6.8 lb	46 cm 18.1 in	32 cm 12.6 in	7	7
5	David Green Дэвид Грин	2000-05-10	USA США	IL Иллинойс	CHI Чикаго	10	05	2000	3.6 kg 7.9 lb	51 cm 20.1 in	34 cm 13.4 in	9	9
6	Emily Black Эмили Блэк	2002-09-18	USA США	WA Вашингтон	SEA Сиэтл	18	09	2002	3.3 kg 7.3 lb	49 cm 19.3 in	33 cm 13.0 in	8	8
7	James Taylor Джеймс Тейлор	2005-02-28	USA США	OH Огайо	CIN Цинциннати	28	02	2005	3.7 kg 8.2 lb	53 cm 21.0 in	36 cm 14.2 in	11	11
8	Alice Johnson Алиса Джонсон	2007-06-12	USA США	MD Мэриленд	BAL Балтимор	12	06	2007	3.4 kg 7.5 lb	47 cm 18.5 in	32 cm 12.6 in	7	7
9	Robert King Роберт Кинг	2009-10-03	USA США	GA Джорджия	ATL Атланта	03	10	2009	3.9 kg 8.6 lb	54 cm 21.3 in	37 cm 14.6 in	12	12
10	Olivia Scott Оливия Скотт	2011-04-20	USA США	CO Колорадо	DEN Денвер	20	04	2011	3.5 kg 7.7 lb	50 cm 19.7 in	34 cm 13.4 in	9	9

















NO	ASPEK/COMPARISON SYNDIKAT/RESOLUSI HIMPUNAN PERHIMPUNAN (JURUSAN)	KETERANGAN KETERANGAN PADA AWAL TERBUKLAH REVISI	REVISI/REVISI REVISI		REVISI/REVISI REVISI						REVISI REVISI REVISI REVISI	
			REVISI/REVISI REVISI		REVISI/REVISI REVISI							
			REVISI/REVISI REVISI		REVISI/REVISI REVISI							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
3	3	3	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
4	4	4	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
5	5	5	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
6	6	6	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
7	7	7	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
8	8	8	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
9	9	9	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
10	10	10	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
11	11	11	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
12	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
13	13	13	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
14	14	14	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
15	15	15	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
16	16	16	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
17	17	17	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
18	18	18	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
19	19	19	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
20	20	20	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
21	21	21	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
22	22	22	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
23	23	23	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
24	24	24	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
25	25	25	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
26	26	26	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
27	27	27	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
28	28	28	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
29	29	29	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
30	30	30	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
31	31	31	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
32	32	32	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
33	33	33	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
34	34	34	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
35	35	35	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
36	36	36	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
37	37	37	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
38	38	38	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
39	39	39	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
40	40	40	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
41	41	41	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
42	42	42	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
43	43	43	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
44	44	44	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
45	45	45	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
46	46	46	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
47	47	47	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
48	48	48	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
49	49	49	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
50	50	50	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
51	51	51	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
52	52	52	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
53	53	53	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
54	54	54	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
55	55	55	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
56	56	56	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
57	57	57	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
58	58	58	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
59	59	59	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
60	60	60	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
61	61	61	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
62	62	62	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
63	63	63	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
64	64	64	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
65	65	65	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
66	66	66	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
67	67	67	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
68	68	68	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
69	69	69	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
70	70	70	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
71	71	71	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
72	72	72	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
73	73	73	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
74	74	74	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
75	75	75	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
76	76	76	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
77	77	77	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
78	78	78	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
79	79	79	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
80	80	80	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
81	81	81	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
82	82	82	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
83	83	83	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
84	84	84	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
85	85	85	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
86	86	86	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
87	87	87	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
88	88	88	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
89	89	89	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
90	90	90	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
91	91	91	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
92	92	92	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
93	93	93	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
94	94	94	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
95	95	95	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
96	96	96	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
97	97	97	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
98	98	98	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
99	99	99	0	1	1	0	0	0	0	11	11	
100	100	100	0	1	1	0	0	0	0	11	11	





№	АИСТИ/ПРОЕКТ/ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	КОДИРОВАНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРА	РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ				ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ										ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ		
			КАЧЕСТВО				КАЧЕСТВО												
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022			2023	
			Исполнено	Планируется	Исполнено	Планируется	Исполнено	Планируется	Исполнено	Планируется	Исполнено	Планируется	Исполнено	Планируется	Исполнено	Планируется		Исполнено	Планируется
1	1. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	1.1. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	2.1. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	3.1. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	4.1. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	5.1. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	6. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	6.1. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	7. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	7.1. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	8. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	8.1. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	9. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	9.1. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	10. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	10.1. Анализ качества жизни населения Республики Саха (Якутия)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4





### 10.3 PENGENDALIAN DAN KUALITAS

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018, maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
2. Kepala Bappeda Kota Sawahlunto mengkompas dan mengontrol hasil pencapaian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
3. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya;
4. Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;
5. Kepala Bappeda Kota Sawahlunto menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (3);
6. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (4) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

td

ALI YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**HARISMAN, SH**  
NIP. 19621210 198302 1 004